

**PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN
AKUNTANSI *SUKUK* NEGARA DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

Rizky Aditya Nugraha

NIM. 135020307111074

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN
AKUNTANSI SUKUK NEGARA DI INDONESIA**

yang disusun oleh:

Nama : Rizky Aditya Nugraha
NIM : 135020307111074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Mei 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA
NIP. 198410242010121003
(Dosen Pembimbing)
2. Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA.
NIP. 2011078711132001
(Dosen Penguji)


.....

.....

Malang, 23 Mei 2017

Ketua Jurusan Akuntansi,



Nurkholis, Ph.D., Ak., CA.
NIP. 196607061991031001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN
AKUNTANSI *SUKUK* NEGARA DI INDONESIA**

Yang disusun oleh:

Nama : Rizky Aditya Nugraha
NIM : 135020307111074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi dan Keuangan Syariah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 8 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA.

NIP. 198410242010121003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Aditya Nugraha
NIM : 135020307111074
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi dan Keuangan Syariah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN AKUNTANSI *SUKUK* NEGARA DI INDONESIA

adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 5 Mei 2017

Pembuat Pernyataan,



Rizky Aditya Nugraha

NIP. 135020307111074

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rizky Aditya Nugraha

NIM : 135020307111074

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

telah melakukan penelitian Skripsi dengan judul:

PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN

AKUNTANSI *SUKUK* NEGARA DI INDONESIA

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku, artikel jurnal dan website resmi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA.

NIP. 198410242010121003

RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Rizky Aditya Nugraha
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 29 Agustus 1995
Alamat Rumah : Perum. Graha Laksana
Tidar C-22, RT/RW 30/03
Desa Karang Widoro, Kec.
Dau, Kab. Malang, Jawa
Timur 65151
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Email : rizky.ibnuabdullah@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

2010-2013 **SMA Negeri 4 Malang**, Malang
2007-2010 **SMP Negeri 1 Kesamben**, Blitar
2004-2010 **SD Negeri 5 Kesamben**, Blitar

Pelatihan

2015 Peserta, **Akuntansi dan Keuangan Syariah**, IFAS FEB UB
2015 Peserta, **Aulia Software – Software Akuntansi Syariah**, IFAS FEB
UB
2016 Peserta, **Diklat Pengelola LKS (Lembaga Keuangan Syariah)**,
Graha KANINDO Syariah JATIM

Pengalaman Organisasi

2013 - 2014 Anggota Forum Studi Islam dan Lingkungan (**FORSTILLING**)
FEB UB
2013 Anggota *Center For Islamic Economic Studies (CIES)* FEB UB

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Tuhan Semesta Alam yang dengan nikmatnya niat-niat baik seorang hamba menjadi sempurna. Karena dengan hidayah dan taufik-Nya penelitian skripsi ini yang berjudul: **“PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN AKUNTANSI *SUKUK* NEGARA DI INDONESIA”** dapat terselesaikan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa aktivitas ini dapat berjalan dengan baik disebabkan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Erie Widodo, SE., Ak. dan Retna Safriliana, SE., Ak., M.Si., CA., semoga Allah senantiasa menjaga mereka, yang terus memberikan dukungan berupa nasihat dan doa.
2. Bapak Achmad Zaky., SE., MSA., Ak., CA., CMA., SAS., semoga Allah senantiasa menjaganya, selaku Dosen Pembimbing yang bersedia dengan sabar untuk memberikan berbagai bimbingan, kritik, saran, dan arahan yang membangun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA., semoga Allah senantiasa menjaganya, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mejadi lebih baik.

4. Bapak Nurkholis, Ph. D., Ak., CA., semoga Allah senantiasa menjaganya, selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB-UB yang telah memberikan nasihat dan dukungan agar skripsi ini memiliki kualitas yang baik.
5. Adik Saya Andi Yusuf Saefullah Nugraha yang Saya sayangi karena Allah yang telah menjadi teman untuk melepas kepenatan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat Saya seperjuangan, Izza, Bayu, Rifaldi, Sumantri, Dimas, Indra, Arif, Rizqon, semoga Allah senantiasa kalian semua, yang saling membantu dan menjadi teman untuk berdiskusi tentang banyak hal.
7. Pihak lain yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 23 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kontribusi Penelitian	7
1.4.1. Kontribusi Praktis	7
1.4.2. Kontribusi Kebijakan.....	7
1.5. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

2.1	Konsep Perspektif <i>Khalifatullah Fil 'Ardh</i> dalam Akuntansi Syariah ...	10
2.2	Manusia sebagai khalifah.....	11
2.3	Tujuan Penciptaan Manusia.....	12
2.4	Makna Ibadah.....	13
2.5	Syariat Islam Sempurna dan Mengandung Hikmah	14
2.6	Pentingnya Seseorang untuk Memahami Ilmu Fikih Muamalah <i>Maaliyyah</i>	15
2.7	Karakteristik Transaksi Syariah.....	17
2.7.1	Konsep Keadilan.....	17
2.8	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	29
2.8.1	Jenis-Jenis SBSN Berdasarkan Akad yang Digunakan	29
2.8.2	Struktur Akad dalam Penerbitan SBSN.....	29
2.8.3	Jenis Risiko Berinvestasi pada SBSN.....	30
2.8.4	Metode Penerbitan SBSN	31
2.8.5	<i>Underlying Asset</i>	31
2.8.6	Mekanisme Penerbitan SBSN.....	34
2.8.7.	<i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i>	35
2.9	Fatwa-Fatwa.....	35
2.10	Riset Terdahulu	37
2.11	Kerangka Konseptual.....	40

BAB III METODE PENELITIAN 41

3.1	Jenis Penelitian.....	41
-----	-----------------------	----

3.2	Pendekatan Penelitian	41
3.3	Jenis Data	42
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5	Teknik Analisis Data.....	43
 BAB IV GAMBARAN UMUM SBSN DI INDONESIA.....		46
4.1.	Gambaran Riil Praktik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).....	46
4.1.1	Praktik SBSN Seri <i>Sukuk</i> Ritel (SR).....	47
4.1.2	Praktik SBSN Seri <i>Project Based Sukuk</i> (PBS).....	52
4.1.3	Praktik SBSN Seri <i>Sukuk</i> Dana Haji Indonesia (SDHI)	53
4.1.4	Praktik SBSN Seri <i>Sukuk</i> Nasional Indonesia (SNI)	54
4.1.5	Praktik SBSN Seri <i>Islamic Fixed Rate</i> (IFR)	56
4.1.6	Praktik SBSN Seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)	57
4.1.7	Praktik SBSN Seri <i>Sukuk</i> Tabungan (ST).....	58
4.2.	Sintesis	61
4.2.1.	<i>Underlying Asset</i>	61
4.2.2.	Strukturisasi Akad.....	61
4.2.3.	Pola Imbal Hasil.....	64
4.2.4.	Jaminan Pemerintah	64
 BAB V UNDERLYING ASSETS		65
5.1.	<i>Underlying Asset</i> SBSN	65
5.2.	Skema Penerbitan SBSN dengan <i>Underlying Asset</i> BMN	67
5.3.	Kendala Pemindahtanganan Aset BMN	69

5.4. Sintesis	72
BAB VI STRUKTURISASI AKAD.....	74
6.1. Strukturisasi akad SBSN.....	74
6.1.1. <i>Ijarah sale and lease back</i>	74
6.1.2. <i>Ijarah asset to be leased</i>	89
6.1.3. <i>Ijarah al khadamat</i>	94
6.1.4. <i>Wakalah</i>	101
6.2. Sintesis	107
6.2.1. <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>	107
6.2.2. <i>Ijarah Asset to be Leased</i>	108
6.2.3. <i>Ijarah Al-Khadamat</i>	109
6.2.4. <i>Wakalah</i>	110
BAB VII IMBAL HASIL DAN JAMINAN PEMERINTAH	111
7.1. <i>Fix rate</i>	114
7.2. Sintesis	117
BAB VIII SUBSTANSI PERLAKUAN AKUNTANSI SBSN	120
8.1. Akad <i>ijarah sale and lease back</i>	121
8.1.1. Substansi Akuntansi Penerbitan.....	121
8.1.2. Substansi Akuntansi Pembayaran <i>Ijarah</i>	125
8.2. Akad <i>ijarah asset to be leased</i>	127
8.2.1. Substansi Akuntansi Penerbitan.....	128

8.2.2. Substansi Akuntansi Pembayaran <i>Ijarah</i>	131
8.3. Akad <i>ijarah al khadamat</i>	133
8.3.1. Substansi Akuntansi Penerbitan.....	134
8.3.2. Substansi Akuntansi Pembayaran <i>Ijarah</i>	136
8.4. Akad <i>wakalah</i>	137
8.5. Sintesis.....	139
BAB IX PENUTUP	142
9.1. Simpulan	142
9.2. Keterbatasan Penelitian.....	143
9.3. Saran	143
9.3.1. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	143
9.3.2. Bagi Dewan Fatwa dan Ulama	143
9.3.3. Bagi Regulator <i>Sukuk</i> Negara	144
DAFTAR PUSTAKA	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Fatwa-fatwa DSN MUI terkait obligasi syariah dan <i>sukuk</i> negara	35
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 5.1 <i>Underlying Asset</i> SBSN	65
Tabel 6.1 Strukturisasi akad SBSN	75
Tabel 6.2 Perbandingan Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Penerbitan SBSN Akad <i>Sale and Lease Back</i>	34
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	40
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data – Miles Huberman.....	43
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data.....	45
Gambar 4.1 Deskripsi SBSN Seri SR-001 sampai SR-003	47
Gambar 4.2 Skema akad <i>ijarah sale and lease back</i>	48
Gambar 4.3 Deskripsi SBSN Seri SR-008.....	49
Gambar 4.4 Skema akad <i>ijarah asset to be leased</i>	50
Gambar 4.5 Ilustrasi Perhitungan Imbalan SR-008	50
Gambar 4.6 Deskripsi SBSN Seri PBS-014.....	52
Gambar 4.7 Skema akad <i>ijarah al khadamat</i>	53
Gambar 4.8 Deskripsi SBSN Seri SDHI 2023 A.....	54
Gambar 4.9 Struktur Akad <i>Wakalah</i>	55
Gambar 4.10 Deskripsi SBSN Seri SNI-21 & SNI-26	55
Gambar 4.11 Deskripsi SBSN Seri SNI-14 sampai SNI-24	56
Gambar 4.12 Deskripsi SBSN Seri IFR-010	57
Gambar 4.13 Deskripsi SBSN Seri SPN-S 21032017	58
Gambar 4.14 Deskripsi SBSN Seri ST-001	59
Gambar 4.15 Ilustrasi Perhitungan Imbalan SBSN Seri ST-001	60
Gambar 4.16 Struktur Akad <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>	62
Gambar 4.17 Struktur Akad <i>Ijarah Asset To Be Leased</i>	63
Gambar 4.18 Struktur Akad <i>Ijarah Al-Khadmat</i>	63

Gambar 4.19 Struktur Akad <i>Wakalah</i>	64
Gambar 5.1 Skema Transaksi Jualbeli Hak Manfaat <i>Underlying Asset</i> SBSN.....	68
Gambar 6.1 Skema Akad <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>	76
Gambar 6.2 Substansi Skema Akad <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>	79
Gambar 6.3 Perbandingan Skema Jual Beli 'Inah dengan <i>Sale And Lease Back</i> .	81
Gambar 6.4 Perbandingan Skema Jual Beli <i>Wafa</i> ' dengan <i>Sale and Lease Back</i>	83
Gambar 6.5 Skema Akad <i>Ijarah Asset To Be Leased</i>	89
Gambar 6.6 Substansi Skema <i>Ijarah Asset To Be Leased</i>	92
Gambar 6.7 Skema Akad <i>Ijarah Al-Khadamat</i>	95
Gambar 6.8 Skema inti <i>ijarah al khadamat</i>	97
Gambar 6.9 Substansi skema penerbitan SDHI antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan.....	100
Gambar 6.10 Skema akad <i>wakalah</i>	102
Gambar 6.11 Perbandingan Skema <i>Sale and Lease Back</i> dengan <i>Wakalah</i>	104
Gambar 7.1 Penentuan Imbal Hasil pada skema SR-007	111
Gambar 7.2 Penentuan Imbal Hasil pada skema SR-008	112
Gambar 7.3 Penentuan Imbal Hasil pada skema ST-001.....	113
Gambar 7.4 Imbal Hasil SBSN	116
Gambar 8.1 Penyajian SBSN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	122
Gambar 8.2 Pengungkapan Pos SBN Jangka Pendek dalam CALK	123
Gambar 8.3 Pengungkapan Pos SBN Jangka Panjang dalam CALK	124
Gambar 8.4 Skema akad <i>ijarah sale and lease back</i>	125
Gambar 8.5 Skema akad <i>ijarah asset to be leased</i>	130

Gambar 8.6 Skema Akad <i>Ijarah Al-Khadamat</i>	135
Gambar 8.7 Skema akad <i>wakalah</i>	137
Gambar 8.9 Ilustrasi Penyajian Kewajiban SBSN.....	139

ABSTRAK

PRINSIP *SUBSTANCE OVER FORM* PADA TRANSAKSI DAN AKUNTANSI SUKUK NEGARA DI INDONESIA

Oleh:

Rizky Aditya Nugraha

Dosen Pembimbing: Achmad Zaky, SE., Ak., MSA., SAS., CMA., CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi dari implementasi transaksi dan akuntansi *sukuk* negara di Indonesia melalui aspek kepatuhan syariah dan prinsip akuntansi berlaku umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan metode pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini menghasilkan 4 bahasan pokok, yaitu *underlying asset*, strukturisasi akad, imbal hasil dan jaminan, dan perlakuan substansi akuntansi *sukuk* negara. Solusi atas kendala pemindahtanganan *underlying asset* berupa aset Barang Milik Negara memiliki dampak pada substansi struktur akad. Sehingga struktur akad *sukuk* negara memiliki risiko jual beli *wafa'* yang diharamkan oleh hukum syariah. Adanya jaminan dari pemerintah untuk membayar kembali nilai nominal investasi menyebabkan substansi akad *sukuk* negara berubah. Substansi akad penerbitan *sukuk* negara menjadi akad utang-piutang. Sedangkan imbal hasil yang diberikan pemerintah masih ditentukan berdasarkan nilai nominal investasi. Sehingga keberadaan tambahan manfaat dari imbal hasil atas transaksi utang-piutang memiliki risiko riba. Penelitian ini juga menunjukkan pemerintah Indonesia perlu memiliki standar akuntansi khusus terkait penerbitan *sukuk* negara.

Kata kunci: *underlying asset*, stukturisasi akad, imbal hasil, jaminan, akuntansi *sukuk*

ABSTRACT

SUBSTANCE OVER FORM PRINCIPLE ON *SUKUK* TRANSACTION AND ACCOUNTING IN INDONESIA

By:

Rizky Aditya Nugraha

Supervisor: Achmad Zaky, SE., Ak., MSA., SAS., CMA., CA

The research aims to analyze substance of *sukuk* transaction and accounting in Indonesia in terms of the Sharia law and accounting principle are generally accepted. This descriptive qualitative research employs the secondary data obtained through literature study. The result of the study are divided into 4 main points, i.e.: underlying assets, contract structures, yields and collateral, and *sukuk* accounting. The solution towards the obstacle rising from the underlying asset ownership transfer, especially the state properties, influences the substance of contract structure. *Sukuk* contract structure contains *wafa'* trading risk prohibited by Sharia law. The government collateral to repay a nominal value of investment triggers contract structure changes. The substance of *sukuk* issuance contract becomes loan contract. However, yield given by the government is still determined by the nominal value of investment. Therefore, the existence of additional benefit from the yield in the loan contract includes usury risk. The research also shows that Indonesian government needs special accounting standard concerning on the issuance of *sukuk*.

Keywords: Underlying asset, Contract structure, Yield, Collateral, *Sukuk* accounting

BAB I

PENDAHULUAN

“Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram”
[HR. Bukhari no.2083]

1.1. Latar Belakang

Pemerintah mengalami defisit APBN pada tahun 2016. Hal ini dapat diketahui dari jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun sedangkan belanja negara sebesar Rp2.095,7 triliun (DJA, 2016a). Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen pendukung yang dapat menutup defisit APBN tersebut.

Salah satu instrumen pendukung tersebut adalah instrumen pembiayaan. Instrumen pembiayaan terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu utang dan non-utang. Komponen dari instrumen utang adalah Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri. Sedangkan komponen dari instrumen non-utang adalah perbankan dalam negeri dan non perbankan dalam negeri (DJA, 2016b). Kemudian bentuk dari Surat Berharga Negara (SBN) tersebut adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Pada tahun 2016, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp364,9 triliun untuk menutup defisit anggaran melalui Surat Berharga Negara (DJA, 2016b). Sedangkan pemerintah berhasil menghimpun dana segar sebesar Rp57,18 triliun dari penjualan Surat Berharga Syariah Negara dan Surat Utang Negara pada tahun 2015. Jumlah dana tersebut didapatkan pemerintah hanya dalam kurun waktu 1

minggu (Allens, 2015). Berdasarkan keberhasilan tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk mengoptimalisasikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2016 (DJA, 2016c).

Pemerintah melihat potensi besar yang ada pada industri keuangan berbasis syariah. Industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena hanya dalam kurun waktu 6 tahun total aset perbankan syariah meningkat sebesar 3 kali lipat. Terbukti bahwa total aset perbankan syariah sampai bulan juni 2016 telah mencapai Rp306,2 triliun (OJK, 2016). Pada akhir tahun 2010 aset perbankan syariah hanya sebesar Rp97,5 triliun.

Sukuk Negara, di Indonesia disebut sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), telah dipraktikkan oleh beberapa negara. Bahrain adalah negara pertama yang menerbitkan *Sukuk* Negara pada tahun 2001 (Handayani, 2015). Sampai saat ini sudah banyak negara yang telah menerbitkan *Sukuk* Negara, di antaranya: Bahrain, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, Qatar, Turki dan lain sebagainya. Penerbitan *Sukuk* global telah mencapai USD767.099 miliar (IIFM, 2016). Indonesia menjadi negara terbesar ke-4 setelah Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Indonesia menyumbang 14,1% dari penerbitan *Sukuk* global.

SBSN dinilai dapat digunakan sebagai alternatif untuk menutup defisit APBN. Nasrullah (2015) menjelaskan terdapat 3 alasan SBSN dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan, yaitu,

Pertama, penerbitan SBSN dianggap dapat meminimalisir adanya risiko gagal bayar karena penerbitan SBSN aman dan stabil. Kedua, penambahan bunga dan fluktuatif bunga tidak akan terjadi jika instrumen pembiayaan defisit APBN menggunakan SBSN karena keuntungan yang diberikan berdasarkan akad yang disepakati. Ketiga, SBSN dinilai dapat menjaga stabilitas perekonomian Nasional.

Beberapa tahun terakhir, masyarakat terlihat mulai memiliki kesadaran tentang penerapan prinsip Islam dalam praktik ekonomi. Rama (2014) mengatakan bahwa “perbincangan tentang ekonomi syariah semakin intens dilakukan baik dalam bentuk konferensi, seminar, penulisan buku, maupun penelitian *paper*”. Peneliti juga mencermati semakin banyaknya perkumpulan atau organisasi yang menggeluti bidang ekonomi syariah, di antaranya: Komunitas Pengusaha Muslim Indonesai (KPMI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesai (IAEI), Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI), dan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI).

Sejalan dengan kesadaran tersebut, pemahaman tentang penerapan praktik *Sukuk* yang sesuai dengan konsep Islam juga semakin besar. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian mengenai *Sukuk* yang semakin bertambah. Penelitian tentang *Sukuk* pada jurnal internasional terakreditasi telah terkumpul sebanyak 59 karya (Zulkhibri, 2015). Sedangkan penelusuran peneliti, penelitian mengenai *Sukuk* pada tahun 2016 berkembang menjadi 81 karya¹. Namun demikian, kesadaran tersebut menyebabkan polemik baru tentang praktik *sukuk* negara. Polemik yang terjadi menimbulkan pro kontra terkait adanya *sukuk* negara itu sendiri.

Penelitian mengenai *sukuk* negara sudah banyak dilakukan. Ariff dan Safari (2012) mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil *sukuk* negara terhadap *yield* obligasi konvensional. Selain itu, hasil uji kausalitas *Granger* tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antara hasil dari kedua jenis surat berharga. Selanjutnya, Afshar (2013) mengatakan instrumen *sukuk* negara

¹ Penelusuran pada beberapa jurnal internasional, di antaranya: Sciancedirect, Emerald Insight, Scopus Elsevier, Proquest ditambah data dari Zulkhibri (2014).

dan obligasi dapat menyelesaikan masalah yang sama dalam aspek finansial. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu obligasi konvensional mendasarkan pada hutang dan *sukuk* negara adalah instrumen berbasis ekuitas. Zulhibri (2015) menegaskan bahwa peningkatan yang pesat di pasar *sukuk* negara tidak diimbangi dengan literatur yang ada. Sehingga masih terdapat gap yang signifikan antara laju peningkatan pasar *sukuk* dengan literatur yang tersedia.

Namun demikian, terdapat beberapa ahli mengatakan bahwa sejatinya konsep *Sukuk* negara yang ada saat ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Syaikh Taqi sebagaimana dikutip oleh Naim, dkk. (2008) menjelaskan bahwa “85% penerbitan *sukuk* negara tidak sejalan dengan ajaran Syariat Islam”. Badri (2012) mengatakan bahwa “lembar *Sukuk Ritel* yang beredar berdasarkan fatwa DSN MUI tak ubahnya seperti selebar surat bukti atas suatu piutang”. Kemudian ditegaskan oleh Tarmizi (2014) bahwa skema penerbitan SBSN di Indonesia dengan skema penerbitan *Sukuk* di Bahrain adalah sama. Dan keduanya tidak sejalan dengan kaidah-kaidah muamalah.

Taqi (2008) menjelaskan beberapa hal mengenai aplikasi kontemporer *sukuk* negara. Pertama, kepemilikan pemegang obligasi atas aset perusahaan tidak sempurna. Namun demikian, pemegang *sukuk* mendapatkan tawaran agar investasinya pada *sukuk* dapat kembali. Padahal hal tersebut tidak halal menurut perspektif syariah. Kedua, distribusi teratur untuk pemegang *sukuk* negara sangat identik dengan obligasi konvensional. Persamaan keduanya berkaitan dengan pembagian keuntungan dengan persentase tetap berdasarkan suku bunga. Ketiga, hampir semua *sukuk* negara yang diterbitkan saat ini menjamin pengembalian pokok kepada pemegang *Sukuk Ritel* pada saat jatuh tempo. Hal ini serupa dengan

konsep obligasi konvensional yang juga menjamin pembelian kembali obligasi senilai harga pokoknya.

Badri (2012) menjelaskan bahwa,

Lembar SBSN yang beredar berdasarkan fatwa DSN tampak seperti selebar surat bukti atas suatu piutang. Sedangkan *underlying asset* yang digunakan serupa dengan barang gadai atas piutang. Hal ini disebabkan karena SBSN yang berlaku di Indonesia diperjualbelikan pada nilai yang sama, tanpa ada kemungkinan terjadinya perubahan.

Kemudian Tarmizi (2014:452) juga menjelaskan bahwa “hakikat akad SBSN mirip dengan jual beli ‘*inah*’”. Jual beli ‘*inah*’ merupakan jual beli dimana penjual mendapatkan uang tunai dan pada waktu tertentu dia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih besar dengan cara tidak tunai. Lebih lanjut, Tarmizi (2014:453) mengatakan “akad SBSN serupa dengan jual beli *wafa*’ ”. Jualbeli *wafa*’ merupakan jual beli yang mempersyaratkan penjual untuk memperbolehkan pembeli memanfaatkan barang selama uang hasil penjualan barang belum dikembalikan kepada pembeli. Selanjutnya, Tarmizi (2014:455) juga menegaskan bahwa, “hakikat akad SBSN bahwa sesungguhnya skema transaksi SBSN di Indonesia adalah fiktif dan dijadikan sebagai alat untuk pengelabuan riba”. Hal ini terjadi karena kepemilikan aset tidak sempurna.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan Ariff dan Safari (2012) hanya meneliti pada aspek *yield* dari *Sukuk Ritel* dan obligasi konvensional. Sedangkan penelitian dari Afshar (2013) meneliti tentang perbedaan *sukuk* dan obligasi serta aspek manfaat. Kemudian penelitian Zulkhibri (2015) meneliti tentang ketersediaan literatur tentang *Sukuk*. Namun demikian, Maurer (2010) telah mencoba meneliti tentang apa saja yang menjadi fokus peneliti dari penelitian yang ada. Penelitian tersebut menemukan

bahwa kebanyakan dari peneliti *sukuk* hanya meneliti pada aspek bentuk (*legal form*) dan belum meneliti hingga aspek substansi dari *sukuk* itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu penelitian yang meneliti *sukuk* dari aspek kepatuhan syariah di samping juga meneliti dari aspek operasional keuangan yang tentunya meneliti *sukuk* dari sisi substansialnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Taqi (2008) telah meneliti *sukuk* pada aspek kepatuhan syariah. Namun, penelitian tersebut dilakukan pada *sukuk* internasional. Sehingga perlu ada penelitian mengenai praktik *sukuk* negara di Indonesia. Kemudian Badri (2012) dan Tarmizi (2014) telah meneliti SBSN di Indonesia dari sisi substansial *sukuk* dan dikaitkan pada aspek kepatuhan syariah. Akan tetapi, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam tentang *sukuk* negara di Indonesia. Penelitian Badri (2012) dan Tarmizi (2014) masih bersifat umum dan tidak membahas mengenai akuntansi SBSN. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang dapat membahas SBSN secara mendalam dan menyeluruh dari segi substansialnya baik dari aspek operasional, kepatuhan syariah, dan aspek akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PRINSIP SUBSTANCE OVER FORM PADA TRANSAKSI DAN AKUNTANSI SUKUK NEGARA DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi dari implementasi *sukuk* negara di Indonesia ditinjau dari aspek kepatuhan syariah?

2. Bagaimana substansi dari implementasi akuntansi *sukuk* negara di Indonesia ditinjau dari prinsip akuntansi berlaku umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis substansi dari implementasi *sukuk* negara di Indonesia berdasarkan aspek kepatuhan syariah.
2. untuk menganalisis substansi dari implementasi akuntansi *sukuk* negara di Indonesia ditinjau dari prinsip akuntansi berlaku umum.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas kepada masyarakat terkait *sukuk* negara di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat menentukan sikapnya dalam memilik *sukuk* negara sebagai instrumen investasinya.

1.4.2. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada kebijakan berupa:

1. Pertimbangan bagi pemerintah/regulator untuk menentukan regulasi *sukuk* negara di Indonesia.
2. Pertimbangan bagi dewan fatwa untuk menentukan fatwa terkait penerbitan *sukuk* negara di Indonesia.
3. Pertimbangan bagi dewan standar akuntansi pemerintah untuk membuat standar khusus terkait dengan penerbitan *sukuk* negara di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi 9 bab. Setiap bab memiliki keterkaitan erat dengan bab-bab yang lain. Setiap bab disusun dengan runtut dan saling terkait sehingga membentuk sebuah kesatuan penelitian yang ilmiah. Guna memudahkan pembahasan yang mendalam dan terarah maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penentuan judul, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian dari penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang ada.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis data dan metode pengumpulannya, dan teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data.

Bab IV Gambaran Umum *Sukuk* Negara di Indonesia

Bab ini memaparkan tentang kondisi riil praktik *sukuk* negara di Indonesia. Pemaparan tersebut disajikan dalam bentuk gambaran data riil yang akan digunakan sebagai objek analisis.

Bab V *Underlying Asset*

Bab ini menganalisis tentang aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan *sukuk* negara di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan cara menganalisis

aset apa saja yang digunakan dalam penerbitan *sukuk* negara di Indonesia. Kemudian menganalisis kesesuaian syariah penggunaan *underlying asset* tersebut didukung dengan bukti-bukti yang kuat, relevan dan valid.

Bab VI Strukturisasi Akad

Bab ini menganalisis tentang akad yang digunakan dalam penerbitan *sukuk* negara di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan cara menganalisis bentuk-bentuk akad yang digunakan dengan alat analisis yang andal.

Bab VII Imbal Hasil dan Jaminan Pemerintah

Bab ini menganalisis tentang imbal hasil yang diberikan pemerintah bagi pemegang *sukuk* negara di Indonesia dan dampak adanya jaminan pemerintah terhadap substansi akad. Proses analisis dilakukan dengan menyajikan bukti-bukti yang otentik dan diuji secara ilmiah.

Bab VIII Perlakuan Akuntansi

Bab ini membahas tentang penggunaan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) pada penerbitan *sukuk* negara di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan cara membandingkan pencatatan akuntansi yang digunakan dengan PABU.

Bab IX Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan saran/rekomendasi dari peneliti untuk pihak-pihak yang terkait maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

"Pelajarilah aturan jual beli baru buka usaha di pasar. Siapa saja yang tidak menguasai fikih jual beli mau tidak mau dia akan memakan harta riba"
[Imam Malik]

2.1 Konsep Perspektif *Khalifatullah Fil 'Ardh* dalam Akuntansi Syariah

Konsep baru akuntansi syariah tidak lahir begitu saja. Akan tetapi, akuntansi syariah muncul dikarenakan berbagai faktor yang kompleks, *non-linear*, dinamis, dan berkembang (Triyuwono, 2015:18). Di antara faktor yang mendasarinya adalah perkembangan ilmu ekonomi yang mulai mengarah pada konsep Islam. Perkembangan ilmu ekonomi Islam menyebabkan proses pencatatan dari suatu transaksi (akuntansi) akan berubah pula. Sehingga proses pengembangan akuntansi membutuhkan suatu paradigma baru yang sesuai dengan konsep Islam.

Paradigma tersebut harus menjadi landasan untuk mengembangkan konsep akuntansi syariah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Triyuwono (2015:67) mengatakan bahwa seorang muslim harus memiliki perspektif *khalifatullah fil ardh* untuk mengembangkan akuntansi syariah. Perspektif *khalifatullah fil ardh* merupakan cara sebuah konsep dimana keberadaan manusia di bumi ini merupakan wakil dari Tuhan. Sehingga konsekuensi dari hal tersebut adalah segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan Tuhan (Triyuwono, 2015:58). Oleh karena itu, manusia yang diciptakan sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifatullah fil ardh*) harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Tuhan, termasuk di dalamnya adalah aspek pengembangan akuntansi.

2.2 Manusia sebagai khalifah

Manusia hidup di dunia dengan membawa tugas sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran yang berbunyi, “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’...” [QS. Al-Baqarah: 30]. Makna dari khalifah di sini adalah pengganti dari kaum sebelumnya. Katsir (2004a:100) ketika menafsirkan ayat “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” menjelaskan bahwa khalifah adalah suatu kaum yang akan menggantikan kaum yang lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Kemudian Ibnu Jarir sebagaimana dikutip oleh Katsir (2004a:101) mengatakan makna dari ayat tersebut adalah Allah *Subhanallahu wa ta’ala* berfirman,

“Aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah dari-Ku yang menjadi pengganti-Ku dalam memutuskan perkara secara adil di antara semua makhluk-Ku. Khalifah tersebut adalah Adam dan mereka yang menempati posisinya dalam ketaatan kepada Allah dan pengambilan keputusan secara adil di tengah-tengah umat manusia”.

Lanjutan dari ayat tersebut, ”...Mereka (para malaikat) berkata,’Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Allah berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.” [QS. Al Baqarah:30]. Katsir (2004a:100) menafsirkan ayat “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” artinya:

Aku (Allah) mengetahui dalam penciptaan golongan ini (manusia) terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian khawatirkan, dan kalian tidak mengetahui, bahwa Aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka juga terdapat para *shiddiqun*, *syuhada’*, orang-orang yang shalih, orang-orang yang taat

beribadah, ahli zuhud, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang cinta kepadaNya, serta orang-orang yang mengikuti para RasulNya.

Sehingga khalifah merupakan para Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk memutuskan perkara di antara manusia tentang kedzaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka, dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Kewajiban manusia yang menjadi kaum dari para Nabi dan Rasul adalah mengikuti segala sesuatu yang telah diputuskan oleh mereka. Kepatuhan manusia terhadap keputusan para Nabi dan Rasul merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah yang telah menjadi tujuan utama manusia diciptakan.

2.3 Tujuan Penciptaan Manusia

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk tujuan yang besar dan mulia. Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat: 56 yang berbunyi, “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaKu”. Sa'id (2016) mengatakan kesimpulan dari dalil tersebut adalah hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah sajalah manusia itu diciptakan.

Katsir (2004c:546) menafsirkan ayat tersebut, dia berkata “maksudnya, Aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaKu, bukan karena Aku membutuhkan mereka”. Sedangkan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Katsir (2004c:546) mengatakan bahwa arti dari ayat tersebut adalah “melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepadaKu, baik secara sukarela maupun terpaksa.”

Sehingga tujuan penciptaan manusia yang utama bukan untuk suatu perkara yang remeh. Akan tetapi, tujuan utama dari manusia diciptakan adalah untuk

tunduk dan patuh beribadah kepada Allah *Subhanallahu wa ta'ala* semata, bukan kepada selainNya baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa.

2.4 Makna Ibadah

Yazid (2007) mengatakan secara bahasa ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ibadah berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Utsaimin (2009:51) menjelaskan makna ibadah dalam pengertian umum adalah “sikap menghinakan diri di hadapan Allah bersamaan dengan persaaan cinta dan pengagungan dengan mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya dalam bentuk yang telah dibawakan oleh syariat-syariatNya”. Katsir (2004a:31) menekankan bahwa ibadah merupakan “kedudukan yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba menjadi mulia, karena kecondongannya kepada Allah *Ta'ala* saja dan Dia telah menyebut RasulNya sebagai hamba yang menempati kedudukan yang paling mulia”. Taimiyyah (1999:19) mengatakan “Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak”.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari berbagai penjelasan makna ibadah di atas. Ibadah merupakan suatu bentuk ketundukkan seorang hamba kepada Allah untuk menjalankan syariat Islam dengan rasa cinta kepada Allah baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak dan tidak tampak baik secara sukarela maupun terpaksa. Sehingga dengan ketundukkannya manusia akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah *Subhanallahu wa ta'ala*.

2.5 Syariat Islam Sempurna dan Mengandung Hikmah

Syariat Islam merupakan semua aturan Allah yang diturunkan untuk hambaNya baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan adab baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan manusia (Qathan, 1996:13-14). Islam telah disempurnakan oleh Allah dengan diturunkannya syariat kepada utusanNya yang mulia yaitu Muhammad bin Abdullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* untuk umat manusia. Kesempurnaan Islam telah dikabarkan dari firman-Nya yang berbunyi, "...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu atas nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" [QS. Al-Maidah:3]. Katsir (2004b:18) menjelaskan makna dari ayat tersebut bahwa "Ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa sallam*". Qayyim (2000:525) mengatakan bahwa ketentuan hukum yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* itu merupakan ketentuan syariat yang paling sempurna.

As Sa'di (2011:10) mengatakan "Sesungguhnya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad *Shallallahu'alaihi wa sallam* adalah agama yang paling sempurna dan paling utama, paling tinggi dan paling agung". Lebih lanjut, As Sa'di (2011:11-16) menjelaskan,

Islam telah mencakup kebaikan-kebaikan, kesempurnaan, ketepatan, rahmat, keadilan, dan hikmah, Islam pun menunjukkan apa-apa darinya berupa ilmu-ilmu syariat dan hukum-hukum serta ilmu-ilmu alam dan sosial kemasyarakatan.

Kebaikan Islam mencakup segala aspek kehidupan dan Islam dapat mengatasi masalah-masalah kehidupan. Agama Islam akan memberi petunjuk kepada seorang hamba dalam masalah aqidahnya, akhlaknya, hubungan sosialnya, arahan-arahan supaya di tempuh dan permulaan dasar dalam berfikir serta segala macam kegiatan yang akan mengantarkan mereka untuk mencapai manfaat bagi kehidupan dunia dan akhiratnya (As-Sa'di, 2012:3).

Oleh karena itu, Islam telah menjadi agama yang sempurna yang membahas semua aspek kehidupan, tidak ada sedikit pun yang terluput baik yang kecil maupun besar kecuali semua telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam*. Ketika Allah telah menyempurnakan Islam maka konsekuensi dari hal tersebut adalah segala perkara yang diatur dalam syariat Islam memiliki hikmah yang besar atau mengandung kebaikan di dalamnya. Kebaikan tersebut akan meliputi segala aspek kehidupan berupa ilmu-ilmu syariat dan hukum-hukum serta ilmu-ilmu alam dan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah hubungan duniawi antara manusia dengan manusia yang berkaitan dengan muamalah *maaliyyah* (harta).

2.6 Pentingnya Seseorang untuk Memahami Ilmu Fikih Muamalah *Maaliyyah*

Ilmu syariat Islam memiliki cakupan yang sangat luas. (Qayyim, 2004:293) menjelaskan,

Di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu tentang 5 pokok keimanan (rukun iman), ilmu syariat (wudhu', shalat, puasa, haji, zakat, syarat-syaratnya dan hal-hal yang membatalkannya), ilmu tentang 5 perkara yang diharamkan oleh semua rasul, syariat, dan kitab samawi (termaktub dalam QS. Al A'raf: 33), dan ilmu tentang hukum-hukum muamalah.

Ilmu tentang hukum-hukum muamalah terkait tentang adab dan akhlak, pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, jihad, dan termasuk di dalamnya adalah ilmu yang berhubungan dengan harta (muamalah *maaliyyah*). Muamalah *maaliyyah* sangat erat kaitannya dengan kehidupan seorang manusia, mulai dari kegiatan jual beli, kepemilikan harta dalam keluarga, waris dan sebagainya.

Ilmu tentang fikih muamalah *maaliyyah* sangat penting bagi seorang hamba. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang dikutip Tarmizi (2014:3) “Barangsiapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih (muamalat), dia akan terjerumus dalam *riba*, dia akan terjerumus dan terjerumus”. Kemudian ditegaskan oleh Imam Malik *rahimahullah*, “Siapa saja yang tidak mempelajari hukum-hukum jual beli (muamalah), niscaya ia akan memakan *riba*, baik suka ataupun tidak”. Sedangkan *riba* merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar dalam syariat Islam.

Oleh karena itu, seseorang membutuhkan ilmu fikih muamalah *maaliyyah* sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu akuntansi syariah. Alasannya, obyek pembahasan dari kedua ilmu tersebut adalah masalah hubungan sesama manusia terkait harta. Sehingga ketika permasalahan tentang harta telah diatur dalam syariat Islam maka seorang manusia wajib untuk tunduk terhadap hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian seorang manusia juga harus mengetahui karakteristik dari transaksi syariah agar tidak terjerumus pada hal yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam.

2.7 Karakteristik Transaksi Syariah

Sebagaimana termaktub dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Syariah, DSAS (2009:3) mengatakan bahwa transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah. Paradigma ini mendasarkan bahwa aktivitas manusia harus diukur berdasarkan perangkat syariah dan akhlak sebagai penilaian baik atau buruk dan benar atau salah (DSAS, 2009:3). Lebih lanjut, DSAS (2009:5) menjelaskan bahwa transaksi syariah harus memenuhi beberapa karakteristik dan persyaratan, di antaranya:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida,
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik,
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas,
4. Tidak mengandung unsur riba,
5. Tidak mengandung unsur kezaliman,
6. Tidak mengandung *maysir*,
7. Tidak mengandung *gharar*,
8. Tidak mengandung haram,
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang,
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain,
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun penawaran (*najasy*), dan
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Beberapa poin yang memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan penelitian ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

2.7.1 Konsep Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. DSAS (2009:4) menjelaskan tentang konsep keadilan sebagai bentuk “menempatkan sesuatu hanya pada

tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai dengan posisinya”. Manifestasi dari prinsip keadilan ini terealisasi dalam bentuk pelarangan unsur riba, kedzoliman, *maysir*, *gharar*, dan haram (DSAS, 2009:4). Pembahasan dari bentuk-bentuk pelarangan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini akan dibahas lebih lanjut.

2.7.1.1 *Riba*

Riba secara bahasa berasal dari kata “ربا” dan “يربو” yang berarti tumbuh dan bertambah (Baits, 2016:2). Sedangkan secara istilah *riba* terbagi menjadi 2 makna. Pertama, *riba* dalam arti luas memiliki makna semua transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Ash-Shan’ani (2007:394) istilah *riba* digunakan untuk semua jual beli yang diharamkan. Kedua, *riba* dalam arti sempit memiliki beberapa definisi. Ibnu Abidin sebagaimana dikutip oleh Baits (2016:5) mengatakan *riba* adalah “kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersial antara harta dengan harta”.

At-Tuwaijiri (2012:26) menjelaskan *riba* adalah “tambahan dalam penjualan 2 barang yang berlaku *riba* pada keduanya”. Selanjutnya, Tarmidzi (2014:335) mengatakan bahwa secara istilah *riba* berarti,

Menambahkan beban kepada pihak yang berhutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, *sya’ir*, kurma, dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa *riba* adalah suatu tambahan yang disyaratkan untuk diberikan pada transaksi utang-piutang atau adanya tambahan atas barang ribawi yang sejenis dan adanya tambahan atas penundaan

waktu transaksi utang-piutang. Sehingga dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa riba memiliki beberapa jenis.

2.7.1.1.1. Jenis-Jenis *Riba*

Riba memiliki beberapa jenis. Para ulama membaginya menjadi 2 jenis, yaitu *riba dayn* dan *riba ba'i*.

1. *Riba dayn*

Riba dayn merupakan salah satu jenis riba yang dilakukan oleh bangsa Arab *jahiliyah* dahulu. Riba jenis inilah yang disebut juga sebagai *Riba Jahiliyah*. Baits (2016:62) mengatakan bahwa “Itulah riba yang bentuknya penambahan dalam transaksi utang-piutang”.

Lebih lanjut, Tarmizi (2014:351) memberikan perincian atas bentuk dari *riba dayn* yaitu:

Pemberi utang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, “Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula”.

2. *Riba ba'i*

Tarmizi (2014:488) mengatakan bahwa *riba ba'i* yaitu riba yang obyeknya adalah akad jual beli. Baits (2016:65) menjelaskan *riba ba'i* memiliki 2 bentuk, yaitu *riba fadhl* dan *riba nasiah*.

2.1. *Riba Fadhl*

Baits (2016:76) mengatakan *riba fadhl* berarti riba karena kelebihan yang diberikan ketika tukar menukar benda ribawi sejenis. Sebagaimana pernyataan Baits, Tarmizi (2014:488) juga menjelaskan bahwa *riba fadhl* yaitu “menukar

salah satu dari 6 jenis harta riba (emas, perak, kurma, gandum, gandum jenis murah dan garam) dengan yang sejenis dan ukuran berbeda”.

2.2. *Riba Nasi'ah*

Tarmizi (2014:489) menjelaskan bahwa *riba nasiah* berarti menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi *illat*²nya sama dengan cara tidak tunai. Baits (2016:69) mengatakan bahwa berdasarkan 6 jenis harta ribawi para ulama membagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kesamaan *illah*nya. Kelompok 1: emas dan perak. Hal ini diqiyas³kan dengan kelompok mata uang atau alat tukar seperti uang kartal di zaman ini. Kelompok 2: gandum kering, gandum basah, kurma dan garam. Diqiyaskan dengan kelompok bahan makanan yang dapat disimpan seperti beras atau jagung.

2.7.1.2 *Gharar*

DSAS (2009:4) menjelaskan bahwa di antara unsur yang dilarang dalam prinsip muamalah adalah adanya *gharar*. “*Gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad” (DSAS, 2009:4). Tarmizi (2014:209) mengatakan “*gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan”. Tarmidzi melanjutkan (2014:209) menurut istilah *gharar* berarti “jual beli yang tidak jelas kesudahannya”. Sebagaimana ditegaskan oleh Taimiyah

² Baits (2016, 69) mengatakan *Illah* secara bahasa memiliki 2 makna,

Pertama, sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan.

Kedua, karena keberadaannya hukum berulang dengan berulangnya *illah*, yang menyebabkan para mujtahid (ulama yang mengambil pendapat) berulang dalam menyimpulkan hukum.

Secara istilah *illah* berarti “sesuatu (al-makna), dimana syariat mengaitkan adanya hukum dengannya.

³ Qiyas adalah sebuah metode dalam perumusan suatu masalah dalam islam, dimana ulama mencoba untuk mempersamakan/mengumpamakan suatu hal dengan hal yang lain.

(2004:22) bahwa “*gharar* maknanya adalah tidak diketahui hasilnya”. Sehingga *gharar* merupakan suatu akad yang mengandung ketidakjelasan yang menyebabkan hasil akhir dari akad tersebut menjadi samar yaitu antara ada dan tidak ada.

Permasalahan *gharar* ini telah disebutkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu’anh, dia berkata, “Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wa Sallam* melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (spekulasi)⁴”. Sebagaimana perkataan Ash-Shan’ani (2007:340), Tarmizi (2014:209) menjelaskan makna *gharar* sebagai “bentuk spekulasi yang memiliki konsekuensi adanya ketidakrelaan yang terjadi apabila transaksi yang dilakukan benar-benar terjadi”.

Tidak semua hal yang *gharar* atau tidak jelas menyebabkan akad menjadi batal. Tarmizi (2014:214-216) menyebutkan *gharar* menjadi haram apabila terpenuhi salah satu dari kriteria berikut,

- 1) nisbah *gharar* dalam akad sangat besar, 2) keberadaan *gharar* dalam akad menjadi dasar transaksi, 3) akad yang mengandung *gharar* tidak termasuk akad yang dibutuhkan banyak orang, dan 4) *gharar* terjadi pada akad jual beli.

Qayyim (2000:433) menegaskan tidak semua *gharar* masuk ke dalam larangan. Akan tetapi, apabila *gharar* yang terjadi nilainya kecil dan dapat ditolerir untuk kemaslahatan umum maka yang demikian itu tidak termasuk *gharar* yang menimbulkan larangan.

2.7.1.2.1. Ruang Lingkup *Gharar*

Tarmizi (2014:222) mengatakan bahwa *gharar* (ketidakjelasan) dalam suatu transaksi dapat terjadi pada akad, objek akad, dan waktu pelunasan kewajiban.

⁴ Hadits shahih riwayat Muslim

2.7.1.2.1.1. *Gharar* dalam Akad

Gharar dalam akad terjadi ketika tidak terdapat kejelasan akad mana yang disepakati dalam sebuah transaksi. Misalkan, adanya 2 akad dalam 1 jual beli.

Ilustrasi: Ada 2 orang yang sedang melakukan jual beli. Pihak penjual mengatakan, "Saya jual laptop ini dengan harga 4 juta rupiah jika tunai, namun apabila kredit selama 1 tahun harganya 5 juta rupiah". Pihak pembeli tanpa menyepakati akad mana yang dipilih (apakah tunai atau kredit) untuk membeli laptop tersebut kemudian berkata, "Saya beli laptop tersebut".

Bentuk akad seperti ini adalah *gharar* karena pembeli tidak menyepakati akad mana yang digunakan dalam transaksi jual beli laptop tersebut (apakah tunai atau kredit). Sehingga konsekuensi dari transaksi yang dilakukan menjadi samar dan ketidakjelasan yang terjadi menjadi besar.

2.7.1.2.1.2. *Gharar* dalam Objek Akad

Gharar dalam objek akad terjadi pada barang dan harga. Tarmizi (2014:223-225) menjelaskan *gharar* dalam objek akad (barang dan harga) disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

- a. Fisik barang tidak jelas

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi. Penjual berkata, "Saya jual barang yang ada di dalam kardus ini dengan harga Rp500.000 kepadamu". Sedangkan pembeli tidak mengetahui sama sekali barang apa yang terdapat di dalam kardus tersebut.

- b. Sifat barang tidak jelas

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi sebuah *handphone*. Penjual berkata, "Saya jual satu unit *handphone* dengan harga 7 juta rupiah". Sedangkan

pembeli belum pernah melihat dan tidak mengetahui ciri-ciri dari *handphone* yang akan dijual tersebut.

c. Ukuran barang tidak jelas

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi sebidang tanah. Penjual berkata, "Saya jual sebagian dari tanah ini kepadamu dengan harga 25 juta rupiah". Sedangkan pembeli tidak mengetahui dengan jelas seberapa luas tanah yang akan dijual tersebut.

d. Barang bukan milik penjual

Ilustrasi: Terdapat seorang calo rumah yang melihat ada rumah yang akan dijual. Kemudian tanpa mendapat izin dari pemilik rumah calo tersebut menawarkan rumah tadi kepada orang lain dan terjadi transaksi. Hal ini tidak diperbolehkan secara syariat karena calo tidak memiliki rumah yang akan dijual ataupun mendapat izin dari pemilik rumah untuk menjual rumah tersebut.

e. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi. Pihak A telah membeli sebuah busur panah dari supplier. Kemudian A menjual busur panah tersebut kepada B dan menerima uang dari B sedangkan A belum menerima busur panah tersebut dari supplier. Kemudian A meminta supplier untuk menyerahkan langsung busur panah tersebut kepada B.

f. Barang tidak dapat diserahkan-terimakan

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi. Pihak penjual memiliki sebuah barang di luar negeri dan dia menjual barang tersebut kepada pembeli sedangkan mereka di Indonesia. Transaksi model seperti ini mengandung unsur

gharar karena terdapat kemungkinan barang yang ditransaksikan tidak diperkenankan untuk masuk ke Indonesia.

g. *Gharar* dalam harga disebabkan penjual tidak menentukan harga

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi. Pihak penjual berkata, "Saya jual sepeda motor ini kepadamu dengan harga terserah engkau". Kemudian mereka berpisah tanpa menyepakati harga sepeda motor yang akan ditransaksikan. Transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan harga sepeda motor yang akan ditransaksikan, dimana hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi ketidakadilan pada salah satu pihak. Penjual dapat mengalami kerugian atau pembeli yang mengalami kerugian karena membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang jauh melampaui harga sebenarnya.

2.7.1.2.1.3. *Gharar* dalam Waktu Pelunasan Kewajiban

Ilustrasi: Terdapat orang yang akan bertransaksi. Pihak penjual berkata, "Saya jual *handphone* ini dengan harga 3 juta rupiah kepadamu dan engkau dapat membayar kapanpun engkau mau". Bentuk transaksi seperti di atas mengandung unsur *gharar* yang besar karena tidak jelas kapan pembeli akan membayar *handphone* yang dia beli. Sehingga hal tersebut akan merugikan pihak penjual.

2.7.1.3 *Al Hilah* (Siasat)

Qayyim sebagaimana dikutip oleh Qardhawi (2014:54) menerangkan bahwa "siasat yang diharamkan itu berkisar pada penamaan sesuatu bukan dengan namanya, dan pengubahan bentuknya sambil menetapkan hakikatnya". Sehingga ia mengganti dengan nama yang lain kemudian menetapkan substansinya dan

mengubah bentuk bersamaan dengan penetapan hakikatnya. Qayyim (2000:596) menjelaskan siasat berasal dari turunan kata “*tahawwala*” yang berarti ragam dan keadaan. Qayyim (2000:596) menambahkan “kata ini menunjukkan arti dari sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perpindahan dari keadaan satu ke keadaan yang lain”.

Qayyim (2005:338) membagi siasat menjadi 2 macam,

Pertama, jenis siasat yang ia digunakan sebagai sarana untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang-Nya, membebaskan diri dari yang haram, memperjuangkan kebenaran atas orang zalim yang melarangnya, serta membebaskan orang yang dizalimi dari tangan orang yang zalim dan aniaya. Siasat jenis ini adalah siasat yang pelaku dan yang mengajarkannya diganjar dengan pahala. Kedua, jenis siasat untuk meninggalkan kewajiban, menghalalkan yang haram, memutarbalikkan orang yang dizalimi sebagai orang zalim, orang yang zalim sebagai orang yang dizalimi, yang benar sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai kebenaran. Tercelanya jenis siasat ini disepakati oleh para salaf, dan mereka menyerukan para pelakunya di segenap penjuru bumi agar meninggalkannya.

Sehingga siasat yang terlarang dalam syariat adalah siasat yang digunakan untuk melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah baik itu perintah maupun larangan Allah Subhanallahu Wa Ta’ala.

Kemudian Qayyim (2000:510) melanjutkan,

Perlu diketahui bahwa riba itu diharamkan karena hakikat dan mafsadatnya bukan karena bentuk dan namanya. Maka ketahuilah, bahwasanya orang yang mensiasati riba tersebut tentu tidak akan menamainya dengan sebutan riba, akan tetapi dia akan menamainya dengan sebutan jual beli meskipun hakikat aslinya adalah riba.

Oleh karena itu, siasat merupakan upaya untuk merubah bentuk perkara bersamaan dengan menetapkan hakikat perkara tersebut. Sehingga dari upaya perubahan tersebut menjadikan hakikat suatu perkara menjadi samar.

2.7.1.4 Menutup Sarana Keburukan (*Sadd Adz Dzarii'ah*)

Qayyim (2000:553) menjelaskan definisi “*sadd adz-dzarii'ah* adalah menghalangi suatu perbuatan yang berakibat hukum yang tidak mengandung *maslahat* (kebaikan), atau sesuatu perkara yang jelas mengandung *mafsadat* (keburukan)”. *Sadd adz dzarii'ah* merupakan kebalikan dari *siasat*. *Siasat* merupakan segala sesuatu yang mengantarkan menuju keharaman sedangkan prinsip *sadd adz dzarii'ah* adalah sarana untuk mencegahnya.

Oleh karena itu, Allah melarang mencaci sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Sebab, apabila sesembahan orang-orang kafir dicela maka mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran, “Dan janganlah kamu memaki ilah-ilah yang mereka ibadahi selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan...” [QS. Al An'am: 108]. Perintah inilah yang menjadi penghalang dari perkara yang nantinya mengandung keburukan (*mafsadat*).

Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* melarang untuk seorang laki-laki berduaan, bepergian, bersentuhan, dan melihat perempuan non-mahram tanpa adanya kebutuhan yang dibenarkan syariat⁵. Hal ini dilakukan untuk memutus sebab dan menutup jalan menuju keburukan. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* juga melarang umatnya untuk shalat ketika matahari terbit dan terbenam. Karena orang-orang kafir pada saat itu sedang menyembah matahari. Sebagaimana diterangkan oleh Abu Hurairah bahwasanya, “Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* melarang shalat sesudah shalat Asar hingga matahari

⁵ Hadits-hadits mengenai masalah ini sangat *mashur* dan memiliki tingkatan shahih.

terbenam, dan sesudah shalat Subuh hingga matahari terbit”⁶ [HR. Muslim]. Selanjutnya ditegaskan dalam hadits lain dari Amru bin ‘Abasah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu’alaihi wa sallam* bersabda “...Dan apabila matahari telah terbit, maka janganlah kamu shalat hingga matahari meninggi, karena matahari terbit diantara dua tanduk syetan, dan shalat pada waktu itu adalah shalatnya orang-orang kafir...”⁷ [HR. Muslim].

Sehingga kaidah *sadd adz dzarii’ah* menjadi kaidah yang penting untuk menghalangi perkara yang memungkinkan terjadinya unsur keburukan di dalamnya berupa pelanggaran syariat Islam. Meskipun terdapat kemungkinan perkara tersebut adalah mubah secara hukum.

2.7.1.5 Substansi mengungguli bentuk (*Al Ibrah bi Al Maqashid wa Al Musammayyat La bi Al Alfazh wa At Tasmiyat*)

Haydar sebagaimana dikutip oleh Qardhawi (2014:39) mengatakan bahwa saat transaksi berlangsung yang menjadi patokan bukanlah kata-kata yang digunakan oleh pelaku transaksi. Akan tetapi, maksud sebenarnya dari pelaku transaksi atau pengertian dari apa yang diucapkan bukan redaksi yang digunakan. Qardhawi (2014:37) mengatakan bahwa kaidah kedua dari 7 kaidah utama fikih muamalat adalah *Al Ibrah bi Al Maqashid wa Al Musammayyat La bi Al Alfazh wa At Tasmiyat* (yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya).

Qayyim (2000:510) mengatakan:

Perlu diketahui bahwa *riba* itu diharamkan karena hakikat dan mafsadatnya bukan karena bentuk dan namanya. Maka ketahuilah, bahwasanya orang yang mensiasati *riba* tersebut tentu tidak akan

⁶ HR. Muslim nomor 1366

⁷ HR. Muslim nomor 1374, hadits ini sengaja peneliti potong dan diambil yang relevan dengan pembahasan karena hadits tersebut sangat panjang.

menamainya dengan sebutan *riba*, akan tetapi dia akan menamainya dengan sebutan jual beli meskipun hakikat aslinya adalah *riba*.

Dahulu kaum yahudi pernah menyiasati apa yang telah Allah haramkan atas mereka berupa lemak bangkai. Hadits Ibnu Abbas yang dishahihkan oleh Abu Daud, Hakim dan yang lainnya sebagaimana dikutip oleh Qayyim (2000:505) menjelaskan bahwa,

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka memakan lemak, tetapi mereka mensiasatinya dengan cara menjualnya dan memakan harganya. Padahal jika Allah mengharamkan memakan sesuatu kepada suatu kaum, maka mengharamkan pula harga jualnya.

Lebih lanjut, Jabir bin Abdillah, *radhiyallahu'anhuma*, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda pada tahun *Fathul Makkah*,

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan berhala”. Kemudian dikatakan kepada Beliau *Shallallahu'alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu mengenai lemak bangkai? Bukankah dapat digunakan untuk meminyaki perahu, menyamak kulit, dan minyak penerangan bagi manusia?” Beliau menjawab, “Tidak, itu haram.” Kemudian Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda, “Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi! Sesungguhnya Allah pada saat mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya dan memakan harganya”. [HR. Bukhari dan Muslim]

Oleh karena itu, Al Khataby sebagaimana dikutip oleh Qayyim (2000:505) mengatakan “sebenarnya hukum itu tidak dapat berubah karena berubah bentuk dan diganti namanya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar penentuan hukum adalah substansi dari suatu perkara, bukan bentuk maupun nama dari perkara tersebut. Sehingga unsur ini menjadi salah satu dasar yang penting untuk meneliti substansial praktik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah diberlakukan di Indonesia saat ini.

2.8 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN. Berdasarkan UU RI nomor 9 Pasal 1 ayat (1) Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2.8.1 Jenis-Jenis SBSN Berdasarkan Akad yang Digunakan

Berdasarkan UU RI Nomor 9 tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara menggunakan beberapa bentuk akad, yaitu: SBSN *Ijarah*, SBSN *Mudharabah*, SBSN *Musyarakah*, SBSN *Istishna'*, dan SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta SBSN yang dikombinasikan dengan menggunakan dua atau lebih akad. Dewan Syariah Nasional menegaskan dalam Fatwa DSN Nomor 69 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara bahwa akad yang digunakan dalam SBSN yaitu *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Badri (2012:26) mengatakan berdasarkan strukturnya saat ini *Sukuk* memiliki 6 jenis, yaitu *sukuk murabahah*, *sukuk mudharabah*, *sukuk musyarakah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*.

2.8.2 Struktur Akad dalam Penerbitan SBSN

2.8.2.1 SBSN *Ijarah*

SBSN *Ijarah* diterbitkan dengan prinsip dasar akad *ijarah*. Akad *ijarah* yaitu akad yang dilakukan oleh 2 pihak, pihak pertama bertindak sendiri atau mewakilkan kepada pihak lain untuk menyewakan hak atas suatu aset kepada

pihak kedua berdasarkan harga dan waktu sewa yang disepakati bersama (DPS, 2010:31). Sedangkan definisi yang diberikan oleh PSAK 107, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*'ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (DSAK, 2009).

2.8.2.2 SBSN *Wakalah*

SBSN *wakalah* diterbitkan dengan prinsip dasar akad *wakalah*. Akad *wakalah* yaitu akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu (DPS, 2010:14). Surat Berharga Syariah Negara *Wakalah* (SBSN *Wakalah*) adalah SBSN *wakalah bit istitsmar*; yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN selaku wakil dari penebag SBSN (DSN, 2014).

2.8.3 Jenis Risiko Berinvestasi pada SBSN

Investasi pada suatu instrumen investasi pasti memiliki risiko tertentu. Sebagaimana instrumen lain, investasi pada SBSN juga memiliki risiko. Di antara risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Gagal Bayar

Risiko gagal bayar yaitu risiko tidak terpenuhinya pembayaran imbalan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo (DPS, 2013:12).

2. Risiko Pasar

Risiko pasar yaitu risiko terjadinya *capital loss* akibat harga jual di pasar sekunder lebih rendah dari harga beli (DPS, 2013:12).

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas yaitu risiko terjadinya kendala untuk menjual di pasar sekunder (DPS, 2013:12).

2.8.4 Metode Penerbitan SBSN

Proses penerbitan SBSN memiliki beberapa metode. Metode-metode tersebut antara lain:

1. Bookbuilding

“Bookbuilding adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*” (DPS, 2010:11).

2. Lelang

Metode lelang adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang (DPS, 2010:11).

3. Private Placement

Berdasarkan PMK No. 75 tahun 2009 tentang kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri, *Private placement* adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (*terms & conditions*) SBSN sesuai kesepakatan (DPS, 2010:12).

2.8.5 Underlying Asset

Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam penerbitan *sukuk* (DPS, 2013:9). Penerbitan SBSN menggunakan beberapa jenis *underlying asset*, yaitu: 1) Barang Milik Negara, 2) Proyek kegiatan APBN, dan 3) Kegiatan jasa layanan haji. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing *underlying asset*.

1) Barang Milik Negara (BMN)

UU nomor 19 tahun 2009 tentang SBSN Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa Barang Milik Negara adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Barang Milik Negara (BMN) dapat berupa: 1) Tanah, 2) Bangunan dan 3) BMN lainnya yang dibeli menggunakan dana APBN (DPS, 2013:9).

2) Proyek Kegiatan APBN

Proyek kegiatan APBN merupakan semua proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dialokasikan dengan menggunakan dana APBN. Proyek kegiatan APBN yang dibiayai dengan SBSN dapat berupa: 1) proyek infrastruktur, 2) pengadaan barang, dan 3) jasa (DPS, 2013:9).

Selanjutnya, Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan definisi mengenai Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa adalah “Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

3) Kegiatan Jasa Layanan Haji

UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji memberikan definisi mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Pasal 1 ayat 2, penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Sehingga kegiatan jasa layanan haji adalah suatu kegiatan yang didanai oleh pemerintah

untuk penyelenggaraan rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji. Adapun ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya (Pasal 1 ayat 1). Selanjutnya, pasal 6 UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. “Kegiatan jasa layanan haji dibiayai dengan SBSN meliputi beberapa aspek, di antaranya: 1) transportasi darat dan udara, 2) akomodasi, dan 3) logistik” (DPS, 2013:9).

Pasal 1 ayat 13 UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjelaskan bahwa transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelaksanaan transportasi yang dimaksud adalah pelayanan transportasi jemaah haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia baik melalui jalur udara maupun jalur darat (Pasal 33 ayat 1).

Selanjutnya, Pasal 1 ayat 12 UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjelaskan bahwa akomodasi adalah perumahan atau pemonudukan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau di debarkasi dan di Arab Saudi. Akomodasi tersebut harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan jamaah haji beserta barang bawaannya (Pasal 37 ayat 2). Adapun

logistik adalah pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan (untuk mengganti) perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan (KBBI *online*, 2016).

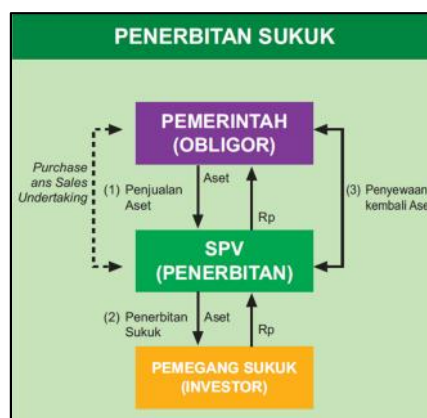
2.8.6 Mekanisme Penerbitan SBSN

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menggunakan mekanisme tertentu yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Guna memahami lebih lanjut lihat Gambar 2.1.

(DPS, 2013) menjelaskan bahwa, secara umum mekanisme yang terjadi pada penerbitan SBSN dengan akad *sale and lease back* adalah sebagai berikut:

1. SPV dan Obligor melakukan transaksi jual-beli aset, bersamaan dengan melakukan perjanjian *Purchase & Sale Undertaking* dimana pemerintah menjamin untuk membeli kembali aset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset kepada pemerintah pada saat SBSN telah jatuh tempo atau dalam hal terjadi *default*.
2. SPV menerbitkan SBSN untuk membiayai pembelian aset.
3. Pemerintah menyewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa (*ijarah agreement*) dengan SPV untuk periode yang sama dengan masa jatuh tempo SBSN yang diterbitkan.
4. Berdasarkan servicing agreement pemerintah ditunjuk sebagai agen untuk bertanggung jawab atas perawatan aset .

Gambar 2.1
Mekanisme Penerbitan SBSN Akad *Sale and Lease Back*



Sumber: DPS, 2013.

2.8.7. *Special Purpose Vehicle* (SPV)

DPS (2010:17) menjelaskan bahwa, “*Special Purpose Vehicle* (SPV) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk memfasilitasi penerbitan *sukuk*”. SPV bukanlah suatu produk atau konsep syariah namun SPV memiliki fungsi sebagai intermediator antara pemerintah dan investor (DPS, 2010:18). Hal ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan dapat diadopsi dalam transaksi berbasis syariah. SPV memiliki beberapa fungsi yang melekat dalam penerbitan SBSN. DPS (2010:19) menjelaskan bahwa fungsi SPV adalah:

1. Sebagai penerbit *sukuk*.
2. Melakukan transaksi / perikatan dengan *obligor* untuk kepentingan investor.
3. Berfungsi sebagai *trustee* (*principle trustee*)/wali amanat untuk kepentingan investor;
4. Dapat menunjuk pihak lain sebagai *co-trustee* untuk membantu melaksanakan tugas-tugas SPV sebagai *trustee*.

2.9 Fatwa-Fatwa

Secara umum lembaga-lembaga fatwa di dunia telah membahas mengenai permasalahan tentang kebolehan *sukuk* negara. Lembaga fatwa negara Indonesia telah mengeluarkan 10 fatwa yang berhubungan dengan obligasi syariah atau *sukuk* negara. Fatwa-fatwa tersebut disajikan dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Fatwa-fatwa DSN MUI terkait obligasi syariah dan *sukuk* negara

No.	Fatwa DSN	Tentang
Obligasi Syariah		
1	Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah
2	Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah Mudharabah
3	Nomor 41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah Ijarah
4	Nomor 59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)		
5	Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara
6	Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

7	Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008	<i>Sale and Lease Back</i>
8	Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijarah Sale and Lease Back</i>
9	Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010	<i>SBSN Ijarah Asset To Be Leased</i>
10	Nomor 94/DSN-MUI/IV/2014	Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
11	Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) <i>Wakalah</i>

Berdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut, negara diperbolehkan untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara. Sebagaimana UU RI Nomor 9 Pasal 1 ayat 1, DSN MUI memberikan definisi yang sama. SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (DSN).

Selanjutnya *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* sebagaimana dikutip oleh Badri (2012:26), pada tahun 2009 mengeluarkan fatwa No. 178 (19/4) yang menegaskan bahwa penerbitan dan perdagangan *sukuk* adalah halal. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), sebuah organisasi internasional yang fokus terhadap akuntansi keuangan untuk perbankan dan institusi keuangan Islam, juga menerbitkan standar syariah terkait dengan investasi *sukuk*. Tahun 2003, AAOIFI mengeluarkan standar syariah nomor 17 tentang investasi *sukuk*. AAOIFI menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menerbitkan sertifikat investasi dengan berbagai cara kontrak investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (AAOIFI, 2010:310-317).

2.10 Riset Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

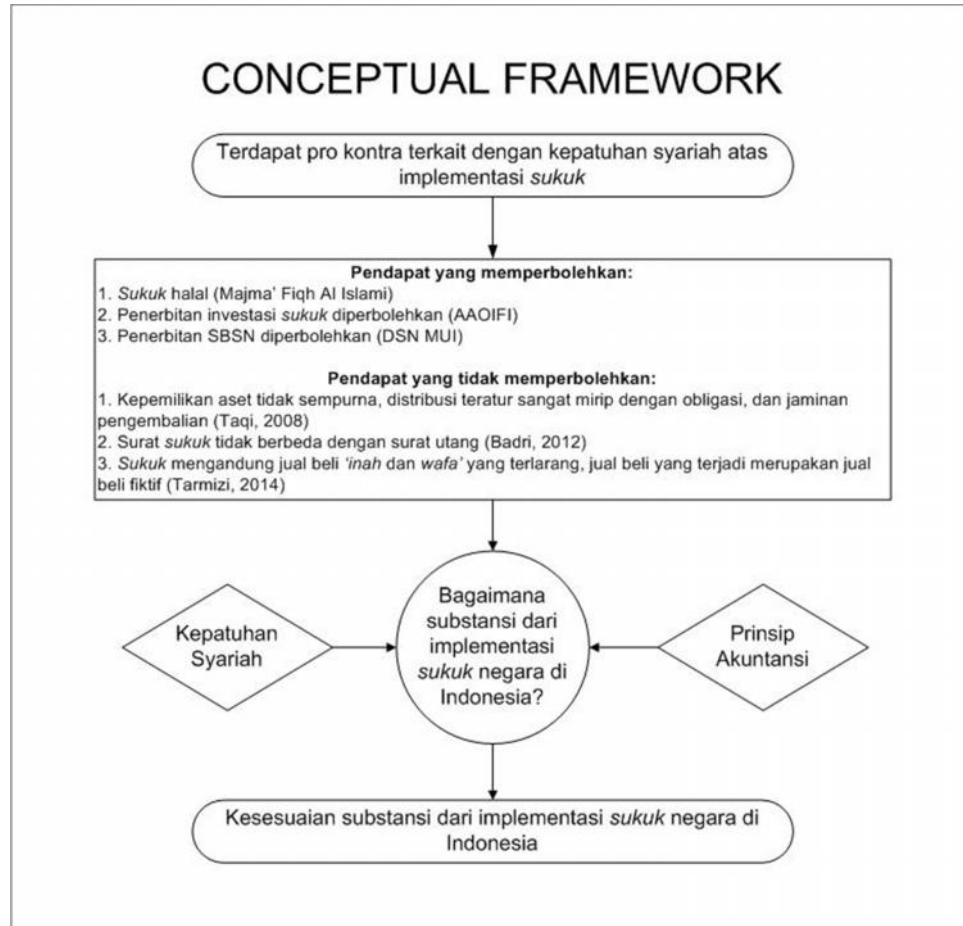
Penelitian Terdahulu						
No.	Judul	Nama Peneliti	Tipe Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil
1	<i>Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities</i>	Wilson (2008)	Kualitatif	Untuk menyajikan sebuah analisis struktur sukuk yang berbeda dari perspektif keuangan.	Deskriptif	Entitas bertujuan khusus (spv) merupakan sebuah syarat kesuksesan penerbitan dan manajemen sukuk.
2	<i>Form versus substance: AAOIFI projects and Islamic fundamentals in the case of sukuk</i>	Maurer (2010)	Aspek Operasional Sukuk, Kualitatif	Untuk menyelidiki peran badan penetapan standar dan lembaga pemeringkat yang bersaing untuk otoritas di bidang keuangan Islam.	Deskriptif	Sementara perdebatan sukuk bergantung pada apakah struktur yang syariah compliant dalam bentuk saja, tidak dalam substansi.
3	<i>Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds?</i>	Ariff and Safari (2012)	Kuantitatif	Apakah yield sukuk dengan obligasi konvensional memberikan imbal yang sama? Kemudian melakukan tes untuk melihat apakah ada hubungan kausal antara keduanya.	<i>Basic Statistical Test</i> dan <i>Granger Causality Test</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan pada yield obligasi dengan imbal hasil sukuk dan tidak ada hubungan sebab akibat di antara keduanya.

Penelitian Terdahulu						
No.	Judul	Nama Peneliti	Tipe Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil
4	<i>The effects of new AAOIFI standards on Sukuk in choosing the most authentic Islamic principles</i>	Naim, Isa and Hamid (2013)	Kualitatif	Untuk menganalisis standar baru pada Sukuk yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI).	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>content analysis</i> untuk menganalisis pernyataan dan sampel.	Tidak banyak berpengaruh terhadap keyakinan pakar syariah dalam pemilihan hukum islam yang paling otentik.
5	<i>Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible ?</i>	Afshar (2013)	Kualitatif	Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dasar bagi mereka yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki gambaran terhadap keuangan Islam dan fungsinya di pasar keuangan global saat ini.	Deskriptif	Kedua instrumen tersebut berhasil menyelesaikan masalah finansial yang sama yaitu peningkatan modal. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya yang terletak pada konsep yang mendasarinya.

Penelitian Terdahulu						
No.	Judul	Nama Peneliti	Tipe Penelitian	Tujuan	Metodologi	Hasil
6	<i>A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk</i>	Zulkhibri (2015)	Kualitatif	Untuk memberikan tinjauan kritis dari literatur teoritis dan empiris pada sukuk (obligasi syariah) dari tiga perspektif: teori yang mendasari dan sifat mereka, masalah operasional dan struktur yang terlibat dalam sukuk, dan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi.	Deskriptif	Pasar sukuk tumbuh dengan cepat tetapi masih terdapat gap yang signifikan. Kemudian jika dibandingkan dengan obligasi, literatur sukuk masih relatif sedikit. Serta penelitian baru harus menyediakan kerangka teoritis baru pada sukuk.

2.11 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Sumber: Olahan Penulis, 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jika kita benar-benar mengimani bahwa Allah itu adalah Rabb (Tuhan Pencipta, Pemilik, dan Pengatur alam semesta), seharusnya kita tidak perlu menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.
[Al Maqrizi]

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (2005:3) menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya”. Seniawan (2010:106) juga menjelaskan bahwa,

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa.

Penelitian ini mencoba memahami dan menafsirkan praktik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia dari sisi substansialnya.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. “Penelitian deskriptif sering didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik dari orang, kejadian, atau situasi” (Sekaran, 2013:97). Sekaran (2013:97) menambahkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan. Sedangkan Gulo (2010:19) mengatakan bahwa “temuan-temuan dalam penelitian deskriptif lebih luas dan lebih terperinci dari penelitian eksploratoris”. Dalam

penelitian ini, peneliti menjelaskan mengenai substansi kesesuaian syariah dan perlakuan prinsip akuntansi berlaku umum dari praktik SBSN di Indonesia.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari seseorang, selain dari peneliti, ketika melaksanakan sebuah penelitian” (Sekaran, 2013:116). Sekaran (2013:116) menambahkan bahwa “terdapat beberapa sumber dari data sekunder, termasuk di dalamnya buku dan majalah, publikasi pemerintah tentang indikator ekonomi, data sensus, ringkasan statistik, *database*, media, laporan tahunan perusahaan dan lain-lain”. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah buku, majalah, ringkasan statistik, publikasi pemerintah tentang penawaran Surat Berharga Syariah Negara, dan *website* resmi pemerintah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Juliandi *et al.* (2014:70) mengartikan studi literatur sebagai proses penyelidikan rekaman-rekaman data yang telah berlalu. Selanjutnya, Juliandi *et al.* (2014:70) mengatakan bahwa terdapat 2 bentuk pengumpulan dokumentasi, yaitu dokumen tertulis (*printed*) dan dokumen elektronis (*nonprinted*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis dokumen tersebut. Dokumen tertulis dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan majalah. Sedangkan dokumen elektronis berasal dari *website* resmi kementerian keuangan, perbankan, dan artikel ilmiah.

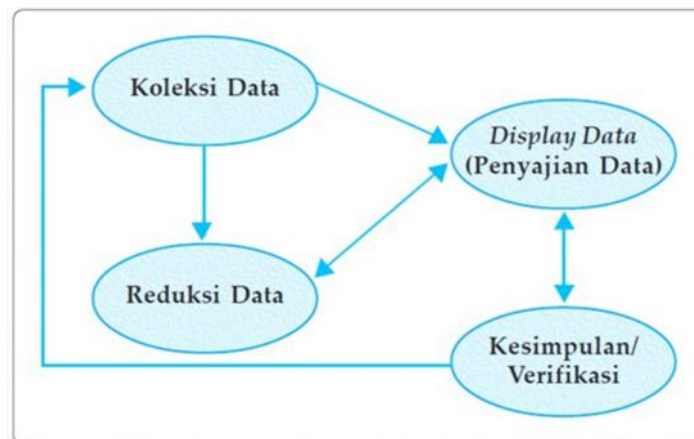
3.5 Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2014:248):

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Cresswell (2014:274) mengartikan analisis data sebagai proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Penelitian ini merujuk kepada teknik analisis yang digunakan Miles & Huberman (1994). Teknik analisis ini memiliki beberapa langkah, (1) tahap reduksi data, (2) tahap penyajian/analisis data, dan (3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data – Miles Huberman



Sumber: Sugiyono, 2008.

Teknik tersebut dimulai dengan mengumpulkan semua data dari berbagai sumber dan selanjutnya data direduksi⁸. Kemudian data tersebut disajikan

⁸ Dipilah berdasarkan hal yang serupa

berdasarkan kelompok atau kategori yang serupa⁹. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

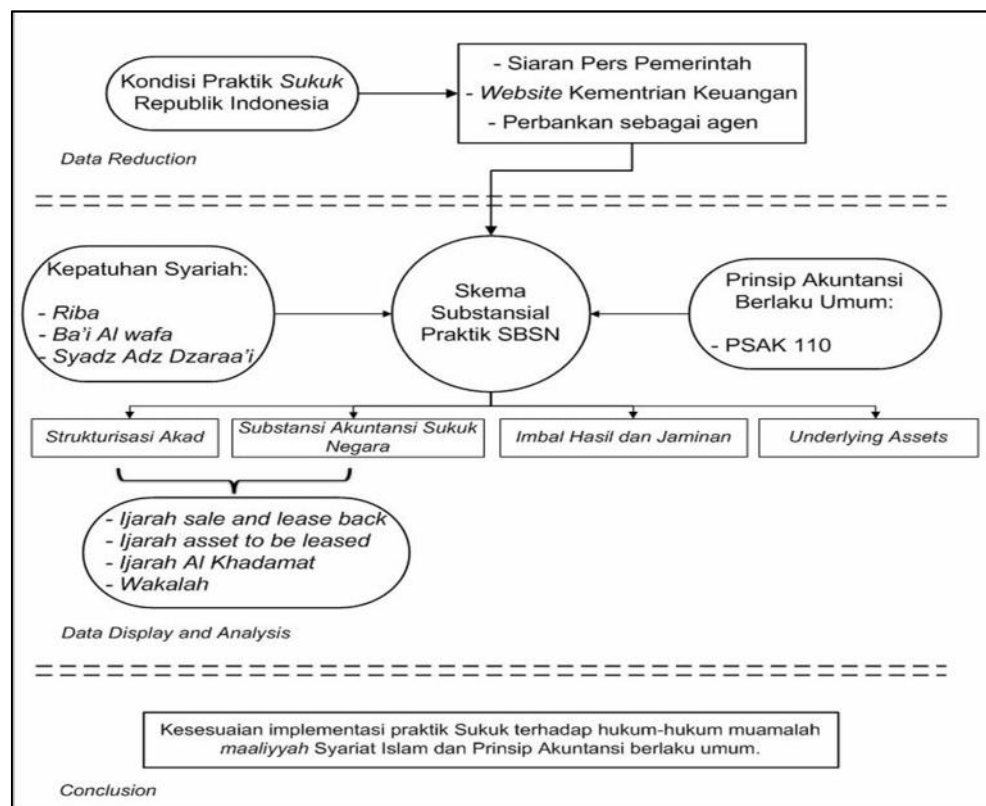
Pada tahap reduksi data, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang kondisi praktik *sukuk* atau SBSN yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Data tersebut diambil dari siaran pers resmi pemerintah, data perbankan selaku agen pemerintah, prospektus resmi dari pemerintah, dan *website* kementerian keuangan. Proses selanjutnya adalah interpretasi data. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pola atau skema yang serupa. Sehingga semua potret dari praktik *sukuk* atau SBSN dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola atau skema dengan jelas.

Pada tahap penyajian data, pola atau skema yang telah dikelompokkan kemudian disajikan ke dalam beberapa bentuk gambar pola atau skema. Sehingga dari skema tersebut diharapkan dapat mencerminkan kondisi riil dari substansial praktik *sukuk* atau SBSN di Indonesia. Pada tahap ini peneliti juga akan membahas bagaimana substansial praktik *sukuk* atau SBSN apabila dihadapkan dengan aspek kepatuhan syariah dan standar akuntansi berlaku umum.

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah proses penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti membuat sebuah kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Apabila dalam analisis tersebut dikuatkan dengan data-data yang valid maka hasil dari kesimpulan peneliti akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan dan kredibel. Teknik analisis data penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 3.2 berikut ini.

⁹ Dipetakan ke dalam sebuah matriks

Gambar 3.2
Teknik Analisis Data



Sumber: Olahan penulis, 2016.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SBSN DI INDONESIA

“Mencari yang halal dan menafkahi anak keturunan merupakan urusan yang besar yang tidak dapat diukur dengan sesuatu dari amal-amal kebaikan”
[Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah]

4.1. Gambaran Riil Praktik Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Tahun 2008, pemerintah RI menetapkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi dunia praktik untuk melakukan kegiatan jual-beli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Latar belakang diterbitkannya undang-undang tersebut adalah sebagai reaksi atas semakin meningkatnya industri keuangan syariah, dimana antara tahun 2000 – 2007 industri keuangan syariah telah meningkat sebesar 6,5 kali (Djaelani, 2013). Oleh karena itu, pemerintah melihat potensi besar dari industri keuangan syariah dan mengeluarkan undang-undang tersebut sebagai pedoman dunia praktik untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Secara umum, *Sukuk* memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Berdasarkan fatwa DSN MUI akad yang digunakan dalam *sukuk*, antara lain: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Murabahah*, dan akad lain yang sesuai syariah. Pada praktiknya, *sukuk* yang dikeluarkan oleh pemerintah disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pemerintah mengeluarkan berbagai jenis SBSN, dimana setiap jenis tersebut memiliki ciri khas tersendiri.

Sejak diberlakukannya Undang – Undang RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah telah menerbitkan 7 jenis SBSN. Beberapa di antara jenis SBSN tersebut, antara lain: *Sukuk Ritel (SR)*, *Project Based Sukuk (PBS)*, *Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, *Sukuk Nasional Indonesia (SNI)*, *Islamic Fixed Rate (IFR)*, Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), dan *Sukuk Tabungan (ST)*. Secara detail masing – masing jenis SBSN akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

4.1.1 Praktik SBSN Seri *Sukuk Ritel (SR)*

Sukuk Ritel (SR) merupakan *Sukuk* negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi Warga Negara Indonesia yang dijual melalui agen penjual. Agen penjual merupakan bank atau perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh pemerintah. Seri ini ditujukan untuk investor-investor kecil. Hasil dari penerbitan *Sukuk Ritel* digunakan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, seperti jalan, jembatan, bandara, rel kereta api, dan bendungan (DPS, 2013). Instrumen ini dinilai bebas risiko. Alasannya, undang-undang menjamin nilai nominal investasi dan imbal hasil dapat dibayarkan.

Gambar 4.1
Deskripsi SBSN Seri SR-001 sampai SR-003

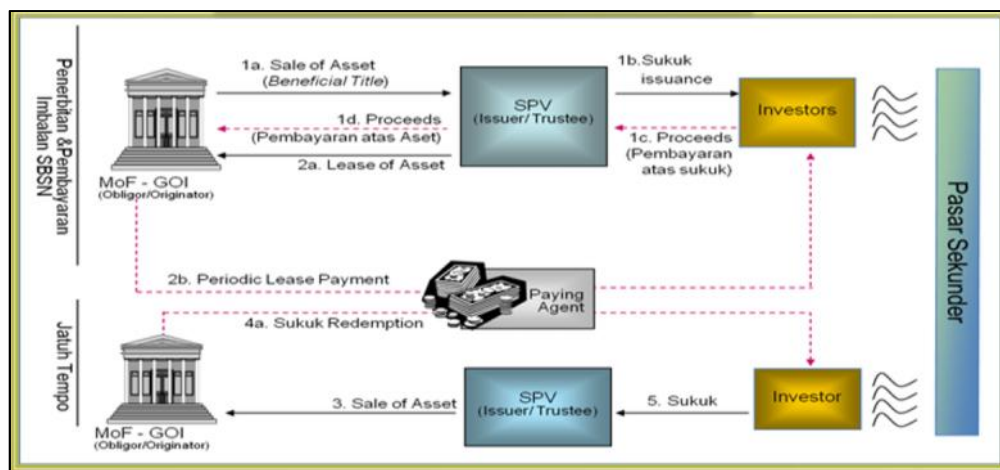
FITUR PRODUK	
Jenis Produk	Sukuk Negara Ritel Seri: SR-001, SR-002, SR-003
Penerbit	Berdasarkan PP No. 57 Tahun 2008 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia didirikan oleh: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4, Jakarta 10710 Tel: (021) 351 6296 atau 344 9230 ext 2600 - 2601 Fax: (021) 351 0727 Website: www.dmo.or.id
Bank Sub Registry	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Struktur / Akad	Sukuk Ijara (<i>sale-and-leaseback</i>)
Tujuan Investasi	Tujuan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel adalah untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional dengan pendapatan tetap melalui bagi hasil yang tetap (kupon) serta memiliki potensi <i>capital gain</i> .
Pengertian/Definisi	Sukuk Negara Ritel Seri: SR-001, SR-002 adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Agen Penjual. Pihak selain individu atau perorangan WNI dapat memiliki Sukuk Negara Ritel dengan membelinya di pasar sekunder melalui Agen Penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan.
Harga Sukuk	Adalah nilai dari setiap penyertaan di Sukuk Negara Ritel. Perhitungan informasi harga dari produk ini dilakukan secara harian.
Kupon/Imbalan Sukuk	SR-001 : 12,00% p.a. SR-002 : 8,70% p.a. SR-003 : 8,15 % p.a

Tanggal Jatuh Tempo Sukuk	SR-001 : 25 Februari 2012 SR-002 : 10 Februari 2013 SR-003 : 23 Februari 2014
Tanggal Pembayaran Kupon	SR-001 : Tanggal 25 setiap bulannya SR-002 : Tanggal 10 setiap bulannya SR-003 : Tanggal 23 setiap bulannya Apabila Pembayaran Kupon tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Frekuensi Transaksi	Pemesanan pembelian dapat dilakukan pada hari bursa Jakarta
Info Perkembangan Investasi	Informasi harga perdagangan Sukuk dipublikasikan harian di <i>Bisnis Indonesia</i>
Minimum Investasi	IDR 50.000.000 (lima puluh juta IDR), kelipatan IDR 5.000.000 (lima juta IDR)
Minimum Penjualan Kembali	IDR 50.000.000 (lima puluh juta IDR)
Profil Resiko	Tingkat volatilitas produk ini adalah menengah cenderung rendah. Pemantauan terhadap pasar mungkin diperlukan untuk menjaga resiko-resiko terkait produk. Produk ini mungkin sesuai untuk investor dengan profil resiko menengah cenderung rendah.
Biaya-biaya	
• Biaya Penempatan	0,5 % (ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.)
• Biaya Penjualan	NIL
• Biaya Kustodian	NIL

Sumber: HSBC Amanah, 2010.

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri SR telah dilakukan sebanyak 8 kali sejak tahun 2009. Pada tahun 2009, pemerintah resmi mengeluarkan SBSN seri SR pertama yaitu SR-001. Penerbitan seri SR berlanjut setiap tahun hingga tahun 2016. SBSN seri SR-001 sampai SR-003 menggunakan akad *ijarah (sale and lease back)*. Skema akad *ijarah sale and lease back* tampak pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Skema akad *ijarah sale and lease back*



Sumber: DPS, 2013.

Namun, sejak tahun 2012 skema SBSN seri SR mengalami perubahan. SBSN seri SR-004 sampai SR-008 menggunakan struktur akad baru, yaitu *Ijarah (Asset to be Leased)*.

Gambar 4.3
Deskripsi SBSN Seri SR-008

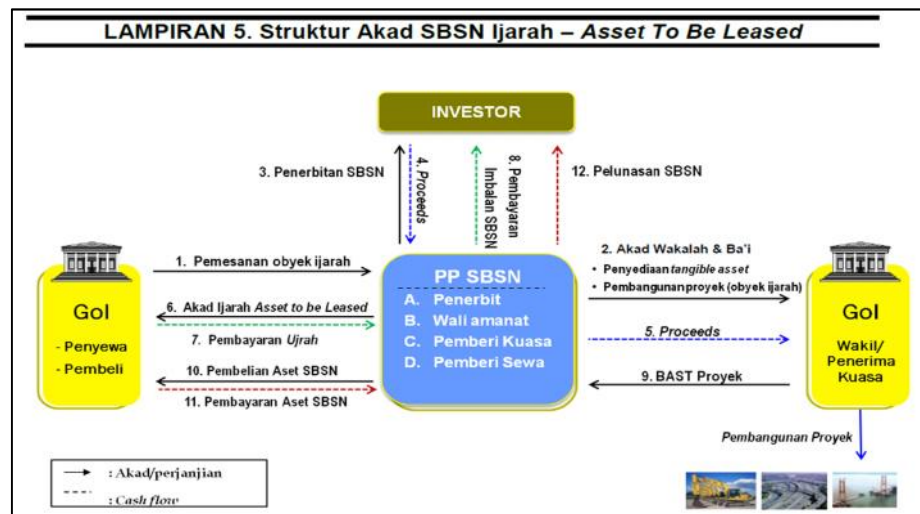
SUKUK RITEL SR-008	
Syarat dan Ketentuan SR-008	
Akad	Ijarah Asset to be Leased
Tanggal Penerbitan	10 Maret 2016
Jatuh tempo	10 Maret 2019
Nominal per Unit	Rp1.000.000,-
Harga per Unit	At par (100%)
Nominal Pelunasan	At par (100%), bullet payment
Tradability	Tradable, dengan holding period 1 periode kupon
Underlying Asset	Proyek APBN 2016 dan BMN berupa Tanah & Bangunan
Minimum Pemesanan	Rp5.000.000,- dan kelipatannya
Maksimum Pemesanan	Rp5.000.000.000,-
Tingkat Imbalan	8,3 % per tahun
Imbalan	Fixed, dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulan

Sumber: DPS, 2016a.

Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan *sukuk* negara seri SR-008. Seri ini menggunakan struktur akad *ijarah asset to be leased*. Skema akad *ijarah asset to be leased* tampak pada Gambar 4.4. Tujuan berinvestasi pada *sukuk* negara Ritel adalah untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan nasional dengan pendapatan tetap melalui imbal hasil yang tetap (sebagai kupon) serta memiliki potensi *capital gain*. Dasar penerbitan dari SR-008 adalah proyek APBN 2016 dan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.

Sukuk Ritel seri SR-008 memiliki jumlah minimal investasi sebesar Rp5.000.000 dan dilanjutkan dengan kelipatan Rp5.000.000. SR-008 memiliki imbal hasil sebesar 8,3% per tahun yang bersifat *fixed* dengan jatuh tempo 3 tahun.

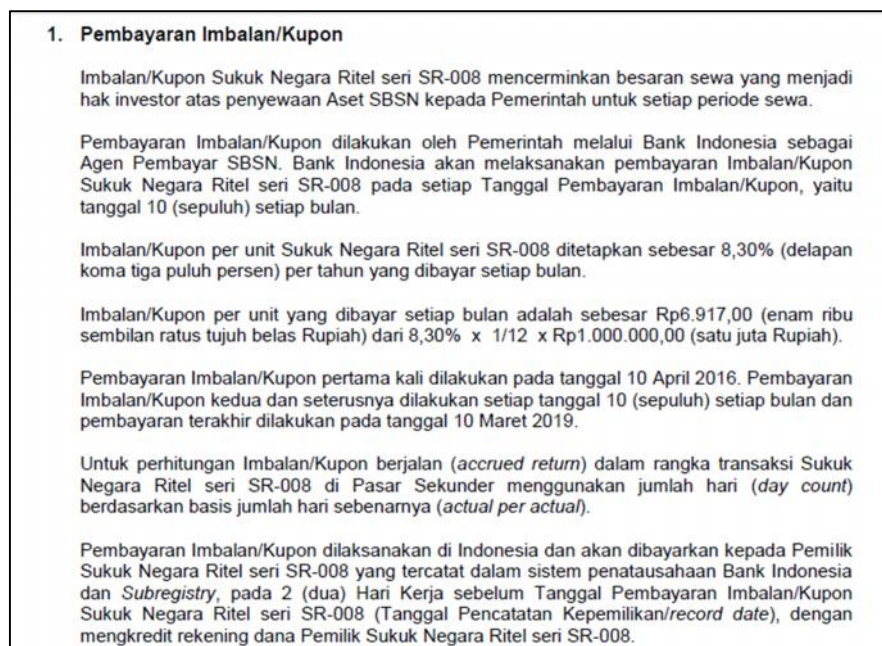
Gambar 4.4
Skema akad *ijarah asset to be leased*



Sumber: Kemenkeu, 2016a.

SBSN seri SR-008 memiliki skema perhitungan imbal hasil. Pembayaran imbal hasil *sukuk* dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Seri SR-008 ini akan jatuh tempo pada 10 Maret 2019. Guna memahami lebih lanjut mengenai perhitungan imbal hasil dari *sukuk* Ritel akan disajikan dalam Gambar 4.5.

Gambar 4.5
Ilustrasi Perhitungan Imbalan SR-008



Sumber: Kemenkeu, 2016a.

Ilustrasi 1. Pemerintah resmi menerbitkan SBSN Seri SR-008. Kemudian terdapat beberapa calon investor yang berkeinginan untuk memiliki SR-008, salah satunya di antara calon investor tersebut bernama Mukidi. Mukidi membeli SBSN seri SR-008 sebesar Rp1.000.000. Imbalan/kupon yang ditawarkan pemerintah adalah 8,3% per tahun. Jatuh tempo SBSN seri SR-008 adalah 3 tahun. Sehingga berapakah imbal hasil yang diterima oleh Mukidi setiap bulannya dan kumulatif apabila Mukidi menahannya hingga akhir masa jatuh tempo?

$$\text{Imbal hasil per bulan} = 8,3\% \times \frac{1}{12} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}6.917$$

$$\text{Imbal hasil hingga akhir masa jatuh tempo} = \text{Rp}6.917 \times 12 \times 3 = \text{Rp}249.012$$

Sehingga total pendapatan yang akan diterima oleh Mukidi selama memegang SR-008 hingga jatuh tempo adalah sebesar Rp249.012.

Ilustrasi 2. Pemerintah resmi menerbitkan SBSN Seri SR-008. Kemudian terdapat beberapa calon investor yang berkeinginan untuk memiliki SR-008, salah satunya di antara calon investor tersebut bernama Mukidi. Mukidi membeli SBSN seri SR-008 sebesar Rp1.000.000. Imbalan/kupon yang ditawarkan pemerintah adalah 8,3% per tahun. Jatuh tempo SBSN seri SR-008 adalah 3 tahun. Berapakah imbal hasil yang didapatkan oleh Mukidi apabila dia menahan kepemilikan SR-008 tersebut selama 1 tahun dan kemudian menjualnya di pasar sekunder dengan harga 105%?

$$\text{Imbal hasil per bulan} = 8,3\% \times \frac{1}{12} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}6.917$$

$$\text{Imbal hasil selama 1 tahun} = \text{Rp}6.917 \times 12 = \text{Rp}83.004$$

$$\text{Penjualan di pasar sekunder} = 105\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}1.050.000$$

Capital gain = Penjualan di pasar sekunder – Harga nominal pembelian SBSN

$$= \text{Rp}1.050.000 - \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}50.000$$

Sehingga total pendapatan yang akan diterima oleh Mukidi adalah sebesar
 $\text{Rp}83.004 + \text{Rp}50.000 = \text{Rp}133.004$.

4.1.2 Praktik SBSN Seri *Project Based Sukuk* (PBS)

Berbeda dari sebelumnya, yaitu SBSN jenis SR, SBSN seri *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan proyek negara. Tujuan dari penerbitan jenis PBS adalah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN. SBSN Seri PBS telah terbit sebanyak 14 kali sejak pertama kali terbit pada tahun 2012 (KSEI, 2016). Sebagaimana *Sukuk* Ritel, seri PBS juga dinilai bebas risiko karena jenis ini dijamin 100% oleh pemerintah.

Gambar 4.6
Deskripsi SBSN Seri PBS-014

ISIN Code : IDP000002404	
Security name	: SBSN Seri PBS014
Issuer	: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ISIN Code	: IDP000002404
Short Code	: PBS014
Type	: Surat Berharga Syariah Negara
Listing Date	: 07 Oktober 2016
Stock Exchange	: IDX
Status	: Active
Nominal	: 210,000,000,000.00
Current Amount	: 0.00
Mature Date	: 15 Mei 2021
Interest/Disc Rate	: 6.5%
Interest Type	: FIXED
Interest Frequency	: SEMI-ANNUAL
Currency	: IDR
Form	: Electronic
Effective Date ISIN	: -
Number of Securities	: (Total)

Sumber: KSEI, 2016.

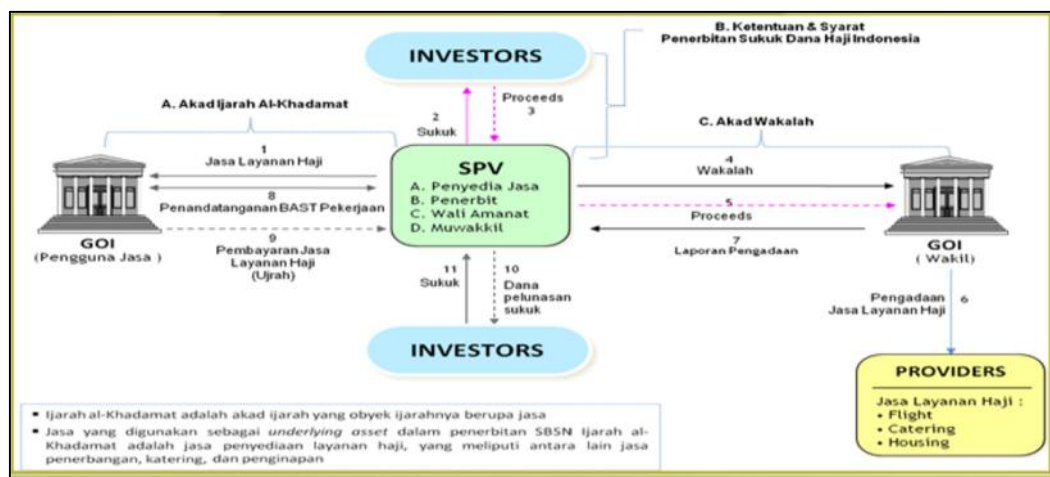
Pada SBSN jenis PBS, akad yang digunakan dalam SBSN seri PBS-014 ini adalah *Ijarah (asset to be leased)*. Skema ini sama dengan skema akad SR-004

yang tampak pada Gambar 4.4. SBSN seri PBS-014 diterbitkan berdasarkan proyek pemerintah berupa kegiatan dalam APBN dan/atau Barang Milik Negara (BMN). Nilai kupon imbal hasil seri PBS-014 sebesar 6,5% dan pembayaran imbalan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Seri ini sifatnya adalah *mid to long-term jatuh tempos* dengan jatuh tempo selama 5 tahun dan dapat diperdagangkan.

4.1.3 Praktik SBSN Seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membantu pemenuhan kegiatan jasa haji Indonesia. SDHI diterbitkan dengan cara *privat placement*, yaitu digunakan untuk penerbitan *sukuk* hanya kepada pihak tertentu dengan *terms & conditions* yang disepakati (DPS, 2013:8). Akad yang digunakan adalah *Ijarah Al-Khadamat*. Skema akad *ijarah al khadamat* tampak pada Gambar 4.7 berikut ini

Gambar 4.7
Skema akad *ijarah al khadamat*



Sumber: DPS, 2013.

Tahun 2015, pemerintah menerbitkan SDHI seri 2023 A. Imbal hasil dari SDHI seri 2023 A ini adalah sebesar 8,82% per tahun dan dibayarkan pada tanggal 4 setiap bulannya. SBSN seri SDHI 2023 A memiliki jatuh tempo selama

8 tahun. Sifat dari SDHI seri 2023 A ini adalah tidak dapat diperdagangkan. Nilai nominal penerbitan seri tersebut sebesar Rp1.500.000.000.000 (Fatimah, 2015)

Gambar 4.8
Deskripsi SBSN Seri SDHI 2023 A

Adapun rincian penerbitan SBSN seri SDHI 2023 A selengkapnya adalah sebagai berikut:		
No.	Keterangan	SBSN Seri SDHI 2023 A
12.	Nilai Nominal	Rp1.500.000.000.000,00
13.	Imbalan	<i>Fixed Coupon 8,82% Per Tahun</i>
14.	Tanggal Penerbitan / Setelmen	4 November 2015
15.	Tanggal Jatuh Tempo	4 November 2023
16.	Pembayaran Imbalan	Tanggal 4 setiap bulan
17.	Tanggal pembayaran imbalan pertama	4 Desember 2015
18.	Tanggal pembayaran imbalan terakhir	4 November 2023
19.	Ketentuan Perdagangan	<i>Non-tradable</i>
20.	Akad SBSN	<i>Ijarah Al-Khadamat</i>
21.	<i>Underlying Assets</i>	Jasa (<i>Service</i>)
22.	Penerbit	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

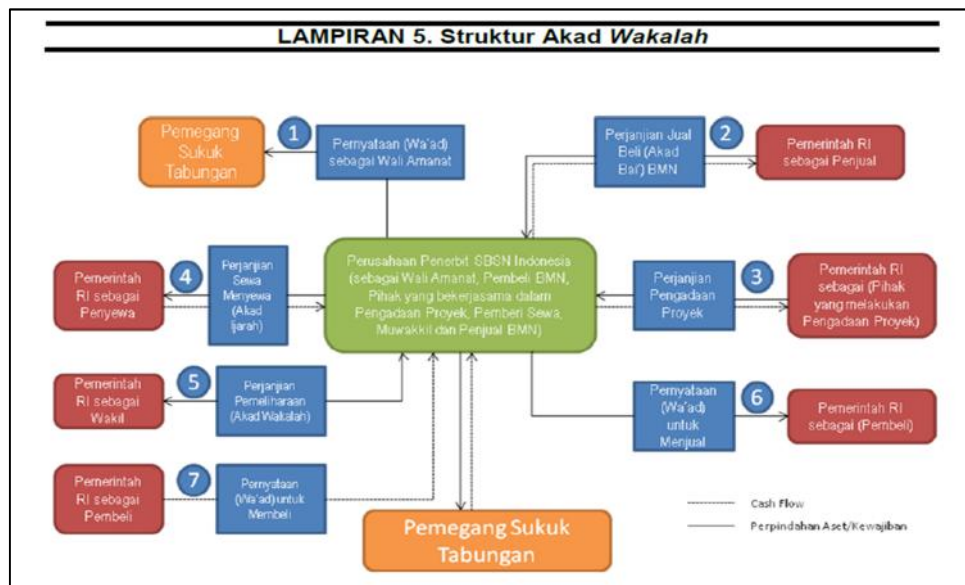
Sumber: Kemenkeu, 2015a.

4.1.4 Praktik SBSN Seri *Sukuk* Nasional Indonesia (SNI)

Bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang lain adalah *Sukuk* Negara Indonesia (SNI). *Sukuk* Negara Indonesia (SNI) merupakan jenis *sukuk* yang diterbitkan pada pasar internasional. Hariyanto (2015) mengatakan bahwa tujuan dari penerbitan SBSN seri SNI adalah sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan APBN. SBSN seri SNI diterbitkan dalam mata uang asing, yaitu Dollar *United State* (US).

Struktur akad yang digunakan dalam SNI-21 & SNI-26 adalah *wakalah*. Skema akad *wakalah* tampak pada Gambar 4.9. Tingkat imbalan yang ditentukan untuk SNI-21 adalah sebesar 3,4% dengan jatuh tempo 5 tahun dan SNI-26 adalah sebesar 4,55% dengan jatuh tempo 10 tahun. Deskripsi singkat mengenai SBSN Seri SNI-21 dan SNI-26 tampak pada Gambar 4.10.

Gambar 4.9
Struktur Akad Wakalah



Sumber: : Kemenkeu, 2016b.

Gambar 4.10
Deskripsi SBSN Seri SNI-21 & SNI-26

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2011 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan Sukuk Global sebagai berikut:

Seri	SNI21	SNI26
Tenor	5 tahun	10 tahun
Pricing Date	21 Maret 2016	21 Maret 2016
Nominal yang diterbitkan	US\$750 juta	US\$1,75 miliar
Tingkat Imbalan	3,400%	4,550%
Yield	3,400%	4,550%
Price	100%	100%
Tanggal setelmen/penerbitan	29 Maret 2016	29 Maret 2016
Tanggal jatuh tempo	29 Maret 2021	29 Maret 2026
Distribusi berdasarkan wilayah:		
Timur Tengah dan Syariah	42%	28%
Asia (selain Indonesia)	31%	25%
Indonesia	10%	10%
Eropa	15%	22%
Amerika	2%	15%
Distribusi berdasarkan jenis investor:		
Asset/ Funds Manager	40%	59%
Bank	38%	25%
Bank Sentral dan Sovereign Wealth Funds	13%	8%
Asuransi dan Dana Pensiun	5%	4%
Private Bank	4%	4%

Sumber: Kemenkeu, 2016c.

Namun, terdapat hal yang menarik bahwa akad *wakalah* pada seri SNI bukan merupakan akad aslinya. Pada awalnya, seri SNI tidak menggunakan akad *wakalah* tetapi menggunakan akad *ijarah sale and lease back*. Struktur akad

Ijarah (Sale and Lease Back) digunakan pada SNI-14, SNI-18, SNI-22, dan SNI-19. Hal ini tampak pada Gambar 4.11 berikut ini.

Gambar 4.11
Deskripsi SBSN Seri SNI-14 sampai SNI-24

TABLE 3. SUKUK NEGARA:GLOBAL ISSUANCE(2009-2014)					
	SNI --14 (2009)*	SNI-18 (2011)	SNI-22(2012)	SNI-19(2013)	SNI-24(2014)
Format	144 A/Reg S	144 A/Reg S	Islamic GMTN Program, Reg S/144 A	Islamic GMTN Program, Reg S/144 A	Islamic GMTN Program, Reg S /144 A
Tenor	5 years	7 years	10 years	5.5 years	10years
Issue date	23-Apr-09	21-Nov-11	21-Nov-12	17-Sep-13	10-Sep-14
Maturity date	23-Apr-14	21-Nov-18	21-Nov-22	March 15,2019	10-Sep-24
Coupon	8.80%p.a	4.00%p.a	3.30%p.a	6.125%p.a	4.35%p.a
Structure	<i>Ijarah Sale and Lease Back</i>				<i>Wakalah</i>
Orderbook	USD4.76 billion	USD6.5 billion	USD5.3 billion	USD5.7 billion	USD10 billion
Issue size	USD650 million	USD1 billion	USD1 billion	USD1.5 billion	USD1.5 billion
Source: Ministry of Finance					*matured series

Sumber: IIFM, 2016.

4.1.5 Praktik SBSN Seri *Islamic Fixed Rate (IFR)*

Jenis lain dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Seri *Islamic Fixed Rate (IFR)*. Seri IFR merupakan SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah dengan imbal hasil yang bersifat tetap. Seri IFR menggunakan struktur akad *Ijarah (Sale and Lease Back)* pada seri SR (Gambar 4.2). Sifat dari seri IFR ini adalah dapat diperdagangkan pada pasar sekunder. Akan tetapi, seri IFR memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan seri SR. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah minimum investasi. Seri SR memiliki jumlah minimum investasi yang rendah karena memang ditujukan untuk investor kecil. Sedangkan seri IFR memiliki jumlah minimum investasi yang tinggi karena seri ini ditujukan untuk investor besar.

Pada tahun 2011 pemerintah menerbitkan SBSN seri IFR-010 dengan nominal penerbitan sebesar 4,11 triliun rupiah. Seri IFR-010 memiliki tingkat imbal hasil yang ditawarkan adalah sebesar 10% dan dibayarkan secara *semi-*

annual (satu tahun dua kali). Masa jatuh tempo dari seri IFR-010 adalah 15 tahun dan akan jatuh tempo pada 15 Februari 2036 (KSEI, 2016).

Gambar 4.12
Deskripsi SBSN Seri IFR-010

ISIN Code : IDP000001000	
Security name	: SBSN Seri IFR0010
Issuer	: Pemerintah Republik Indonesia
ISIN Code	: IDP000001000
Short Code	: IFR0010
Type	: Surat Berharga Syariah Negara
Listing Date	: 04 Maret 2011
Stock Exchange	: IDX
Status	: Active
Nominal	: 4,110,000,000,000.00
Current Amount	: 1,150,000,000,000.00
Mature Date	: 15 Februari 2036
Interest/Disc Rate	: 10%
Interest Type	: FIXED
Interest Frequency	: SEMI-ANNUAL
Currency	: IDR
Form	: Electronic
Effective Date ISIN	: -
Number of Securities	: (Total)

Sumber: KSEI, 2016.

4.1.6 Praktik SBSN Seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

Surat Berharga Syariah Negara seri SPN-S merupakan *Sukuk* Negara jangka pendek yang digunakan dalam rangka menutupi kekurangan kas jangka pendek, akibat dari ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara satu tahun anggaran (Suharso, 2016). SPN-S dijual kepada investor institusi melalui lelang dan *private placement* dengan mata uang Rupiah. Jangka waktu maksimum untuk SPN-S adalah 1 tahun. SBSN seri SPN-S diterbitkan dengan jatuh tempo 6 bulan dan menggunakan akad *Ijarah (Sale and Lease Back)*. Skema akad ini sama dengan milik SR yang tampak pada Gambar 4.2. Sebagai contoh, SBSN seri SPN-S 21032017 yang diterbitkan tahun 2016 tampak pada Gambar 4.13 berikut ini.

Gambar 4.13
Deskripsi SBSN Seri SPN-S 21032017

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S dan SBSN PBS berbasis proyek (*Project Based Sukuk*) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2016. Berikut pokok-pokok *terms & conditions* SBSN yang akan dilelang:

<i>Terms & Conditions</i>	Seri Surat Berharga Syariah Negara				
	SPN-S 21032017	PBS009	PBS006	PBS011	PBS012
Tanggal Jatuh Tempo	21 Mar 2017	25 Jan 2018	15 Sep 2020	15 Agt 2023	15 Nov 2031
Imbalan	Diskonto	7,75000%	8,25000%	8,75000%	8,87500%
<i>Underlying Asset</i>	BMN berupa tanah dan bangunan	Proyek/Kegiatan dalam APBN tahun 2016 dan BMN			
Tanggal Lelang	20 September 2016				
Tanggal Setelmen	22 September 2016				
Alokasi Pembelian Non-kompetitif	50% dari jumlah yang dimenangkan	30% dari jumlah yang dimenangkan			
Target Indikatif	Rp4.000.000.000.000,00				

Sumber: Kemenkeu, 2016c.

SPN-S seri SPN-S 21032017 di atas memiliki imbal hasil adalah pada tingkat diskonto. Maknanya adalah seri ini tidak memiliki nilai kupon tetap setiap bulan. Akan tetapi surat berharga tersebut dibeli di bawah harga nominal dan dijual pada jatuh tempo di atas harga nominal. Sifatnya dari seri ini dapat diperdagangkan. Seri SPN-S 21032017 diterbitkan atas dasar Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. Seri ini akan jatuh tempo pada 21 Maret 2017.

4.1.7 Praktik SBSN Seri *Sukuk* Tabungan (ST)

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan varian baru dari Surat Berharga Syariah Negara Ritel. Varian baru tersebut adalah *Sukuk* Tabungan. Tujuan dari dibentuknya varian baru ini adalah untuk membiayai anggaran negara, memperluas basis investor, dan mengelola portofolio pembiayaan negara (BRI, 2016). Deskripsi singkat SBSN seri ST-001 tampak pada Gambar 4.14 berikut ini.

Gambar 4.14
Deskripsi SBSN Seri ST-001

<p>Sukuk Tabungan seri ST-001 diterbitkan dengan akad <i>Wakalah</i> yang mencerminkan penyertaan kepemilikan investor atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari investor. <i>Underlying Asset</i> yang digunakan adalah Proyek/Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2016 serta Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan. Sukuk Tabungan seri ST-001 ini telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-381/DSN-MUI/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016.</p> <p>Adapun pokok-pokok syarat dan ketentuan Sukuk Tabungan seri ST-001 adalah sebagai berikut:</p>	
Deskripsi	Keterangan
Masa Penawaran	22 Agustus s.d. 2 September 2016
Tanggal Penjatahan	5 September 2016
Tanggal Penerbitan/Setelmen	7 September 2016
Tanggal Jatuh Tempo	7 September 2018 (tenor 2 tahun)
Penerbit	Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Akad	<i>Wakalah</i>
<i>Underlying Asset</i>	Proyek/Kegiatan APBN Tahun 2016 dan Barang Milik Negara
Minimum Pemesanan	Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
Maksimum Pemesanan	Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Tingkat Imbalan	6,9% per tahun
Pembayaran Imbalan	Tanggal 7 setiap bulan dalam jumlah tetap (<i>fixed</i>). Apabila jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
Pembayaran Imbalan Pertama	7 Oktober 2016
Sifat Perdagangan	Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (<i>Non Tradable</i>)
Pencairan sebelum jatuh tempo (<i>early redemption</i>)	Pada saat pembayaran imbalan ke-12, bagi yang memiliki kepemilikan minimal Rp4 juta. Maksimal pengajuan 50% dari kepemilikan investor di tiap Agen Penjual.

Sumber: Kemenkeu, 2016d.

Sukuk Tabungan Seri ST-001 ini menggunakan struktur akad *wakalah*. Skema ini tampak pada Gambar 4.9. Seri ST-001 memiliki jatuh tempo selama 2 tahun dengan tingkat imbalan sebesar 6,9% (BRI, 2016). *Sukuk* jenis ini sifatnya tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Guna memahami lebih lanjut mengenai perhitungan imbal hasil dari *sukuk* Ritel akan disajikan dalam gambar 4.15.

Ilustrasi. Pemerintah resmi menerbitkan SBSN Seri ST-001. Kemudian terdapat beberapa calon investor yang berkeinginan untuk memiliki ST-001, salah satunya di antara calon investor tersebut bernama Mukidi. Mukidi membeli SBSN seri ST-001 sebesar Rp1.000.000. Imbalan/kupon yang ditawarkan pemerintah adalah 6,9% per tahun. Jatuh tempo SBSN seri ST-001 adalah 2 tahun. Sehingga berapakah imbal hasil yang diterima oleh Mukidi setiap bulannya dan kumulatif apabila Mukidi menahannya hingga akhir masa jatuh tempo?

Gambar 4.15
Ilustrasi Perhitungan Imbalan SBSN Seri ST-001

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST-001 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST-001 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 7 (tujuh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Tabungan seri ST-001 ditetapkan sebesar 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari $6,90\% \times \frac{1}{12} \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta Rupiah).

Pembayaran Imbalan/Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2016. Pembayaran Imbalan/Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 7 (tujuh) setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 7 September 2018.

Sumber: Kemenkeu, 2016b.

$$\text{Imbal hasil per bulan} = 6,9\% \times \frac{1}{12} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}5.750$$

$$\text{Imbal hasil hingga akhir masa jatuh tempo} = \text{Rp}5.750 \times 12 \times 2 = \text{Rp}138.000$$

Sehingga total pendapatan yang akan diterima oleh Mukidi selama memegang ST-001 adalah sebesar Rp138.000. Masyarakat dapat membeli seri ST-001 kepada agen penjual dengan minimum pemesanan sebesar Rp2.000.000.

SBSN seri ST-001 dapat diperoleh dari 26 agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah, di antaranya: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank OCBC NISP Tbk, PT. Bank Permata Tbk, PT. Bank Danamon Tbk, PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Panin Tbk, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, PT. Bank DBS Indonesia, PT. Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, Citibank N.A., The Hongkong and Shanghai Banking

Corporation Ltd, PT. Bahana Sekuritas, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Tbk, PT. Sucorinvest Central Gani, PT. Mega Capital Indonesia, dan PT. MNC Securities (Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001, 2016.).

4.2. Sintesis

Berdasarkan data tersebut maka terdapat beberapa hal yang perlu untuk dikaji secara mendalam, di antaranya: 1) *underlying asset*, 2) strukturisasi akad, 3) pola imbal hasil, dan 4) jaminan pemerintah.

4.2.1. *Underlying Asset*

Jamaldeen (2012) mengatakan bahwa keberadaan *underlying asset* pada skema penerbitan SBSN menjadi kunci untuk membedakan SBSN dengan obligasi. Selanjutnya Nur Kholis (2011) menilai bahwa *underlying asset* dibutuhkan sebagai jaminan atas nilai yang diterbitkan sesuai dengan nilai aset yang tersedia. Berdasarkan data di atas, pemerintah Indonesia menggunakan 3 jenis *underlying asset* yang digunakan untuk menerbitkan SBSN, antara lain: proyek/kegiatan APBN, Barang Milik Negara (BMN), dan kegiatan jasa layanan haji. Pembahasan *underlying asset* ini akan dibahas secara mendalam pada bab 5.

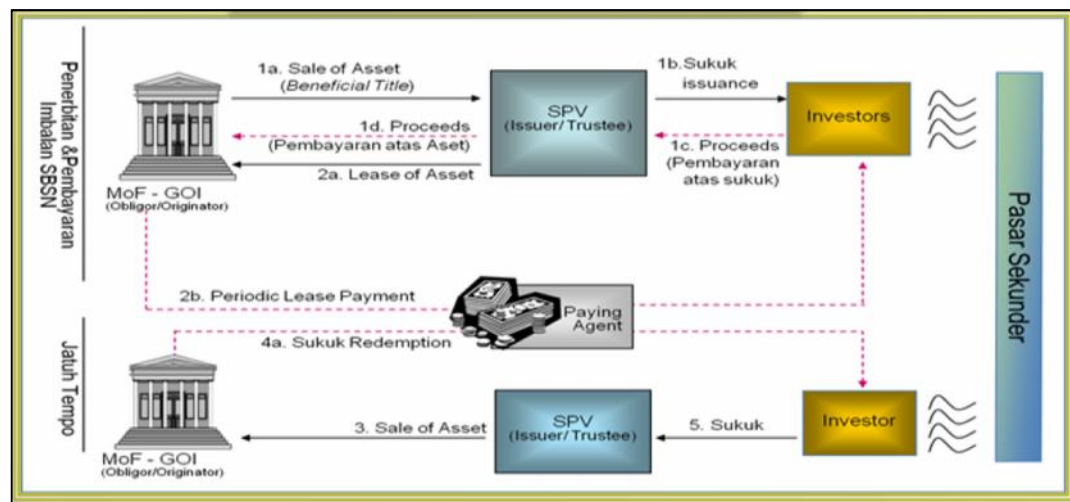
4.2.2. Strukturisasi Akad

Kurniati (2014:20) menilai struktur akad pada penerbitan SBSN memiliki peran penting dalam pengembangan variasi produk SBSN. Tahun 2016, basis struktur akad masih menggunakan adalah akad *ijarah* dan *wakalah*. Penelitian ini menunjukkan struktur akad yang digunakan antara lain, 1) *ijarah sale and lease back*, 2) *ijarah asset to be leased*, 3) *ijarah al-khadmat*, dan 4) *wakalah*. Setiap akad tersebut memiliki pola tersendiri yang disajikan sebagai berikut:

1. *Ijarah Sale and Lease Back*

Struktur akad *ijarah sale and lease back* digunakan untuk beberapa jenis Surat Berharga Syariah Negara, antara lain: *Sukuk Ritel 001 - 003, Islamic Fixed Rate*, Surat Perbendaharaan Negara Syariah, dan *Sukuk Nasional Indonesia*. Skema struktur akad *ijarah sale and lease back* dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut ini.

Gambar 4.16
Struktur Akad *Ijarah Sale and Lease Back*



Sumber: Brosur Sukuk Negara, 2013.

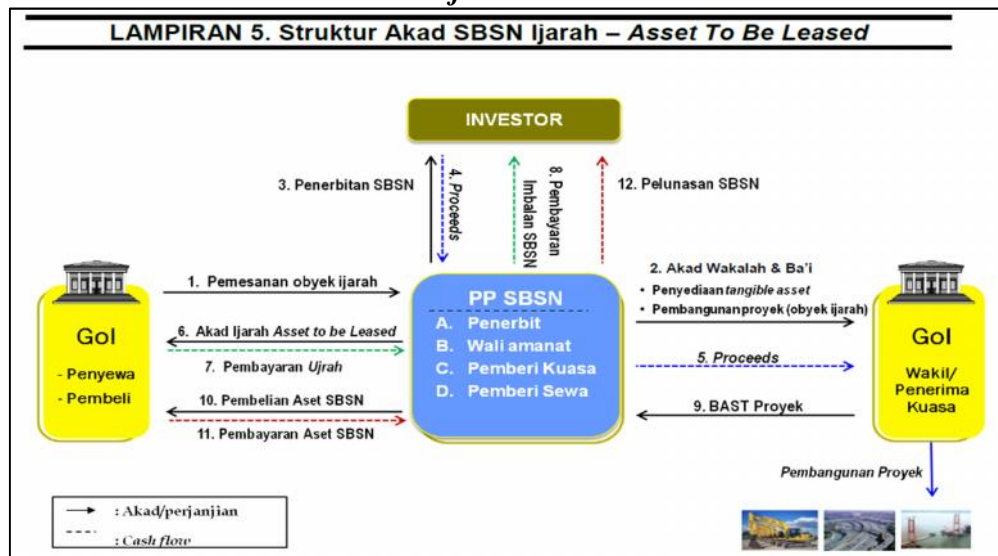
2. *Ijarah Asset To Be Leased*

Struktur akad *ijarah asset to be leased* digunakan untuk 2 jenis Surat Berharga Syariah Negara, antara lain: *Sukuk Ritel 004 - 008*, dan *Project Based Sukuk*. Skema struktur akad *ijarah asset to be leased* dapat dilihat pada Gambar 4.17.

3. *Ijarah Al-Khadmat*

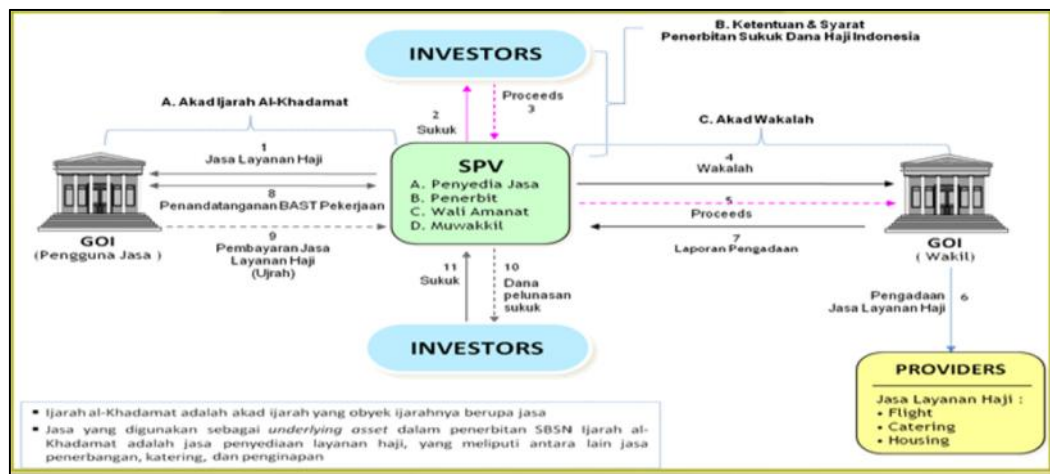
Struktur akad *ijarah al-khadmat* digunakan hanya untuk satu jenis Surat Berharga Syariah Negara, yaitu *Sukuk Dana Haji Indonesia*. Skema struktur akad *ijarah al-khadmat* dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.17
Struktur Akad Ijarah Asset To Be Leased



Sumber: Kemenkeu, 2016a.

Gambar 4.18
Struktur Akad Ijarah Al-Khadmat

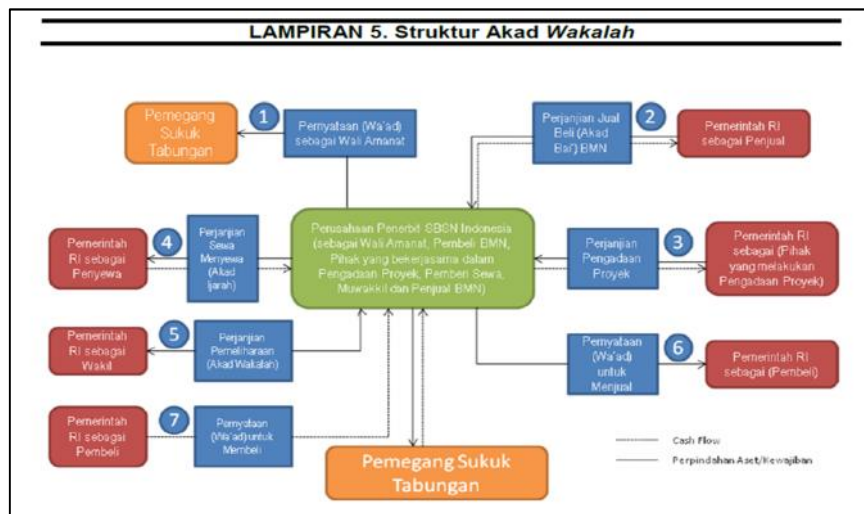


Sumber: DPS, 2013.

4. Wakalah

Struktur akad *wakalah* digunakan untuk 2 jenis Surat Berharga Syariah Negara, antara lain: *Islamic Fixed Rate*, *Sukuk Nasional Indonesia* dan *Sukuk Tabungan*. Skema struktur akad *wakalah* dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19
Stuktur Akad Wakalah



Sumber: Kemenkeu, 2016b.

Pembahasan strukturisasi akad ini akan dibahas secara mendalam pada bab 6.

4.2.3. Pola Imbal Hasil

Imbal hasil menjadi daya tarik para investor untuk membeli SBSN. Dalam praktiknya, proses pembagian imbal hasil memiliki beberapa metode. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan 2 pola pemberian imbal hasil. Metode yang digunakan adalah metode *fixed rate* dan metode diskonto. Pembahasan mengenai pola imbal hasil ini akan dibahas secara mendalam pada bab 7.

4.2.4. Jaminan Pemerintah

Penelitian ini menunjukkan bahwa semua jenis SBSN memiliki tingkat risiko yang sangat kecil apabila berada pada pasar primer. Bahkan risiko gagal bayar (*Default risk*) menjadi tidak ada. Hal tersebut terjadi karena pemerintah menjamin 100% pembayaran imbal hasil dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Pembahasan mengenai jaminan pemerintah ini akan dibahas secara mendalam pada bab 7.

BAB V

UNDERLYING ASSETS

“Hukum itu tidak dapat berubah karena berubah bentuk dan diganti namanya”
[Al Khataby]

Bab ini akan membahas secara terperinci mengenai *underlying asset* yang digunakan untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

5.1. Underlying Asset SBSN

Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap penerbitan produk SBSN memiliki *underlying asset* yang berbeda pada setiap seri. Secara ringkas bentuk *underlying asset* pada setiap penerbitan tampak pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Underlying Asset SBSN

Sukuk Ritel	SR-001	SR-002	SR-003	SR-004	SR-005	SR-006	SR-007	SR-008
	BMN			Proyek/Kegiatan APBN & BMN				
Project Based Sukuk	PBS-007	PBS-008	PBS-009	PBS-010	PBS-011	PBS-012	PBS-013	PBS-014
	Proyek/Kegiatan APBN		Proyek/Kegiatan APBN & BMN					
Sukuk Dana Haji Indonesia	SDHI-2014 D	SDHI-2015 A	SDHI-2018 A	SDHI-2019 B	SDHI-2019 C	SDHI-2020 B	SDHI-2020 C	SDHI-2022 B
	Jasa Haji							
Sukuk Nasional Indonesia	SNI-14	SNI-18	SNI-19	SNI-21	SNI-22	SNI-24	SNI-25	SNI-26
	BMN			Proyek/Kegiatan APBN & BMN	BMN	Proyek/Kegiatan APBN & BMN		
Islamic Fixed Rate	IFR-001	IFR-002	IFR-003	IFR-004	IFR-005	IFR-006	IFR-007	IFR-008
	BMN							
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	SPNS-03012012	SPNS-06112015	SPNS-04052016	SPNS-27012017	SPNS-21032017	SPNS-19042017		
	BMN							
Sukuk Tabungan	ST - 001							
	Proyek/Kegiatan APBN & BMN							

Sumber: Olahan Penulis.

Perbedaan *underlying asset* setiap seri bergantung pada ketersediaan aset SBSN. Hariyanto (2015b) menjelaskan bahwa “Pengembangan jenis akad dan *underlying asset* merupakan suatu keniscayaan...Pengembangan tersebut juga untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai *underlying asset*”. Namun demikian, secara umum *underlying asset* yang digunakan sampai saat ini adalah BMN, proyek/kegiatan APBN, dan jasa haji.

Setiap *underlying asset* yang digunakan untuk menerbitkan SBSN memiliki konsekuensi tersendiri. Sebagai contoh adalah jasa haji, jasa haji memiliki *underlying asset* berupa jasa layanan haji yang meliputi jasa penerbangan, *catering*, dan pemondokan. Hasil dari penerbitan SBSN digunakan untuk membiayai 3 hal tersebut. Sehingga ketika jasa tersebut memiliki keuntungan maka keuntungan itu yang akan dibagi kepada investor sebagai imbal hasil. Akan tetapi, praktik yang terjadi di lapangan tidak demikian. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada bab 7 terkait dengan penentuan imbal hasil SBSN.

Kemudian untuk proyek kegiatan APBN menggunakan *underlying asset* berupa proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan Barang/Jasa biasanya meliputi:

- a. Pengadaan barang seperti: kendaraan, komputer, software, dll.
- b. Pengerjaan konstruksi seperti: pembangunan gedung, kantor, jembatan, dll.
- c. Jasa konsultasi seperti: pekerjaan perencanaan tata ruang, perencanaan sosial, dll.
- d. Jasa lainnya seperti: jasa pengamanan gedung, jasa transportasi, hotel, dll.

Adapun yang dimaksud dengan proyek infrastruktur adalah segala proyek pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan prasarana fisik guna menunjang kegiatan perekonomian negara dapat berjalan dengan baik. Proyek infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur fisik, yaitu: pembangunan jalan, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, kereta api, dan sebagainya. Hal ini menarik untuk dicermati karena imbal hasil SBSN harus didasarkan atas keuntungan dari *underlying asset*. Pembahasan ini akan dibahas pada bab 7.

Hal yang menarik juga terjadi pada *underlying asset* berupa aset BMN. Aset BMN memiliki aturan hukum yang berbeda. Sehingga aset BMN memiliki konsekuensi tersendiri daripada *underlying asset* yang lain. Guna memahami lebih dalam pembahasan ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

5.2. Skema Penerbitan SBSN dengan *Underlying Asset* BMN

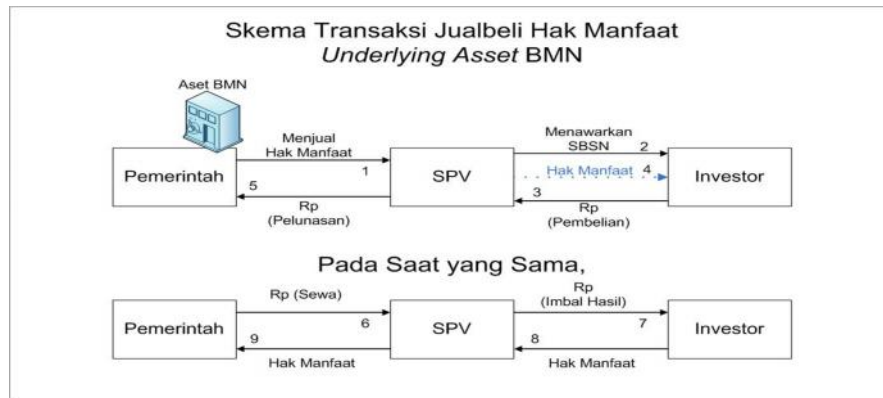
Keberadaan *underlying asset* menjadi hal yang vital dalam penerbitan SBSN. DPS (2010:21) menjelaskan bahwa,

Penerbitan SBSN memerlukan adanya *underlying asset* karena pada dasarnya SBSN merupakan surat berharga yang mencerminkan bagian kepemilikan atas aset/manfaat/jasa yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Keberadaan *underlying asset* berfungsi sebagai transaksi riil yang menjadi dasar penerbitan SBSN, dan merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara penerbitan surat utang dengan sukuk. Tanpa *underlying asset*, surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat sebagai instrumen utang, karena tidak terdapat transaksi riil yang mendasari penerbitan sukuk tersebut.

Keberadaan *underlying asset* menjadi pembeda dengan surat utang. Oleh karena itu, *underlying asset* sangat diperlukan dalam penerbitan SBSN. Penerbitan SBSN dengan *underlying asset* BMN melibatkan beberapa transaksi. Transaksi tersebut terjadi antara pemerintah dengan *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan antara SPV dengan para investor. Transaksi yang terjadi pada saat

penerbitan adalah transaksi jualbeli hak manfaat aset BMN. Transaksi jualbeli hak manfaat yang dilakukan terlihat pada Gambar 5.2 berikut ini.

Gambar 5.1
Skema Transaksi Jualbeli Hak Manfaat *Underlying Asset* SBSN



Sumber: Olahan penulis, 2016.

Penjelasan gambar 5.2 tentang skema transaksi jualbeli hak manfaat *underlying asset* BMN:

1. Pemerintah menjual hak manfaat aset BMN kepada SPV.
2. SPV menerbitkan SBSN dan menawarkan kepada para investor
3. Investor membeli SBSN dari SPV.
4. Hak manfaat berpindah dari SPV kepada investor.
5. Setelah dana dari investor terkumpul, SPV melunasi pembelian hak manfaat aset BMN kepada pemerintah.
6. Pada saat yang sama, karena pemerintah masih membutuhkan BMN, pemerintah menyewa kembali kepada SPV.
7. Atas hasil sewa tersebut, para investor mendapatkan imbal hasil yang dibagikan oleh SPV.
8. Hak manfaat atas aset SBSN berpindah dari investor kepada SPV.
9. Hak manfaat berpindah dari SPV kepada pemerintah.

Dengan demikian, skema penerbitan tersebut memiliki 2 transaksi yang melekat. Hal ini terjadi karena aset BMN secara regulasi memiliki aturan yang terikat yang mengharuskan adanya SPV sebagai pihak pembeli. Kemudian pemerintah akan menyewa kembali aset BMN untuk penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, skema penerbitan tersebut dibutuhkan untuk keberlangsungan penyelenggaraan negara. Namun demikian, transaksi yang terjadi sekilas tampak menjadi tidak efisien. Mengapa demikian? Maka perlu kita bahas lebih dalam pada sub bab berikutnya.

5.3. Kendala Pemindahtanganan Aset BMN

Regulasi tentang perbendaharaan negara melarang pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) yang masih digunakan untuk penyelenggaraan negara kepada pihak lain. UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengatur hal tersebut. Pasal 45 ayat 1 dan 2 berbunyi,

“Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD”.

Berdasarkan regulasi tersebut dapat dipahami bahwa BMN dapat dipindahtangankan selama BMN tersebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan negara. Namun demikian, BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* merupakan BMN yang masih diperlukan bagi penyelenggaraan negara. Sehingga pemerintah tidak dapat memindahtangankan BMN.

Oleh karena itu, untuk menjembatani kebutuhan pemerintah akan proses penerbitan SBSN dan kebutuhan pemerintah untuk menggunakan aset BMN maka dibuat sebuah solusi. Solusi yang tetap dibolehkan sesuai dengan hukum formal.

Solusi tersebut adalah pemerintah tidak menjual fisik aset BMN tetapi pemerintah menjual hak manfaat dari aset BMN. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1 UU 19 tahun 2008 tentang SBSN,

“Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan Menteri dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas Barang Milik Negara atau cara lain yang sesuai dengan Akad yang digunakan dalam rangka penerbitan SBSN”.

Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut (Pasal 1 ayat 16, UU 19 tahun 2008 tentang SBSN). Pemerintah membutuhkan suatu skema, dimana skema tersebut aman dari segi regulasi dan berdasarkan hukum formal (*legal form*) syarat transaksi SBSN terpenuhi. Sehingga pemerintah membentuk SPV untuk menjembatani 2 kebutuhan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Mulyani yang dikutip oleh Afrianto (2016), “Kami ciptakan SPV untuk batasi transaksi aset tersebut hingga dapat dilaksanakan secara konvensional”. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Wilson (2008) bahwa “Entitas dengan tujuan khusus (SPV) merupakan sebuah syarat dalam kesuksesan penerbitan dan manajemen *sukuk*”. Keberadaan SPV tersebut diperlukan agar dapat memenuhi *legal form* jual beli tetapi secara substansi tidak terjadi pemindahtanganan aset BMN sama sekali. Kemudian secara hukum formal, syarat transaksi SBSN dapat terpenuhi. Dengan demikian, wajar jika pemerintah memerlukan adanya SPV. Untuk meyakinkan bahwa SPV secara substansi merupakan entitas pemerintah dan aset BMN tidak dipindahtanganan maka pemerintah menggunakan model jual dan beli kembali (*sale and lease back*). Namun, karena hal ini merupakan aspek syariah maka diperlukan aspek

hukum yang mengatur. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan tersebut terbit fatwa DSN MUI No. 69, 71, dan 72. Sehingga secara hukum formal, pemerintah telah aman, bahwa aset tidak dipindahtangankan dan secara formal definisi SBSN terpenuhi.

Namun, pada dasarnya terdapat kerancuan tentang posisi SPV. SPV merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah agar penjualan aset tidak terjadi pemindahtanganan. Kemudian SPV juga memiliki tugas sebagai penerbit SBSN. Di sisi lain, SPV juga berperan sebagai wakil dari para investor untuk melakukan transaksi dengan pemerintah. Sehingga terdapat ketidakjelasan posisi SPV, apakah SPV sebagai wakil pemerintah atau SPV sebagai wakil investor.

Hal tersebut akan memiliki masalah pada aspek syariah. Sebab, seorang wakil harus jelas mewakilkan dirinya untuk salah satu pihak. Permasalahan ini masih memungkinkan untuk dikaji lebih dalam baik dari aspek hukum dan ketentuan syariah. Namun, karena dikhawatirkan pembahasan akan menjadi melebar maka peneliti akan berfokus pada aspek bahwa SPV adalah wakil dari investor. Pendapat ini peneliti ambil karena berdasarkan fungsinya, SPV secara dominan memiliki fungsi sebagai wakil dari investor.

Oleh karena itu, solusi penjualan hak manfaat atas aset BMN dan pembentukan SPV merupakan solusi yang dipandang tepat ditengah kebutuhan pemerintah untuk membuat *underlying asset* bagi proses penerbitan SBSN. Solusi tersebut dapat dikatakan tepat karena secara hukum formal kepemilikan aset BMN tetap pada pemerintah. Sehingga konsekuensi yang melekat dari transaksi tersebut adalah SPV hanya diberikan hak manfaat untuk menggunakan aset tersebut.

Akan tetapi, solusi tersebut ternyata memiliki risiko dari aspek syariah yang lain. Sebagaimana dijelaskan pada bab 2 bahwa transaksi syariah memiliki karakteristik substansi mengungguli bentuk. Maknanya adalah yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum adalah substansi, bukan hanya pada bentuk *legal form* semata.

Meskipun secara hukum formal penerbitan SBSN telah menenuhi aspek legal dan syariah. Namun, terdapat pendapat-pendapat lain di dunia ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Taqi sebagaimana dikutip oleh Naim, dkk. (2013) melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa 85% penerbitan *sukuk* negara tidak sejalan dengan ajaran Syariat Islam. Maurer (2010) menegaskan bahwa “penelitian tentang *sukuk* masih membahas pada aspek bentuk. Penelitian yang ada belum sampai membahas pada tahap substansi praktik *sukuk*”. Sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji untuk memahami praktik SBSN yang sebenarnya terjadi. Pembahasan ini akan dibahas pada bab 6.

5.4. Sintesis

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *underlying asset* pada SBSN dalam bentuk proyek dan layanan haji secara regulasi tidak memiliki permasalahan. Indikasi permasalahan terjadi pada penentuan imbal hasil yang akan dibahas pada bab 7. Sedangkan *underlying asset* dalam bentuk BMN memiliki permasalahan regulasi, dimana aset BMN tidak dapat dipindahtangankan apabila aset BMN masih digunakan. Sehingga pemerintah membuat solusi untuk menjual hak manfaat atas aset BMN dan membuat SPV untuk membatasi transaksi yang terjadi. Dengan demikian, penjualan hak manfaat aset BMN tidak menimbulkan konsekuensi pemindahtanganan. Namun, solusi

tersebut memiliki masalah pada aspek syariah yang lain. Peran dan fungsi SPV berdampak pada substansi akad yang terjadi dalam penerbitan SBSN. Pembahasan tentang masalah ini akan dibahas secara mendalam pada bab 6.

BAB VI

STRUKTURISASI AKAD

“Sesungguhnya Allah tidak mungkin diperdaya. Ini adalah perniagaan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya”
[Anas bin Malik]

Berdasarkan pembahasan pada bab 4 dan bab 5 terlihat bahwa *underlying asset* memiliki pengaruh terhadap bentuk akad yang digunakan. Bab ini akan membahas lebih lanjut tentang strukturisasi akad penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

6.1. Strukturisasi akad SBSN

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur akad yang digunakan dalam SBSN terbagi menjadi 4 jenis, di antaranya: *ijarah sale and lease back*, *ijarah asset to be leased*, *ijarah al khadamat*, dan *wakalah*. Bentuk struktur akad pada setiap penerbitan dapat diketahui melalui Tabel 6.1

Peran dan fungsi SPV memberikan dampak pada substansi akad pada penerbitan SBSN. Setiap akad memiliki pola-pola tersendiri yang berbeda dari yang lain. Guna memahami lebih lanjut masing-masing akan dibahas pada bagian berikutnya.

6.1.1. *Ijarah sale and lease back*

Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan definisi terkait *sale and lease back*. Fatwa DSN No. 71 tentang *sale and lease back* menjelaskan bahwa *sale and lease back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Selanjutnya, dalam Fatwa DSN No. 72, DSN

memberikan definisi terkait SBSN *ijarah sale and lease back*. SBSN *ijarah sale and lease back* adalah SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad *ijarah* dengan mekanisme *sale and lease back*.

Tabel 6.1
Strukturisasi akad SBSN

<i>Sukuk Ritel</i>	SR-001	SR-002	SR-003	SR-004	SR-005	SR-006	SR-007	SR-008
	<i>Ijarah sale and lease back</i>			<i>Ijarah asset to be leased</i>				
<i>Project Based Sukuk</i>	PBS-007	PBS-008	PBS-009	PBS-010	PBS-011	PBS-012	PBS-013	PBS-014
	<i>Ijarah asset to be leased</i>							
<i>Sukuk Dana Haji Indonesia</i>	SDHI-2014 D	SDHI-2015 A	SDHI-2018 A	SDHI-2019 B	SDHI-2019 C	SDHI-2020 B	SDHI-2020 C	SDHI-2022 B
	<i>Ijarah al khadmat</i>							
<i>Sukuk Nasional Indonesia</i>	SNI-14	SNI-18	SNI-19	SNI-21	SNI-22	SNI-24	SNI-25	SNI-26
	<i>Ijarah sale and lease back</i>					<i>wakalah</i>		
<i>Islamic Fixed Rate</i>	IFR-001	IFR-002	IFR-003	IFR-004	IFR-005	IFR-006	IFR-007	IFR-008
	<i>Ijarah sale and lease back</i>							
<i>Surat Perbendaharaan Negara Syariah</i>	SPNS-03012012	SPNS-06112015	SPNS-04052016	SPNS-27012017	SPNS-21032017	SPNS-19042017		
	<i>Ijarah sale and lease back</i>							
<i>Sukuk Tabungan</i>	ST - 001							
	<i>wakalah</i>							

Sumber: Olahan penulis, 2016.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa struktur akad *ijarah sale and lease back* adalah akad *ijarah* atas jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual. Skema akad *ijarah sale and lease back* tampak pada Gambar 6.1.

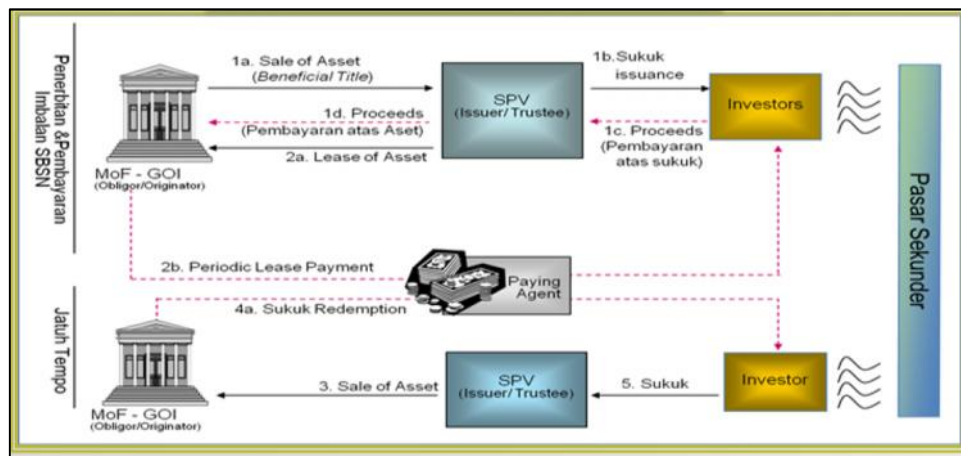
Penjelasan Gambar 6.1 tentang skema *akad ijarah sale and lease back*:

1a. Pemerintah menjual/menyewakan hak manfaat atas aset BMN kepada

Special Purpose Vehicle (SPV).

1b. SPV menerbitkan SBSN untuk ditawarkan kepada para investor.

Gambar 6.1
Skema Akad Ijarah Sale and Lease Back



Sumber: DPS, 2013.

- 1c. Para investor membeli SBSN.
- 1d. SPV membayar hak manfaat atas aset BMN kepada pemerintah.
- 2a. SPV menyewakan kembali hak manfaat atas aset BMN kepada pemerintah.
- 2b. Secara periodik pemerintah membayar biaya sewa kepada *paying agent* (Bank Indonesia) atas penggunaan aset BMN. Serta secara periodik *paying agent* membagikan imbal hasil kepada investor atas keuntungan penyewaan aset BMN.
3. Pada saat jatuh tempo, SPV menjual kembali hak manfaat atas aset BMN kepada pemerintah.
4. Pemerintah melakukan *sukuk redemption* (penebusan sukuk) kepada *paying agent*. Pemerintah membayar sejumlah uang yang telah disepakati di awal perjanjian. Atas uang penebusan itu, *paying agent* membayarkannya kepada investor.
5. SPV menarik kembali SBSN dari investor.

Oleh karena itu, penerbitan SBSN menggunakan akad *ijarah sale and lease back* memiliki 2 transaksi yang melekat didalamnya. Transaksi sewa menyewa antara pemerintah dengan SPV dan kemudian disewakan kembali kepada pemerintah.

Berdasarkan penelusuran peneliti, akad *ijarah sale and lease back* identik dengan *underlying asset* berupa aset BMN (dapat dibandingkan antara Tabel 5.1 dan Tabel 6.1). Sebagaimana telah dibahas pada bab 5, aset BMN tidak dapat dipindahtangankan apabila aset BMN masih digunakan untuk penyelenggaraan negara. Sehingga konsekuensi inilah yang menjadi dasar pertimbangan terbentuknya struktur akad *ijarah sale and lease back*. Hal ini tampak dalam pertimbangan Fatwa DSN No. 71 dan 72. Dalam Fatwa No. 71 tentang *sale and lease back*, Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa, “Dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset kepada penjual, yang disebut dengan *Sale and Lease Back*”. Selanjutnya, Fatwa DSN No. 72 tentang *ijarah sale and lease back* berbunyi, “Dewan Syari’ah Nasional menimbang bahwa masyarakat dan pemerintah memerlukan instrumen keuangan berbasis syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menggunakan akad Ijarah dengan mekanisme *Sale and Lease Back*”. Oleh karena itu, terbentuklah suatu skema penerbitan SBSN, dimana pemerintah menyewakan hak manfaat kepada SPV. Selanjutnya, SPV menyewakan kembali hak manfaat aset BMN kepada pemerintah.

DPS (2010:18) menjelaskan bahwa, “SPV merupakan badan hukum yang dibentuk untuk memfasilitasi penerbitan *sukuk*”. SPV bukan merupakan produk

atau konsep syariah tetapi SPV memiliki fungsi sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor. Hal ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan dapat diadopsi dalam transaksi berbasis syariah. SPV memiliki beberapa fungsi yang melekat dalam penerbitan SBSN. DPS (2010:18) menjelaskan bahwa fungsi SPV adalah:

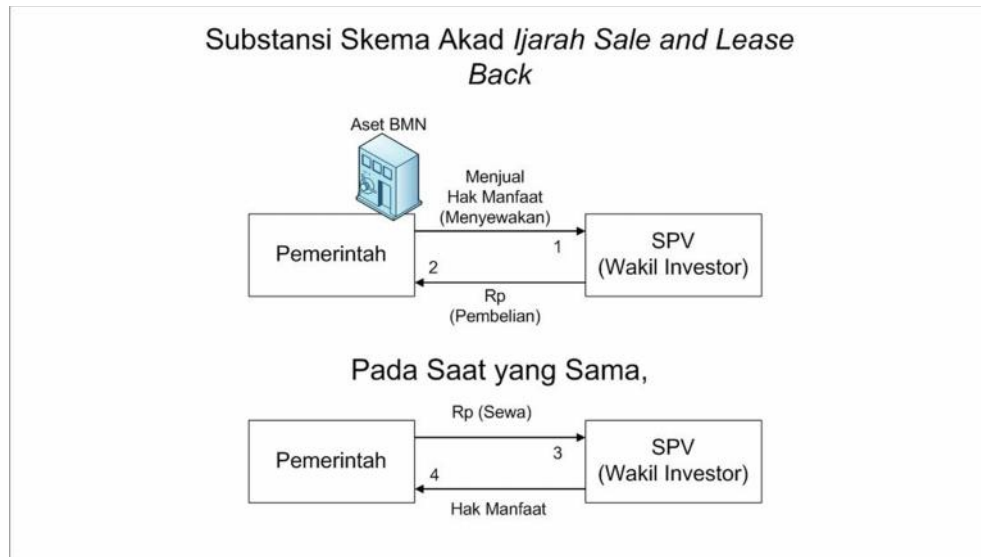
1. Sebagai penerbit *sukuk*.
2. Melakukan transaksi / perikatan dengan *obligor* untuk kepentingan investor.
3. Berfungsi sebagai *trustee (principle trustee)*/wali amanat untuk kepentingan investor;
4. Dapat menunjuk pihak lain sebagai *co-trustee* untuk membantu melaksanakan tugas-tugas SPV sebagai *trustee*.

Berdasarkan fungsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SPV memiliki 2 fungsi utama, yaitu: sebagai penerbit SBSN dan wali amanat (wakil dari investor). Oleh karena itu, SPV menjadi salah satu pihak yang vital dalam penerbitan SBSN. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Wilson (2008) bahwa, “SPV merupakan sebuah syarat kesuksesan penerbitan dan manajemen *sukuk*”. SPV menjadi vital karena perannya sebagai jembatan antara pemerintah dan investor serta agar transaksi sesuai syariah.

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 5, peneliti membatasi peran SPV sebagai wakil investor. Peran SPV sebagai wakil investor tersebut ternyata memiliki konsekuensi dalam aspek hukum syariah yang lain. Dalam kaidah *fikih muamalah*, apabila seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain maka orang lain tersebut telah sah menjadi wakilnya. Sehingga semua hak milik pemberi wakil berpindah kepada orang yang menerima wakil. Oleh karena itu, transaksi *ijarah sale and lease back* dalam penerbitan SBSN secara

substansi hanya terjadi antara pemerintah dengan SPV (wakil investor). Guna memahami lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 6.2 berikut ini.

Gambar 6.2
Substansi Skema Akad *Ijarah Sale and Lease Back*



Sumber: Olahan Penulis, 2016.

Penjelasan Gambar 6.2 tentang substansi skema akad *ijarah sale and lease back*:

1. Pemerintah menyewakan aset BMN kepada SPV.
2. SPV membeli hak manfaat (menyewa) aset BMN kepada pemerintah
3. Pada saat yang sama, pemerintah membutuhkan aset BMN. Sehingga pemerintah menyewa kembali aset BMN kepada SPV.
4. Hak manfaat berpindah kepada pemerintah dan pemerintah dapat menggunakan aset BMN.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa secara substansi, transaksi yang terjadi hanya antara pemerintah dengan SPV (wakil investor). Transaksi seperti ini menimbulkan masalah lain dari aspek syariah. Para ulama mengatakan transaksi ini mengandung transaksi jual beli *'inah* dan sebagian

mengatakan mengandung jual beli *wafa'*. Pembahasan ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

6.1.1.1. Perbandingan *Sale and Lease Back* dengan Jual Beli '*Inah*

Jual beli '*inah* merupakan salah satu jenis jual beli yang telah dikabarkan oleh Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*. Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* pernah bersabda,

“Jika kalian berjual beli dengan cara '*inah*, hanya mengikuti di belakang sapi dan ridha dengan tanaman sehingga meninggalkan jihad, Allah akan membelitkan kepada kalian semua kehinaan yang tidak akan dihilangkan-Nya hingga kalian kembali kepada agama kalian.” [HR. Abu Dawud, No. 3462]

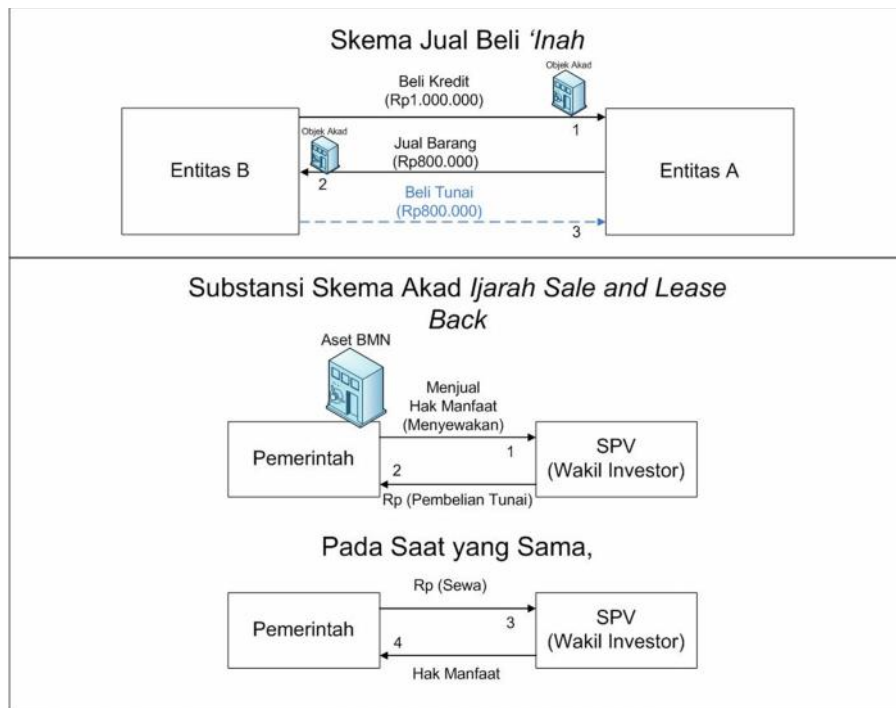
Para ulama sepakat bahwa ini merupakan salah satu dalil haramnya jual beli dengan cara '*inah*. Selanjutnya, Al-Fauzan sebagaimana dikutip oleh Ummu Abdullah (2008) menjelaskan bahwa jual beli '*inah* adalah

“Jika sebuah barang dijual kepada seseorang dengan pembayaran ditangguhkan (yakni harga yang lebih tinggi akan dibayar kemudian hari pada waktu yang ditentukan), kemudian barang tersebut dibeli kembali darinya dengan harga yang berlaku pada saat itu, kurang dari harga yang ditangguhkan yang diberikan kepadanya”.

Oleh karena itu, jual beli '*inah* merupakan jual beli barang secara tangguh yang kemudian barang dibeli kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Pada dasarnya pihak yang membeli tangguh adalah seorang yang membutuhkan uang. Sedangkan pihak yang menjual barang tidak ingin memberikan uang dengan cara meminjamkan. Sehingga pihak kedua menggunakan alat transaksi berupa adanya barang.

Kemudian bagaimana kaitannya dengan skema *sale and lease back*. Guna memahami lebih lanjut perbandingan antara keduanya, akan disajikan dalam Gambar 6.3 berikut ini.

Gambar 6.3
Perbandingan Skema Jual Beli *'Inah* dengan *Sale And Lease Back*



Sumber: Olahan Penulis, 2016.

Penjelasan skema jual beli *'inah* pada gambar 6.3 sebagai berikut:

Ilustrasi. Entitas A sedang membutuhkan uang. Kemudian entitas A memberitahukan kepada entitas B. Akhirnya entitas B memberikan solusi dengan skema seperti berikut ini.

1. Entitas A diminta untuk membeli barang milik entitas B seharga Rp100.000.000 dengan cara utang.
2. Setelah transaksi terjadi. Entitas A menjual kembali barang tersebut dengan harga Rp80.000.000 kepada entitas B.
3. Entitas B membeli barang tersebut secara tunai.

Menurut para ulama, transaksi seperti ini adalah transaksi yang tidak dibenarkan menurut hukum syariah. Karena transaksi tersebut berisiko sebagai pengelabuan atas praktik riba (adanya tambahan atas utang). Hal ini terjadi

karena transaksi utama yang terjadi adalah entitas B memberikan pinjaman sebesar Rp80.000.000. Sedangkan entitas A memiliki hutang sebesar Rp100.000.000 kepada entitas B. Kemudian objek akad hanya sebagai pengelabuan atas praktik riba.

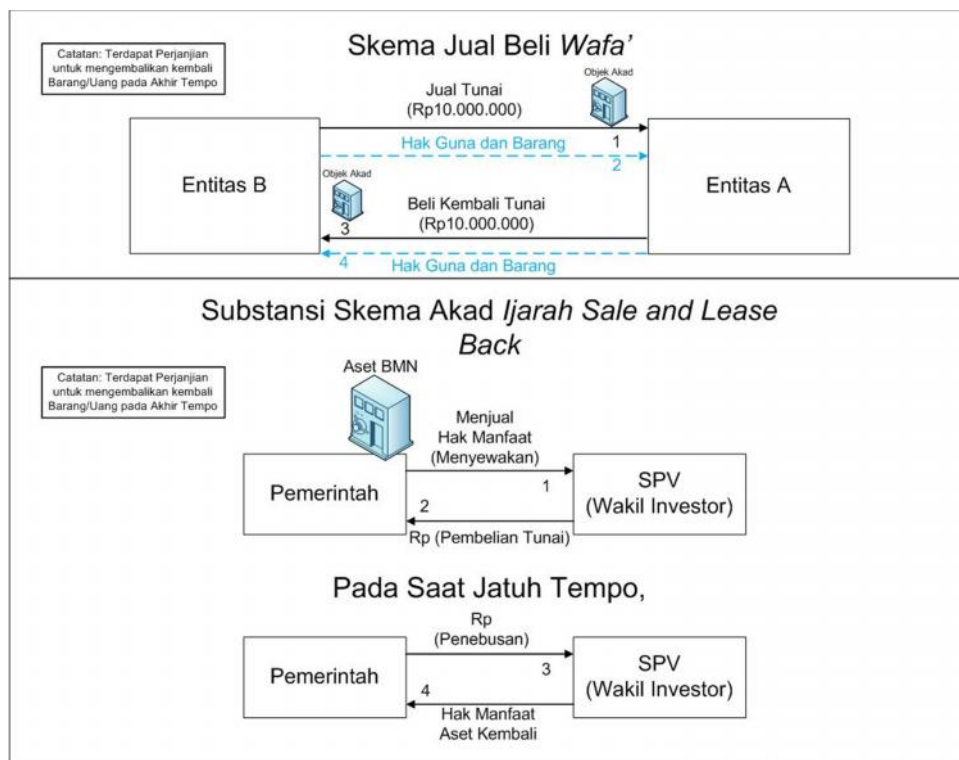
Tarmizi (2014:452) berpendapat bahwa “dalam skema *sale and lease back* mengandung jual beli ‘*inah*. Karena transaksi terjadi pada pihak-pihak yang sama dan objek akadnya adalah sama”. Namun, peneliti mengamati terdapat sedikit perbedaan antara kedua skema tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada transaksi awal yang terjadi. Pada transaksi jual beli ‘*inah*, transaksi awal yang terjadi adalah jual beli tangguh (kredit). Sedangkan dalam *akad sale and lease back*, transaksi awal yang terjadi adalah jual beli tunai. Kemudian pembeda yang lain terletak pada kepemilikan objek akad. Objek akad pada transaksi ‘*inah* adalah milik pemberi uang. Sedangkan pada transaksi *sale and lease back* adalah milik penerima uang. Kemudian dalam praktik SBSN, pihak yang membutuhkan uang adalah pemilik barang. Sedangkan pada jual beli ‘*inah* pihak yang membutuhkan uang adalah bukan pemilik barang.

Perbedaan inilah yang mungkin menjadi celah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan hukum atas praktik SBSN *ijarah sale and lease back*. Para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami skema *sale and lease back*. Oleh karena itu, perbedaan ini dapat dikaji ulang dan lebih mendalam sebagai pertimbangan para ulama untuk menentukan fatwa. Para ulama juga berpendapat bahwa skema akad *sale and lease back* mengandung jual beli *wafa'*. Permasalahan ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

6.1.1.2. Perbandingan *Sale And Lease Back* dengan *Jual Beli Wafa'*

Al mushlih dan As Shafwi (2003) mengatakan bahwa “Jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan persyaratan mengembalikan hak pihak lain di masa yang akan datang”. Transaksi ini hanya terjadi antara 2 pihak saja, yaitu antara penjual dan pembeli. Guna memahami lebih lanjut, skema jual beli *wafa'* terlihat pada Gambar 6.4 berikut ini.

Gambar 6.4
Perbandingan Skema Jual Beli *Wafa'* dengan *Sale and Lease Back*



Sumber: Olahan Penulis, 2016.

Penjelasan Gambar 6.4 tentang skema jual beli *wafa'*:

Ilustrasi. Entitas B sedang membutuhkan uang. Dia kebingungan untuk mencari pendanaan. Menurutnya, apabila dia menjual aset perusahaannya maka akan berdampak pada kerugian jangka panjang. Akhirnya entitas B bertemu dengan entitas A dan menceritakan masalahnya. Oleh karena itu:

1. Entitas B menjual asetnya kepada entitas A seharga Rp100.000.000 namun dengan syarat aset tersebut tidak boleh dijual kepada siapapun. Kemudian suatu saat dia akan membelinya kembali.
2. Entitas A membeli aset tersebut seharga Rp100.000.000. Sehingga kepemilikan telah berpindah dan entitas A berhak menggunakan aset tersebut.
3. Dua tahun kemudian, entitas B telah memiliki uang dan akhirnya membeli kembali asetnya dari entitas A dengan harga Rp100.000.000.
4. Aset tersebut kembali menjadi milik entitas B.

Model jual beli *wafa'* ini sangat mirip dengan transaksi yang dilakukan antara pemerintah dengan SPV dalam penerbitan SBSN melalui akad *ijarah sale and lease back*. SPV selaku wakil investor membeli aset BMN dari pemerintah. Kemudian pemerintah menyaratkan agar aset BMN tidak boleh dijual ke pihak lain. Pada saat jatuh tempo pemerintah akan membeli kembali aset BMN dari SPV. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian *purchase and sale undertaking* yang dilakukan antara pemerintah dan SPV. Sebagaimana dijelaskan oleh DPS (2010) bahwa, "...Dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam *purchase & sale undertaking agreement* maka terdapat jaminan bahwa aset tidak akan berpindah tangan kepada pihak lain".

Kemenkeu (2016b) menjelaskan bahwa,

Purchase undertaking merupakan janji sepihak oleh pemerintah untuk membeli kembali aset SBSN dari SPV pada saat jatuh tempo dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan *sale undertaking* merupakan janji sepihak oleh SPV untuk menjual kembali aset SBSN kepada pemerintah pada saat jatuh tempo dengan harga yang telah disepakati.

Sehingga skema SBSN *sale and lease back* memiliki janji terikat untuk kedua pihak tidak menjual aset SBSN kepada pihak lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar aset dapat kembali dimanfaatkan oleh pemilik utama yaitu pemerintah.

Transaksi tersebut sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Al Mushlih dan As Shafwi tentang jual beli *wafa'*, dimana “jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan persyaratan mengembalikan hak pihak lain di masa yang akan datang”. Persamaannya terletak pada hak pemerintah untuk menggunakan aset BMN akan kembali ketika pemerintah mengembalikan hak SPV berupa uang yang diberikan pada awal transaksi. Namun demikian, para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi hukum jual beli *wafa'* itu sendiri.

Ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli *wafa'*, sebagaimana dijelaskan oleh Al Mushlih dan Ash-Shawi (2003), di antara mereka ada yang berpendapat:

1. Jual beli yang terjadi sah karena jual beli tersebut dibutuhkan.
2. Menganggap transaksi tersebut merupakan transaksi gadai yang sah karena memenuhi hukum-hukum gadai.
3. Menganggap transaksi tersebut adalah transaksi yang rusak/cacat karena adanya janji membeli kembali.
4. Menganggap transaksi model baru yang menggabungkan antara jual beli yang sah dan jual beli yang rusak. Namun, hal tersebut dibolehkan karena kebutuhan.

Al Mushlih dan Ash Shawi (2003) menegaskan bahwa,

“Yang benar, bahwa jual beli semacam itu tidak dibenarkan, karena tujuan yang sebenarnya adalah *riba*, yakni dengan cara memberikan uang untuk dibayar secara tertunda, sementara fasilitas penggunaan barang yang digunakan dalam perjanjian dan sejenisnya adalah keuntungannya”.

Kemudian Al Mushlih dan Ash-Shawi (2003) mengutip pendapat dari Ibnu Taimiyyah,

"Sejenis jual beli yang mereka perlihatkan yang disebut jual beli amanah yang dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa apabila telah dikembalikan pembayaran si penjual, barang juga dikembalikan, adalah jual beli batil menurut kesepakatan para imam, baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau melalui kesepakatan sebelum akad. Itu pendapat yang tepat daripada ulama".

Oleh karena itu, transaksi dengan skema jual beli *wafa'* menurut para ulama adalah salah satu bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan secara syariat. Berdasarkan analisis peneliti, peneliti menyimpulkan adanya kesamaan model antara jual beli *wafa'* dengan skema *sale and lease back*. Sehingga hukum skema *sale and lease back* sama dengan hukum jual beli *wafa'*, yaitu tidak diperbolehkan. Tarmidzi (2014:453) juga menjelaskan bahwa "Praktik *sukuk ijarah* (SBSN) serupa dengan jual beli *wafa'*, dimana mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli *wafa'* tidak dibenarkan syariat".

Namun, DSN MUI memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang skema *sale and lease back*. DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 71 tahun 2008 tentang bolehnya skema *sale and lease back*. Fatwa tersebut sama dengan pendapat ulama yang membolehkan skema jual beli *wafa'*. Kebolehan tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan masyarakat dengan skema *sale and lease back*. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Fatwa No. 71 tentang *sale and lease back* poin a yang berbunyi, "Bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali aset kepada penjual, yang disebut dengan *Sale and Lease Back*".

Namun, apakah pertimbangan kebutuhan yang dimaksud DSN MUI adalah kebutuhan yang sangat mendesak sehingga hukumnya boleh melakukan hal yang

haram? Jika benar demikian, maka perlu untuk dipahami kaidah tentang “hal yang sangat mendesak (darurat) membolehkan sesuatu yang terlarang”.

Nuryusmansyah (2013) menjelaskan definisi darurat sebagai berikut, “Darurat secara bahasa bermakna kebutuhan yang sangat mendesak. Yang dimaksud kaidah ini adalah seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampir binasa”. Sehingga kebutuhan tersebut harus dilakukan agar seseorang bisa selamat. Akan tetapi, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi agar kaidah ini dapat dipraktikkan. Asy Syuwai’ir sebagaimana dikutip oleh Tuasikal (2012) menjelaskan syarat darurat mendapat keringanan, di antaranya:

1. Darurat terjadi pada saat itu juga dan bukan nanti.
2. Harus jelas dan dapat dipastikan tidak ada jalan lain selain mengonsumsi yang haram.
3. Harus dipastikan yang haram tersebut dapat menghilangkan bahaya.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi sehingga sesuatu yang terlarang boleh untuk dikerjakan dalam keadaan sangat mendesak. Jika terdapat salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka kaidah “hal yang sangat mendesak (darurat) membolehkan sesuatu yang terlarang” tidak boleh untuk dijadikan sebagai alasan (*hujjah*) (Tuasikal, 2012). Sebab, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka kebutuhan mendesak tersebut bukan sesuatu yang mendesak. Sehingga hukumnya kembali menjadi hukum asal, yaitu terlarang untuk melakukan suatu hal tersebut.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam pendapat DSN MUI. Kebolehan praktik *sale and lease back* harus memenuhi beberapa syarat:

1. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi SBSN harus benar-benar terpisah secara substansi. Pemerintah, SPV, dan investor terpisah secara substansi bukan pihak yang mewakili pihak lain. Sebab, hukum syariah bergantung pada substansi.
2. Perjanjian *sale and purchase undertaking* harus dihilangkan karena perjanjian ini menyebabkan transaksi yang terjadi menjadi jual beli *wafa'*. Perlu dicermati bahwa DSN MUI saat ini telah mengeluarkan Fatwa Nomor 85 tentang kewajiban *wa'ad*. Konsep ini menyebabkan seseorang untuk melakukan perjanjian “hitam di atas putih”. Sehingga perjanjian tersebut harus benar-benar dihilangkan agar tidak terjadi jual beli *wafa'*.
3. Persyaratan akan kebutuhan mendesak harus terpenuhi sehingga kaidah “hal yang sangat mendesak membolehkan sesuatu yang terlarang” dapat digunakan sebagai alasan (*hujjah*).

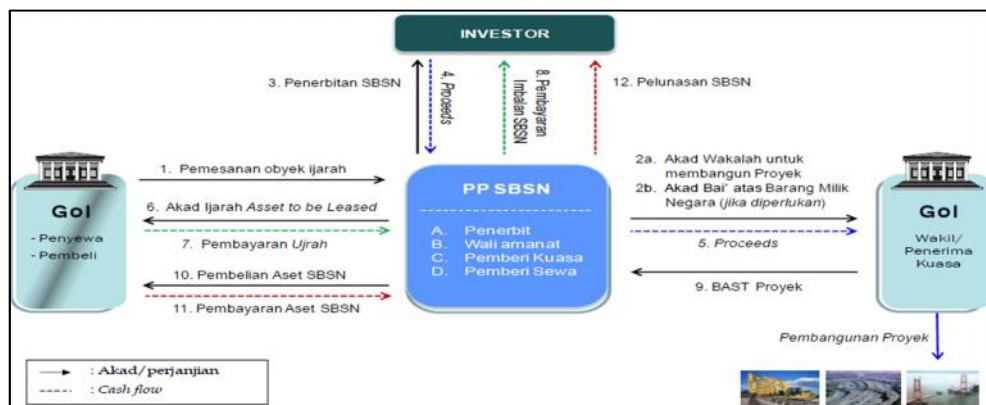
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengajian ulang atas pendapat kebolehan skema *ijarah sale and lease back*. Hal-hal di atas perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan hukum atas praktik SBSN *ijarah sale and lease back*. Apabila pertimbangan di atas, terutama pada aspek persyaratan kaidah “hal yang sangat mendesak membolehkan sesuatu yang terlarang” tidak terpenuhi, maka sebaiknya skema *sale and lease back* tidak dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kaidah menutup sarana keburukan (*syadz adz-dzariah*) sebagaimana dijelaskan pada bab 2. Konsep tersebut perlu untuk dilakukan agar

terhindar dari praktik siasat yang dilarang, dimana dalam hal ini adalah siasat pengelabuan atas praktik riba. *Wallahu a'lam*.

6.1.2. *Ijarah asset to be leased*

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa No. 72 Tahun 2010 tentang *Ijarah Asset To Be Leased*. DSN memberikan definisi *Ijarah Asset To Be Leased* sebagai “Akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan”. Skema penerbitan SBSN dengan akad *ijarah asset to be leased* dapat dilihat pada Gambar 6.5.

Gambar 6.5
Skema Akad *Ijarah Asset To Be Leased*



Sumber: DPS, 2013.

Penjelasan Gambar 6.5 tentang skema akad *ijarah asset to be leased* dalam penerbitan SBSN:

1. Pemerintah melakukan pemesanan objek ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN).
- 2a. PP SBSN mewakilkan (melakukan akad *wakalah*) kepada pemerintah untuk membangun proyek.

- 2b. PP SBSN melakukan akad jual beli manfaat atas BMN.
3. PP SBSN melakukan penerbitan SBSN kepada investor.
4. Investor membayar sejumlah uang untuk membeli SBSN kepada PP SBSN.
5. PP SBSN membayar sejumlah uang untuk mendanai pembangunan proyek atau membeli hak manfaat BMN.
6. PP SBSN melakukan akad *ijarah asset to be leased* dengan pemerintah.
7. Pemerintah membayar sejumlah uang untuk pembayaran sewa (*ujrah*).
8. PP SBSN membayar imbal hasil kepada investor.
9. Pemerintah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek, bahwa proyek pembangunan telah selesai.
10. Pemerintah membeli aset SBSN dari PP SBSN.
11. Pemerintah membayar sejumlah uang atas pembelian aset SBSN.
12. PP SBSN membayar sejumlah uang untuk menarik kembali SBSN dari investor.

Penerbitan SBSN menggunakan skema *ijarah asset to be leased* dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa No. 76 tahun 2010 tentang *asset to be leased* bahwa, “dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia diperlukan sumber pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara”. Selanjutnya, dalam pertimbangan Fatwa No. 76 poin b, DSN menegaskan bahwa,

“Dalam pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN diperlukan akad *ijarah* yang obyek *ijarah*nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek *ijarah* sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi

penyerahan keseluruhan obyek *ijarah* dilakukan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan”

Sehingga pemerintah merasa perlu untuk membuat bentuk skema lain dalam penerbitan SBSN. Tujuannya adalah agar semakin banyak diversifikasi skema yang dapat memunculkan variasi produk-produk syariah untuk sumber pembiayaan negara. Namun, berdasarkan definisi yang disampaikan oleh DSN, peneliti menduga adanya suatu kejanggalan yang terjadi dalam skema *ijarah asset to be leased*. Kejanggalan tersebut terjadi karena *underlying asset* yang digunakan dalam skema ini tampak belum sepenuhnya ada.

Di sisi lain, pada poin b pertimbangan DSN dalam menerbitkan fatwa No. 76 dijelaskan bahwa,

“Dalam pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN diperlukan akad *ijarah* yang obyek *ijarah*nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek *ijarah* sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek *ijarah* dilakukan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan”.

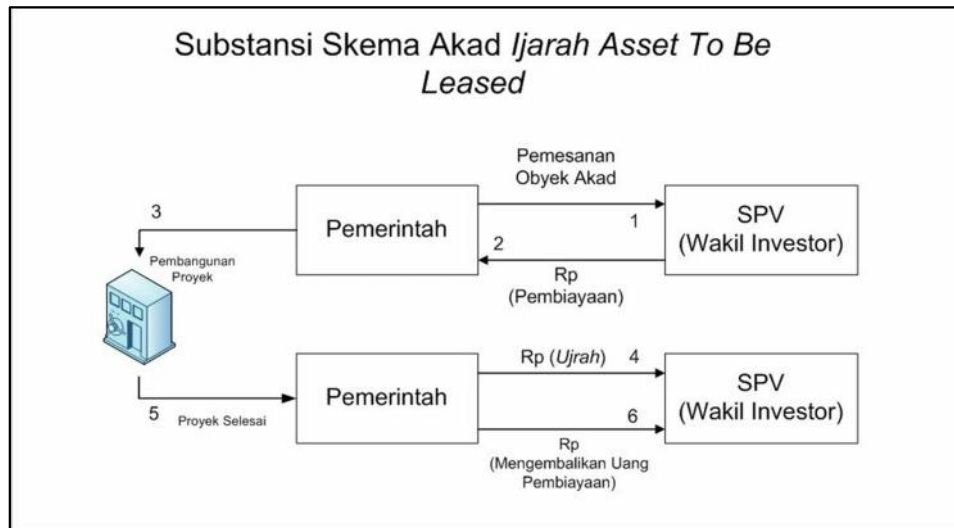
Kemudian pada memorandum informasi SBSN seri SR-008 dijelaskan bahwa definisi dari proyek adalah,

“Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Penjelasan di atas menguatkan dugaan peneliti bahwa *underlying asset* memang belum sepenuhnya ada. Sehingga transaksi yang terjadi adalah SPV memberikan pendanaan kepada pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek

pembangunan pemerintah. Guna memahami lebih lanjut, substansi skema *ijarah asset to be leased* akan terlihat pada Gambar 6.6 berikut ini.

Gambar 6.6
Substansi Skema *Ijarah Asset To Be Leased*



Sumber: Olahan Penulis, 2016.

Penjelasan Gambar 6.6 tentang substansi skema *ijarah asset to be leased*:

1. Pemerintah mengabarkan kepada SPV bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan proyek.
2. SPV memberikan sejumlah uang untuk pembiayaan.
3. Pemerintah melakukan pembangunan proyek yang telah direncanakan.
4. Pemerintah memberikan imbal hasil berupa *ujrah* kepada SPV.
5. Pembangunan proyek telah terselesaikan.
6. Pemerintah mengembalikan sejumlah uang sebesar nilai pembiayaan yang diberikan pada awal transaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka substansi akad *ijarah asset to be leased* adalah sejatinya SPV memberikan pembiayaan kepada pemerintah. Hal ini

menarik untuk dikaji karena dalam syariat Islam juga mengenal istilah pembiayaan. Apakah keduanya sama? Guna memahami lebih lanjut simak pembahasan berikut.

Ilmu *fikih muamalah* juga mengenal istilah pembiayaan. Pembiayaan tersebut adalah pembiayaan untuk kegiatan kerja sama bisnis. Atas kegiatan kerja sama tersebut akan memperoleh keuntungan maupun kerugian. Keuntungan merupakan imbalan atas kesiapan menanggung kerugian (Zaky, 2015:68). Kemudian kedua belah pihak akan menanggung risiko yang setara dengan usaha yang dilakukan.

Konsep pembiayaan dalam ilmu *fikih muamalah* terdapat 2 jenis, Zaky (2014) menjelaskan di antaranya:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Kemudian kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.
- b. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/modal dan kerja. Kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal.

Kedua konsep tersebut berbeda dengan pembiayaan yang terjadi pada skema *ijarah asset to be leased*. Berdasarkan Gambar 6.6 tampak bahwa imbal hasil (*ujrah*) yang diberikan oleh pemerintah terjadi sebelum proyek selesai. Kemudian SPV maupun investor diuntungkan karena tidak menanggung risiko sama sekali. Sehingga skema *ijarah asset to be leased* berbeda dengan model pembiayaan dalam ilmu *fikih muamalah*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa skema *ijarah asset to be leased* merupakan transaksi pendanaan (utang-piutang).

Transaksi utang-piutang akan menimbulkan risiko kepatuhan syariah jika terdapat tambahan manfaat atas utang tersebut. Sehingga transaksi SBSN dengan akad *asset to be leased* secara substansi memiliki risiko adanya praktik riba. Hal ini terjadi karena adanya manfaat yang didapatkan SPV (*'ujrah*) atas transaksi pendanaan (utang-piutang) yang terjadi.

Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan skema *sale and lease back*, pemerintah dan SPV melakukan perjanjian *sale and purchase undertaking* untuk menerbitkan SBSN. Perjanjian ini juga dilakukan pada skema *ijarah asset to be leased*. Perjanjian ini memberikan dampak secara substansi bahwa transaksi yang terjadi secara terikat menjadi jual beli *wafa'* yang tidak diperbolehkan. Jika transaksi ini sangat mendesak untuk dibutuhkan maka persyaratan yang telah dijelaskan pada sub bab *sale and lease back* juga harus terpenuhi. Sehingga hal tersebut harus menjadi pertimbangan utama agar skema yang dibuat tidak dikhawatirkan menerjang konsep Syariat Islam. *Wallahu a'lam*.

6.1.3. *Ijarah al khadamat*

Skema *ijarah al khadamat* merupakan struktur akad yang khas digunakan untuk penerbitan SBSN seri SDHI. Skema ini tidak digunakan untuk seri SBSN yang lain. Menariknya, DSN tidak secara spesifik mengeluarkan fatwa terkait skema *ijarah al khadamat*. Penerbitan SBSN seri SDHI didukung dengan pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh DSN. Oleh karena itu, definisi operasional terkait skema *ijarah al khadamat* tidak dijelaskan oleh DSN tetapi hal tersebut dijelaskan oleh DPS.

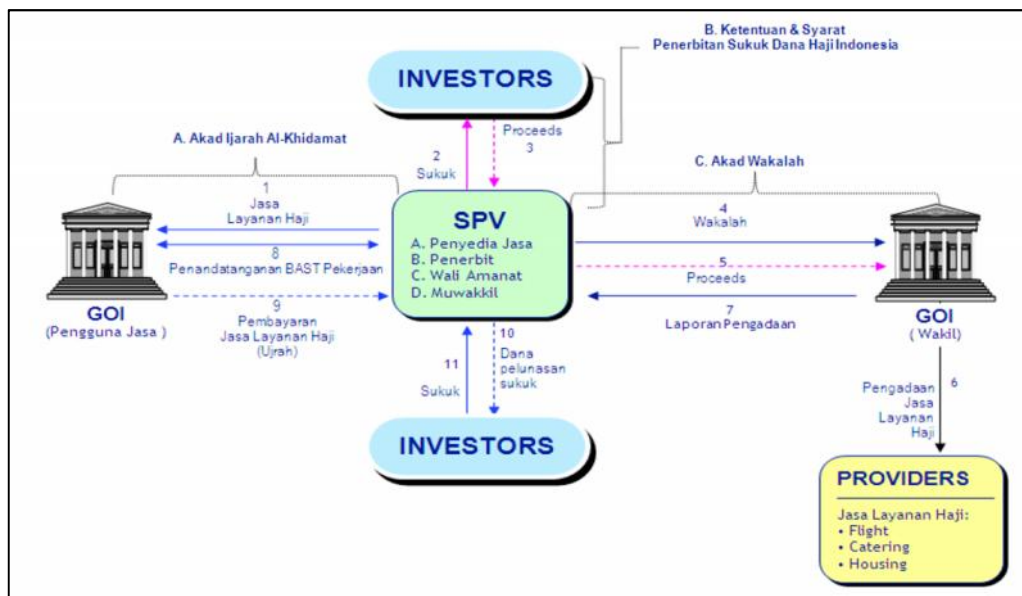
DPS (2010) menjelaskan bahwa,

“Ijarah Al-Khadamat adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan fee atas

penyediaan jasa dimaksud, sehingga pemegang *sukuk* menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan *fee* atas penyediaan jasa tersebut”.

Selanjutnya, DPS (2013) menjelaskan bahwa, “Jasa yang digunakan sebagai *underlying asset* adalah jasa penyediaan layanan haji, yang meliputi: jasa penerbangan, katering dan penginapan”. Skema akad *ijarah al khadamat* tampak pada Gambar 6.7.

Gambar 6.7
Skema Akad Ijarah Al-Khadamat



Sumber: DPS, 2010.

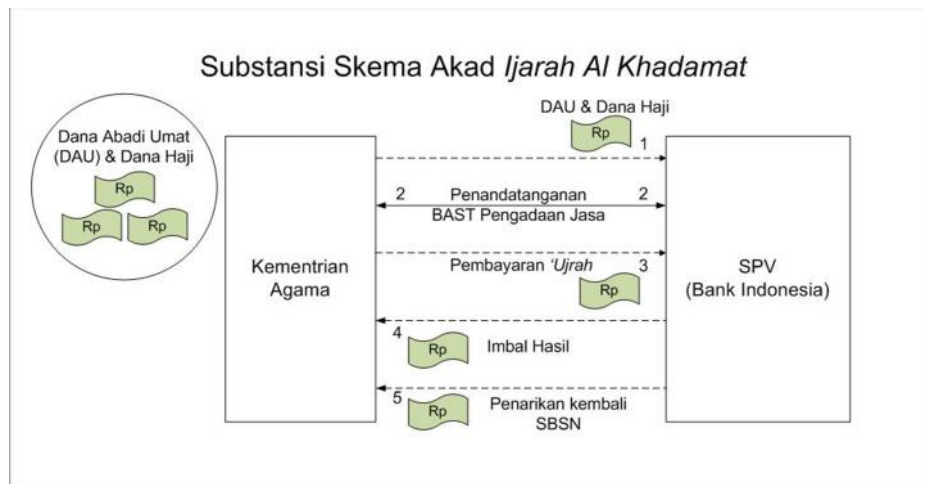
Penjelasan Gambar 6.7 tentang akad *ijarah al khadamat* :

1. SPV menyediakan *underlying asset* berupa jasa layanan haji.
2. SPV menerbitkan SBSN untuk dijual kepada investor (Kementerian Agama).
3. Kementerian Agama (investor) menyetorkan sejumlah uang untuk membeli SBSN.
4. SPV mewakilkan kepada pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk menyediakan jasa layanan haji.

5. SPV memberikan sejumlah uang kepada Kementerian Keuangan untuk mengadakan jasa layanan haji.
6. Kementerian Keuangan menghubungi pihak penyedia.
7. Kementerian Keuangan memberikan laporan pengadaan kepada SPV.
8. SPV dengan Kementerian Agama (pengguna jasa) menandatangani BAST proyek.
9. Kementerian Agama membayar sejumlah uang untuk jasa yang diberikan SPV yang dibayarkan setiap periode tertentu.
10. SPV menarik kembali SBSN dari Kementerian Agama dengan membayar sejumlah uang.
11. SBSN ditarik kembali oleh SPV.

Berdasarkan penjelasan di atas, skema penerbitan SDHI memiliki 2 akad, yaitu akad *ijarah al khadamat* dan *wakalah*. Akad *wakalah* dilakukan antara SPV dengan Kementerian Keuangan. Tujuan akad ini adalah untuk melimpahkan wewenang pengadaan jasa haji kepada kementerian keuangan. Sedangkan akad *ijarah al khadamat* dilakukan antara Kementerian Agama dengan SPV. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan Dana Abadi Umat (DAU) dan dana haji pada SBSN. Sehingga inti skema *ijarah al khadamat* sejatinya melibatkan 3 pihak utama, Kementerian Agama, SPV (Bank Indonesia), dan Kementerian Keuangan. Akan tetapi, kementerian keuangan hanya berperan sebagai pihak pembantu dari SPV yang menyediakan jasa haji. Skema inti praktik *ijarah al khadamat* disajikan pada Gambar 6.8 berikut.

Gambar 6.8
Skema inti *ijarah al khadamat*



Sumber: Olahan Penulis, 2017.

Penjelasan Gambar 6.8 tentang skema inti akad *ijarah al khadamat*:

1. Kementerian agama menyerahkan sejumlah uang Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Haji kepada SPV (Bank Indonesia) untuk pembelian SBSN.
2. Setelah Kementerian keuangan berhasil membantu SPV mengadakan jasa haji, kementerian agama dan SPV melakukan penandatanganan BAST pengadaan jasa haji.
3. Kementerian agama memberikan '*ujrah*' (upah) kepada SPV atas jasanya mengadakan jasa layanan haji.
4. Kementerian agama mendapatkan imbal hasil karena investasinya pada SBSN SDHI.
5. SPV menarik SBSN dari kementerian agama dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal pembelian awal.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat hal yang menarik pada skema *ijarah al khadamat* untuk dicermati. Pihak yang berperan sebagai investor dan

Government on Investment (pengguna jasa) adalah pihak yang sama, yaitu kementerian agama. Sebagaimana Haura (2010:41) mengatakan bahwa “kementerian agama berperan sebagai investor”. Sebagaimana kebutuhan kementerian agama atas jasa layanan haji maka kementerian agama memiliki 2 peran, yaitu sebagai pengguna jasa dan investor. Oleh karena itu, kementerian agama memiliki kewajiban untuk membayar ‘*ujrah* dan memperoleh imbal hasil. Akan tetapi, imbal hasil tersebut bukan untuk keuntungan pemerintah tetapi kembali menjadi penambah Dana Abadi Umat (DAU).

Imbal hasil tersebut selanjutnya akan dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk subsidi layanan. Zuraya (2013) mengutip penjelasan Suryadharma Ali bahwa “Penempatan dana haji ini akan dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi pelayanan misalnya untuk pemondokan, katering, dan transportasi”. Sehingga jamaah haji mendapatkan pemotongan biaya untuk keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Faisol (2015) menjelaskan bahwa setiap jamaah haji mendapat subsidi dari pemerintah sebanyak Rp24 juta, dimana jamaah haji seharusnya membayar biaya sebesar Rp61 juta menjadi Rp37 juta.

Di sisi lain, peneliti mencermati meskipun skema *ijarah al khadamat* terjadi antara 2 pihak saja (kementerian agama dan SPV), hal tersebut tidak mengandung unsur *ba’i al ‘inah* maupun *ba’i al wafa’*. Alasannya, jasa layanan yang digunakan sebagai *underlying asset* disediakan terlebih dahulu oleh SPV. Kemudian kementerian agama menggunakan jasa layanan untuk pengelolaan haji. Selanjutnya, atas penggunaan jasa layanan tersebut kementerian agama membayar ‘*ujrah*. Sehingga transaksi yang terjadi adalah transaksi ‘*ijarah* (sewa) yang tepat.

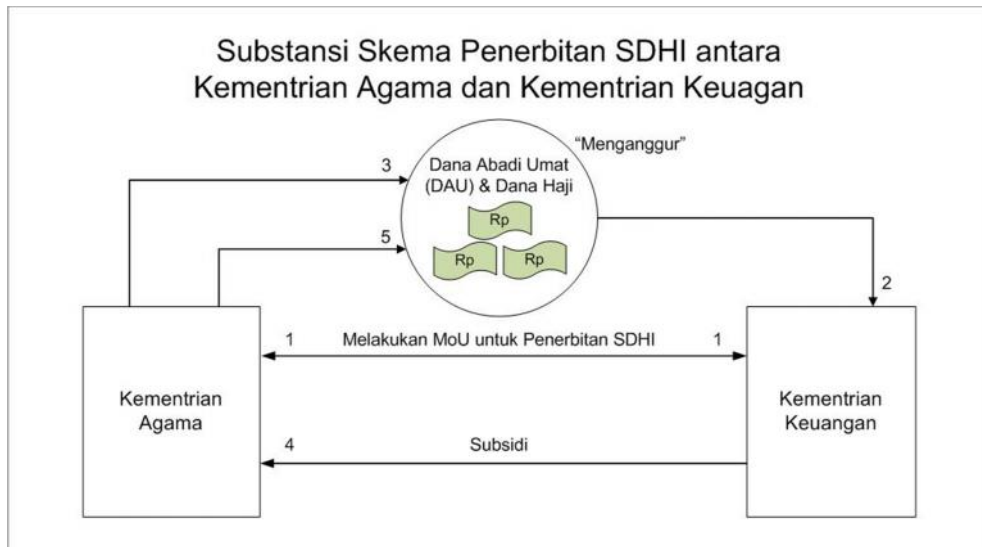
Kemudian perlu kiranya untuk mencermati alasan dibalik penerbitan SBSN seri SDHI yang dilakukan kementerian agama dan kementerian keuangan secara *private placement*. Pada dasarnya, kementerian keuangan mencoba untuk membuat berbagai alternatif sumber pembiayaan APBN. Semakin bervariasinya alternatif sumber pembiayaan maka kementerian keuangan akan semakin mudah untuk menutup defisit APBN.

Kementerian keuangan melihat potensi besar pada sektor haji Indonesia, dimana kementerian agama memiliki dana haji dan pokok Dana Abadi Umat (DAU) yang “menganggur”. Di lain pihak, Sholihin (2010:211) menjelaskan bahwa “pokok DAU tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk investasi sedangkan bunganya boleh dimanfaatkan”. Karena pokok DAU hanya “menganggur” maka kementerian keuangan membuat skema SBSN *ijarah al khadamat* dengan mengombinasikan akad *wakalah*. Sehingga, secara aturan hukum formal, dana haji dan DAU dapat digunakan secara sah oleh kementerian keuangan untuk keperluan pembiayaan defisit APBN.

Langkah kementerian keuangan untuk membuat skema SBSN seri SDHI merupakan solusi yang tepat. Alasannya, dana sebesar puluhan triliun dapat dimanfaatkan oleh kementerian keuangan untuk menutup defisit APBN. Sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan semakin membaik.

Akan tetapi, skema penerbitan SDHI (Gambar 6.7) mengindikasikan bahwa kementerian keuangan sejatinya “meminjam” dana yang “menganggur” dari kementerian agama untuk digunakan sebagai pembiayaan defisit APBN. Skema inti yang terjadi antara kementerian agama dan kementerian keuangan dalam penerbitan SBSN seri SDHI tampak pada Gambar 6.9 berikut ini.

Gambar 6.9
Substansi skema penerbitan SDHI
antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan



Sumber: Olahan penulis, 2017.

Penjelasan Gambar 6.9 tentang substansi penerbitan SDHI antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan:

1. Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan melakukan perjanjian MoU untuk menempatkan DAU dan Dana Haji pada SDHI.
2. DAU dan Dana Haji “dimanfaatkan” oleh Kementerian Keuangan untuk menutup defisit anggaran APBN.
3. Pembayaran atas ‘ujrah yang dibayarkan oleh Kementerian Agama akan menambah DAU dan Dana Haji.
4. Kementerian Keuangan mengembalikan DAU dan Dana Haji dalam bentuk subsidi yang diberikan kepada Kementerian Agama setiap pemberangkatan haji.
5. Pengembalian dalam bentuk subsidi menambah kembali pos DAU dan Dana Haji Kementerian Agama.

Berdasarkan skema tersebut, jika benar kementerian keuangan meminjam dana “menganggur” kementerian agama maka konsekuensinya adalah kementerian agama tidak diperkenankan untuk menerima manfaat apapun dari kementerian keuangan. Alasannya, akad utang-piutang tidak boleh mendapatkan manfaat dalam bentuk apapun. Jika akad utang-piutang memperoleh suatu manfaat maka akad tersebut menjadi akad yang mengandung riba. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 yaitu riba *dayn*. Namun, peneliti dalam hal ini memiliki keterbatasan, dimana peneliti tidak mendapatkan referensi untuk dapat menelusuri isi dari MoU yang dilakukan kementerian agama dan kementerian keuangan. Sehingga peneliti tidak dapat memastikan apakah dalam skema penggunaan DAU dan dana haji oleh kementerian keuangan mengandung unsur riba atau tidak.

6.1.4 Wakalah

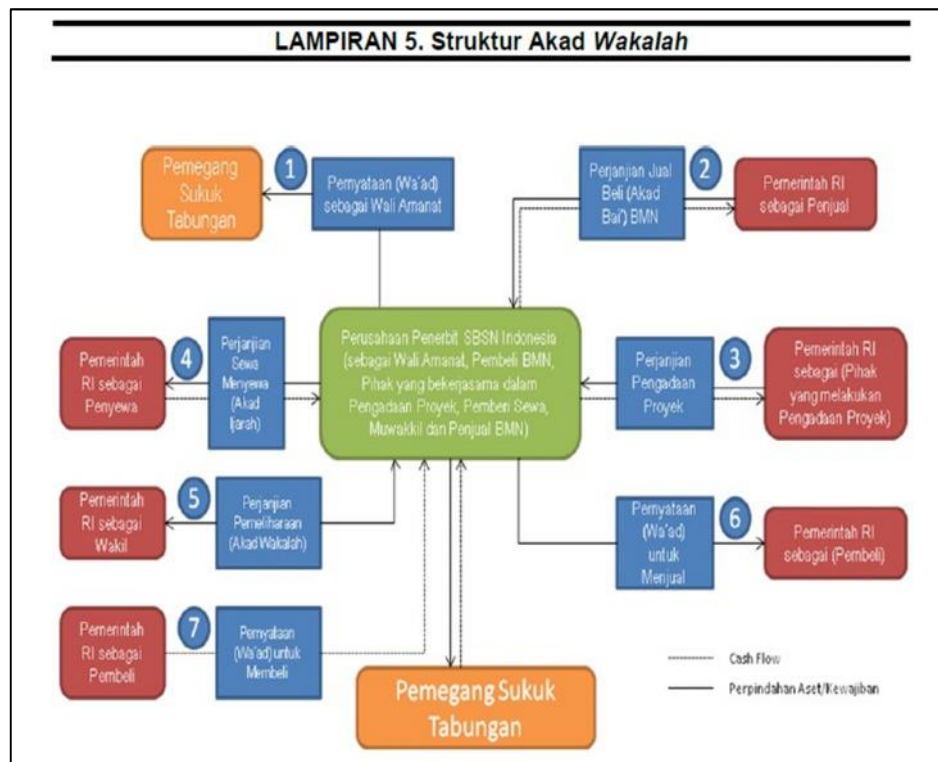
DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 95 tahun 2014 tentang SBSN *wakalah*. Fatwa tersebut menjadi dasar bagi dunia praktik untuk memunculkan seri SBSN menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (DSN, 2000). DSN mendefinisikan SBSN *wakalah* sebagai “SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN selaku wakil dari pernegang SBSN”.

Akad *wakalah* pada SBSN pertama kali digunakan pada seri SNI-24. Penetapan akad ini menginspirasi pembentukan produk baru yaitu SBSN seri ST-001 yang terbit di tahun 2016. Penetapan skema *wakalah* pada SBSN dilakukan

untuk menyediakan alternatif struktur SBSN yang memiliki fleksibilitas pada penggunaan akad dan menghemat penggunaan *underlying asset* berupa aset BMN.

Skema akad *wakalah* pada SBSN tampak pada Gambar 6.10 berikut.

Gambar 6.10
Skema akad *wakalah*



Sumber: Kemenkeu, 2016b.

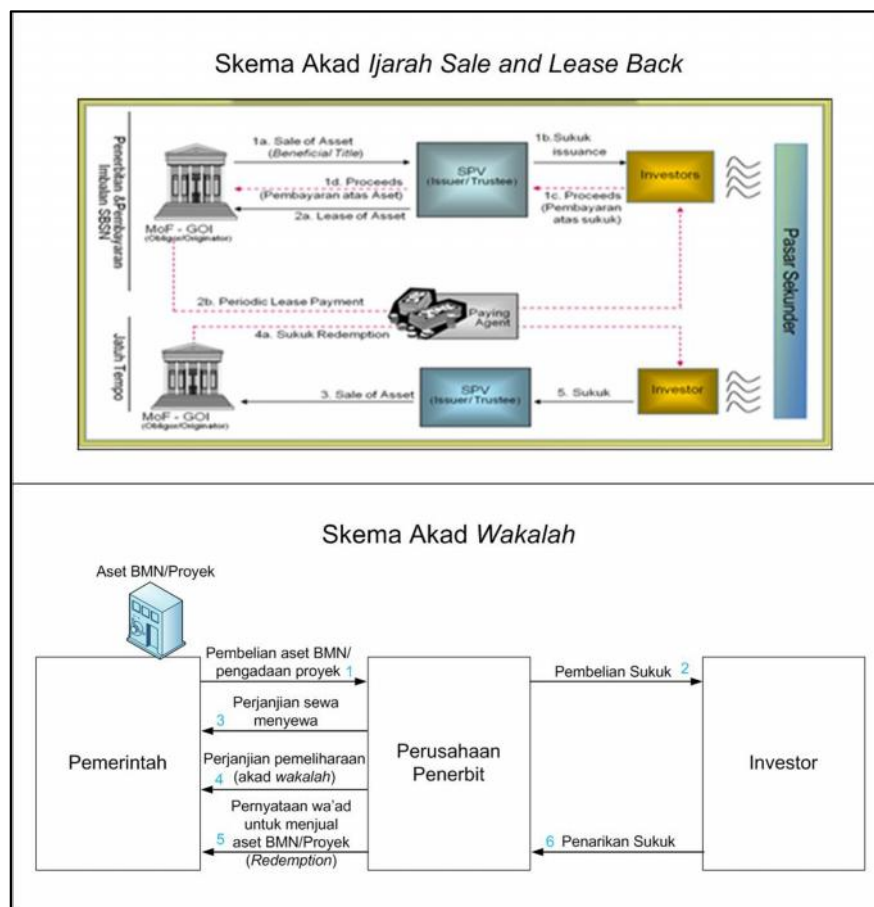
Penjelasan Gambar 6.10 tentang skema akad *wakalah*:

1. Pemegang sukuk (investor) membeli sukuk. Perusahaan penerbit SBSN menyatakan diri sebagai wali amanat bagi pemegang sukuk untuk mengelola hasil penerbitan SBSN.
2. Perusahaan penerbit SBSN melakukan perjanjian jual beli aset BMN dengan pemerintah.

3. Perusahaan penerbit SBSN melakukan perjanjian pengadaan proyek dengan pemerintah serta menunjuk pemerintah sebagai wakil untuk proses pengadaan proyek.
4. Pemerintah (sebagai pihak penyewa) melakukan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) dengan perusahaan penerbit SBSN dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*))
5. Perusahaan penerbit mewakilkan kewajiban pemeliharaan aset kepada pemerintah (sebagai pihak penyewa).
6. Perusahaan penerbit SBSN melakukan pernyataan *wa'ad* untuk menjual aset BMN atau proyek kepada pemerintah
7. Pemerintah melakukan pernyataan *wa'ad* untuk membeli aset BMN atau proyek kepada perusahaan penerbit.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa skema yang digunakan tidak jauh berbeda dengan skema *sale and lease back*. Kemiripan model akad dan perbedaannya disajikan dalam Gambar 6.11 berikut.

Gambar 6.11
Perbandingan Skema *Sale and Lease Back* dengan *Wakalah*



Sumber: Olahan Penulis, 2017.

Perbedaan akad *wakalah* dengan *sale and lease back* hanya terletak pada kewajiban pemeliharaan yang diwakilkan dan *underlying asset* dapat bersifat kombinasi antara aset BMN dan proyek. Perbedaan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap konsekuensi akad. Sehingga karena kemiripan tersebut, skema *wakalah* juga memiliki masalah yang sama sebagaimana yang terjadi pada skema *sale and lease back* yang telah dibahas pada sub bab 6.1.1. Karena akad *wakalah* ini digunakan pada seri ST dan tampak kemiripan dengan *sale and lease back* pada seri SR maka perbedaan antara seri ST dengan SR akan disajikan pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Perbandingan Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel

	Sukuk Tabungan	Sukuk Ritel
Jangka Waktu	2 tahun	3 tahun
Minimal Pemesanan	Rp 2 juta	Rp 5 juta
Maksimal Pemesanan	Rp 5 miliar	Rp 5 miliar
Perdagangan di Pasar Sekunder (<i>Tradability</i>)	<i>Non-tradable</i>	<i>Tradable</i> setelah <i>holding period</i>
Fasilitas <i>Early Redemption</i>	Ada, dilaksanakan pada saat pembayaran kupon ke-12	Tidak ada
Maksimum <i>Early Redemption</i>	50% dari kepemilikan	Tidak ada
Minimum Kepemilikan Untuk Melakukan <i>Early Redemption</i>	Rp 4 juta (dengan minimum unit yang dilakukan <i>early redemption</i> n Rp 2 juta/2 unit)	Tidak ada
Kupon/Imbalan	<i>Fixed rate</i> s.d. jatuh tempo	<i>Fixed rate</i> s.d. jatuh tempo
Manfaat Instrumen	Tabungan investasi	Instrumen investasi

Sumber: DPS, 2016b.

Namun demikian, hal menarik untuk dicermati terjadi pada *underlying asset* berupa proyek. Perusahaan penerbit mewakili kembali proses pengadaan proyek kepada pemerintah untuk digunakan sebagai objek *ijarah*. Tujuannya adalah agar proyek yang dilakukan jenis, nilai, dan spesifikasinya sesuai. Hal ini dilakukan karena pemerintah memiliki rencana pengadaan proyek. Namun, perusahaan penerbit tidak dapat mengadakan proyek tersebut karena khawatir jenis, nilai, dan spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Sehingga untuk menghindari kesalahan pengerjaan proyek maka perusahaan penerbit melimpahkan kembali pengadaan proyek kepada pemerintah menggunakan akad *wakalah*.

Peneliti mencermati bahwa objek transaksi belum ada pada saat akad dilaksanakan. Sehingga masalah ini sama dengan masalah yang terjadi pada

skema *ijarah asset to be leased* (sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab 6.1.3). Jika yang dimaksudkan pemerintah adalah untuk melakukan pendanaan pengadaan proyek maka hal tersebut berbeda dengan konsep pendanaan/pembiayaan pada konsep *fikih muamalah*. Sehingga yang terjadi adalah transaksi utang-piutang.

Transaksi tersebut memberikan risiko adanya praktik riba jika terdapat manfaat yang didapatkan oleh pemberi utang (investor). Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh investor berupa *fee ijarah* yang dibayarkan pemerintah untuk pemeliharaan proyek. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa secara substansi pengadaan proyek pada skema *wakalah* juga memiliki masalah sebagaimana yang terjadi pada skema *ijarah asset to be leased*. Selain itu, akad *ijarah* yang terjadi proyek secara substansi juga memiliki masalah. Alasannya, pada saat terjadi akad *ijarah* atas proyek, proyek yang digunakan sebagai objek akad belum ada.

Perlu dicermati bahwa, di antara rukun *ijarah* salah satunya adalah manfaat objeknya dapat dirasakan. Zaky (2014;94) menjelaskan rukun *ijarah* ada 3, yaitu *ijab qabul*, pihak yang bertransaksi, dan objek. Pertama, *ijab qabul* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain. Kedua, pihak yang bertransaksi adalah pemberi sewa dan pengguna jasa. Ketiga, objek adalah manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Apabila ada rukun *ijarah* tidak terpenuhi maka transaksi *ijarah* menjadi tidak sah. Sehingga akad *ijarah* pada skema *wakalah* ini secara substansi akad *ijarah* dinyatakan batal/tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, secara substansi skema akad *wakalah* ini sama dengan skema akad *sale and lease back* dan *ijarah asset to be leased*. Sehingga semua masalah

yang terjadi pada kedua akad tersebut juga terjadi pada akad *wakalah* ini. Masalah-masalah tersebut telah dijelaskan pada sub bab 6.1 dan 6.2. Sehingga perlu dilakukan pengajian ulang terkait dengan kebolehan penggunaan skema akad ini. Kebolehan penggunaan akad harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah dibahas pada sub bab 6.1.

6.2. Sintesis

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum strukturisasi akad pada penerbitan SBSN memiliki risiko kepatuhan syariah. Pada dasarnya, risiko yang terjadi secara umum hampir sama tetapi terdapat masalah yang khas pada setiap akad. Risiko kepatuhan syariah yang terjadi akan dijelaskan pada setiap akad berikut ini:

6.2.1. *Ijarah Sale and Lease Back*

Skema *ijarah sale and lease back* memiliki risiko kepatuhan syariah karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Terdapat beberapa pendapat ahli terkait kemungkinan adanya ketidakpatuhan syariah, yaitu adanya aspek jual beli '*inah*. Pendapat pertama yang menyatakan adanya jual beli *inah* adalah karena objek dan pihak yang bertransaksi adalah sama. Tarmizi (2014:452) mengatakan bahwa skema *ijarah sale and lease back* memiliki unsur jual beli '*inah* yang terlarang. Sedangkan, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa *sale and lease back* hukumnya adalah boleh. Alasannya, peneliti mengamati terdapat perbedaan pada transaksi awal yang terjadi. Transaksi awal jual beli '*inah* adalah jual beli tangguh (kredit). Sedangkan akad *ijarah sale and lease back*, transaksi awal yang terjadi adalah jual beli tunai. Kemudian pembeda yang lain terletak pada kepemilikan objek

akad. Objek akad pada transaksi '*inah* adalah milik pemberi uang. Sedangkan pada transaksi *ijarah sale and lease back* adalah milik penerima uang. Kemudian dalam praktik SBSN, pihak yang membutuhkan uang adalah pemerintah. Sedangkan pada jual beli '*inah* pihak yang membutuhkan uang adalah pihak kedua. Oleh karena itu, ketiga perbedaan itulah yang membuat kedua jenis transaksi ini berbeda. Karena alasan tersebut maka skema *ijarah sale and lease back* tidak mengandung unsur jual beli '*inah*. Namun perlu dicermati bahwa risiko kepatuhan syariah tetap ada jika model ini diterapkan pada penerbitan SBSN. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzariah*.

- b. Skema transaksi ini memiliki risiko jual beli *wafa'* sebagai akibat dari pihak-pihak yang terlibat tidak terpisah secara substansi. Kemudian hal ini ditunjang dengan adanya perjanjian *sale and purchase undertaking*.
- c. Skema transaksi ini memunculkan risiko adanya siasat atas transaksi riba. Siasat riba terjadi karena keberadaan perjanjian *sale and purchase undertaking* yang menyebabkan transaksi menjadi jual beli *wafa'*. Akibat dari adanya jual beli *wafa'* maka substansi jual beli menjadi hilang. Karena substansi jual beli menjadi hilang maka transaksi menjadi transaksi utang-piutang. Sehingga setiap manfaat dari setiap utang-piutang maka statusnya adalah riba.

6.2.2. *Ijarah Asset to be Leased*

Pada dasarnya skema *ijarah asset to be leased* memiliki kesamaan dengan skema *ijarah sale and lease back*. Sehingga skema *ijarah asset to be leased* memiliki beberapa risiko yang sama. Skema transaksi ini juga memiliki risiko jual beli *wafa'* dan adanya siasat atas transaksi riba sebagaimana telah dibahas pada

poin 6.2.1. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan pada skema ini. Hal ini terjadi karena belum adanya *underlying asset* pada saat transaksi dilakukan. Sehingga timbul risiko bahwa substansinya tidak lagi menjadi sewa menyewa akan tetapi menjadi utang-piutang. Meskipun DSN telah mengeluarkan fatwa nomor 101 tahun 2016 tentang *al ijarah al maushufah fi adz-dzimmah* terkait bolehnya penyerahan aset yang tertunda. Namun demikian, perlu dicermati bahwa pembayaran *‘ujrah* harus terjadi ketika kepemilikan aset telah sempurna. Oleh karena itu, tidak boleh ada imbal hasil sebelum kepemilikan aset telah sempurna dan dimanfaatkan. Apabila terjadi pembagian imbal hasil sebelum aset dimanfaatkan maka transaksi yang terjadi bukan *ijarah* yang sebenarnya namun utang-piutang dengan tambahan manfaat. Sehingga transaksi SBSN dengan akad *asset to be leased* secara substansi memiliki risiko adanya praktik riba.

6.2.3. *Ijarah Al-Khadamat*

Pada skema ini, peneliti tidak banyak melakukan analisis. Tidak didapatnya sumber rujukan utama dari kementerian keuangan menjadi penyebab peneliti tidak dapat melakukan analisis secara mendalam. Namun demikian, peneliti mengamati penggunaan dana antara kementerian agama dan kementerian keuangan dilakukan dengan menggunakan skema utang-piutang. Sehingga perlu untuk diwaspadai terkait adanya tambahan manfaat yang diperoleh kementerian agama. Jika terdapat tambahan manfaat maka dapat dipastikan terdapat risiko adanya unsur riba. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak terjadi maka transaksi murni sebagai utang-piutang semata.

6.2.4. Wakalah

Skema *wakalah* memiliki risiko kepatuhan syariah karena substansi dari skema *wakalah* tidak jauh berbeda dengan skema *ijarah sale and lease back* dan *ijarah asset to be leased*. Pada dasarnya, skema *wakalah* ini merupakan kombinasi dari kedua akad tersebut yang dijadikan dalam 1 model skema. Masalah yang lain terjadi pada akad *ijarah* dengan *underlying* asset berupa proyek. Akad *ijarah* tersebut sejatinya batal. Alasannya adalah objek *ijarah* belum ada pada saat akad tersebut dilakukan.

BAB VII

PENENTUAN IMBAL HASIL DAN JAMINAN PEMERINTAH

“Qana’ah (merasa cukup dengan pemberian Allah) adalah harta yang tidak akan pernah sirna”
[Ibnu Abbas]

Bab 7 ini akan membahas tentang bagaimana penentuan imbal hasil penerbitan SBSN yang akan diterima oleh para investor. Pada dasarnya peneliti ingin menampilkan keseluruhan model penentuan imbal hasil pada setiap seri. Namun karena keterbatasan data, peneliti hanya akan menampilkan beberapa model penentuan imbal hasil sebagai sampel, yaitu pada seri SR-007, SR-008, dan ST-001.

Pada bab 4 telah dijelaskan bahwa terdapat 2 model skema penentuan imbal hasil, yaitu model *fix rate* dan diskonto. Berdasarkan sampel yang diambil, peneliti mencermati adanya kesamaan model, yaitu *fix rate*. Sehingga pada bab ini peneliti akan berfokus pada pembahasan tentang model *fix rate*. Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang model *fix rate* skema SR-007 akan disajikan dalam Gambar 7.1 berikut.

Gambar 7.1
Penentuan Imbal Hasil pada skema SR-007

Ilustrasi Perhitungan Sukuk Negara Ritel			
Sukuk Negara Ritel Seri SR-006			
Tanggal Penerbitaan	:	5 Maret 2014	
Tanggal Jatuh Tempo	:	5 Maret 2017	
Imbalan/Kupon	:	8,75% per tahun	
Investor A			
Investor A membeli SR di pasar perdana pada tanggal 5 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan imbalan/kupon 8,75% per tahun dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo 5 Maret 2017 (3 tahun / 36 bulan). Hasil yang diperoleh adalah:			
Imbalan/Kupon per bulan (sebelum pph 15%)	$Rp\ 10.000.000 \times 8,75\% \times 1/12$	= Rp	72.916,67
Imbalan/Kupon per bulan (setelah PPh 15 %)	$Rp\ 72.916,67 - (15\% \times Rp\ 72.916,67)$	= Rp	61.979,17
Pendapatan imbalan/kupon yang diperoleh sampai dengan jatuh tempo	$Rp\ 61.979,17 \times 36$	= Rp	2.231.250
Prinsipal yang diterima pada saat jatuh tempo	$Rp\ 10.000.000 \times 100\%$	= Rp	10.000.000
Total pendapatan yang diterima selama memegang SR	$Rp\ 10.000.000 + Rp\ 2.231.250$	= Rp	12.231.250

Sumber: Trimegah, 2014.

Penjelasan: Investor A membeli SR di pasar perdana senilai Rp10.000.000. Imbal hasil yang akan didapatkan adalah sebesar 8,75% per tahun. Investor A menahan SR-nya hingga akhir masa jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan perhitungan dari skema SR-007 maka pada saat jatuh tempo investor A akan menerima imbal hasil sebesar Rp2.231.250.

Imbal hasil dengan model *fix rate* skema SR-008 ditentukan dari persentase imbal hasil 8,3% yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dikalikan dengan periode imbal hasil dikalikan dengan nilai nominal investasi. Penentuan imbal hasil akan disajikan pada Gambar 7.2 berikut.

Gambar 7.2
Penentuan Imbal Hasil pada skema SR-008

VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL	
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	
Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.	
Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.	
Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ditetapkan sebesar 8,30% (delapan koma tiga puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.	
Imbalan/Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp6.917,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah) dari $8,30\% \times \frac{1}{12} \times \text{Rp1.000.000,00}$ (satu juta Rupiah).	

Sumber: Kemenkeu, 2016a.

Penjelasan: Pemerintah secara resmi menerbitkan SBSN Seri SR-008. Kemudian terdapat beberapa calon investor yang berkeinginan untuk memiliki SR-008, salah satunya di antara calon investor tersebut bernama Mukidi. Mukidi membeli SBSN seri SR-008 sebesar Rp1.000.000. Imbalan/kupon yang ditawarkan pemerintah adalah 8,3% per tahun. Masa jatuh tempo SBSN seri SR-

008 adalah 3 tahun. Maka Mukidi akan memperoleh imbal hasil dari SR-008 sebesar,

$$\text{Imbal hasil per bulan} = 8,3\% \times \frac{1}{1} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}6.917$$

$$\text{Imbal hasil hingga akhir jatuh tempo} = \text{Rp}6.917 \times 12 \times 3 = \text{Rp}249.012.$$

Sehingga total pendapatan yang akan diterima oleh Mukidi selama memegang SR-008 hingga jatuh tempo adalah sebesar Rp249.012 (nilai ini tidak termasuk pajak).

Imbal hasil dengan model *fix rate* skema ST-001 ditentukan dari persentase imbal hasil 6,9% yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dikalikan dengan periode imbal hasil dikalikan dengan nilai nominal investasi. Penentuan imbal hasil akan disajikan pada Gambar 7.3 berikut.

Gambar 7.3
Penentuan Imbal Hasil pada skema ST-001

VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL	
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	
Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST-001 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.	
Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST-001 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 7 (tujuh) setiap bulan.	
Imbalan/Kupon per unit Sukuk Tabungan seri ST-001 ditetapkan sebesar 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.	
Imbalan/Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp5.750,00 (lima ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari $6,90\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta Rupiah).	

Sumber: Kemenkeu, 2016b.

Penjelasan: Pemerintah secara resmi menerbitkan SBSN Seri ST-001. Investor Z membeli SBSN seri SR-008 sebesar Rp1.000.000. Imbalan/kupon yang ditawarkan pemerintah adalah 8,3% per tahun. Masa jatuh tempo SBSN seri ST-

001 adalah 2 tahun. Maka investor Z akan memperoleh imbal hasil dari ST-001 sebesar,

$$\text{Imbal hasil per bulan} = 6,9\% \times \frac{1}{1} \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}5.750$$

$$\text{Imbal hasil hingga akhir masa jatuh tempo} = \text{Rp}5.750 \times 12 \times 2 = \text{Rp}138.000.$$

Sehingga total pendapatan yang akan diterima oleh investor Z selama memegang ST-001 hingga jatuh tempo adalah sebesar Rp138.000 (nilai ini tidak termasuk pajak).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, peneliti mencermati bahwa terdapat masalah dalam penentuan imbal hasil. Masalah tersebut terjadi karena imbal hasil yang diberikan kepada investor berdasarkan pada nilai nominal yang diinvestasikan. Di sisi lain, terdapat jaminan dari pemerintah bahwa imbal hasil dan nilai pokok akan tetap 100%. Guna memahami lebih lanjut simak pembahasan pada sub bab 7.1 berikut.

7.1. *Fix rate*

Sebagaimana telah disinggung pada bab 5, imbal hasil seharusnya didasarkan pada hasil yang diperoleh dari *underlying asset* berupa jasa haji dan proyek. Namun, pada praktiknya skema yang digunakan tidak demikian. Metode yang digunakan pada penentuan imbal hasil menggunakan metode *fix rate*.

Pada dasarnya, penggunaan metode ini ditujukan untuk memberikan kepastian kepada para pemegang SBSN terkait jumlah imbal hasil yang didapatkan. Hal ini dilakukan karena berdasarkan konsep *ijarah*, imbal jasa yang diberikan harus jelas ketika akad dilaksanakan. Imbal hasil yang diberikan kepada investor didapatkan dari pendapatan sewa yang didapatkan dari pemerintah atas kegiatan sewa menyewa/*fee* penggunaan atau penyediaan *underlying asset*.

Sehingga pemerintah menggunakan skema di atas untuk memberikan imbal hasil kepada investor.

Namun demikian, perlu untuk dicermati bahwa penetapan imbal hasil telah ditentukan melalui fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menegaskan pembagian hasil usaha didasarkan pada 2 metode, yaitu bagi hasil (*net revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*). Kedua metode tersebut menggunakan dasar pembagian atas hasil usaha. Hal ini merupakan kebalikan dari konsep bunga. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga mendefinisikan bunga (*interest/fa'idah*) sebagai,

“Tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase”.

Oleh karena itu, fatwa tersebut sudah seharusnya untuk menjadi pedoman dalam menentukan imbal hasil suatu usaha/investasi.

Setelah peneliti memahami definisi bunga tersebut, peneliti mencermati adanya persamaan dengan pola penentuan imbal hasil pada SBSN. Persamaan tersebut terletak pada dasar perhitungan imbal hasil menggunakan nilai pokok¹⁰. Sehingga penentuan imbal hasil dengan metode *fix rate* memiliki risiko syariah. Di sisi lain, pemerintah telah menjamin nilai nominal investasi dan imbal hasil (DPS, 2013:13). Undang-undang nomor 19 tahun 2008 pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa “pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan

¹⁰ Dapat dilihat pada Gambar 7.1 sampai Gambar 7.3

penerbit SBSN”. Faktor inilah yang menjadi sumber permasalahan. Penjaminan tersebut memberikan dampak pada substansi akad penerbitan SBSN. Dampaknya adalah substansi akad penerbitan SBSN menjadi akad utang-piutang. Hal ini disebabkan karena nilai nominal investasi akan tetap kembali utuh tanpa mempertimbangkan apakah terjadi kerugian dalam kegiatan investasi tersebut atau tidak¹¹. Padahal, kegiatan investasi seharusnya memiliki konsekuensi untuk terjadinya suatu kerugian. Baits (2016:132) menjelaskan bahwa tidak boleh ada jaminan atas investasi yang dilakukan. DSN MUI juga telah mengeluarkan fatwa nomor 105 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan. DSN (2016) menjelaskan bahwa “pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*¹², *tafrith*¹³ atau *mukhalafat al-syuruth*¹⁴”.

Pada dasarnya, kebanyakan dari penerbitan SBSN menggunakan akad *ijarah*. Akad tersebut merupakan istilah untuk dasar penentuan imbal hasil. Sehingga investor bukan melakukan akad *ijarah* dengan pemerintah akan tetapi transaksi yang terjadi adalah investasi yang imbal hasilnya didapatkan dari *'ujrah*. Namun demikian, ketika suatu investasi tersebut dijamin maka investor tidak akan pernah menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Sehingga hakikat dari transaksi yang terjadi bukan investasi tetapi utang-piutang ditambah dengan manfaat. Guna memahami lebih dalam, ilustrasi imbal hasil SBSN disajikan dalam Gambar 7.4 berikut.

¹¹ Hal ini sama dengan definisi bunga yang telah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

¹² *Ta'addi (ifrath)* adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan.

¹³ *Taqshir (tafrith)* adalah tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan;

¹⁴ *Mukhalafat al-syuruth* adalah melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Gambar 7.4
Imbal Hasil SBSN



Sumber: Olahan penulis, 2017.

Berdasarkan Gambar 7.4, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah meminjam uang kepada investor sebesar Rp100.000.000 dan akan mengembalikan dengan total nilai sebesar Rp110.000.000. Penjelasan ini semakin menegaskan bahwa transaksi penerbitan SBSN bukan merupakan kegiatan investasi yang sebenarnya. Akan tetapi, transaksi yang terjadi adalah utang-piutang yang memperoleh tambahan manfaat¹⁵. Oleh karena itu, pola penentuan imbal hasil dengan metode *fix rate* semakin mengindikasikan bahwa akad yang terjadi adalah utang-piutang yang memperoleh tambahan manfaat. Selanjutnya, Baits (2016:137) menegaskan bahwa “salah satu indikator transaksi riba adalah ketika bagi hasil mengacu pada modal.”. Sehingga segala bentuk akad yang menggunakan pola ini memiliki risiko adanya praktik riba. Jika hal ini terjadi pada semua produk/seri SBSN maka dapat dipastikan semua mengandung risiko terjadi praktik riba. Jika tidak, maka risiko terjadi praktik riba terjadi pada jenis SBSN yang digunakan sebagai sampel.

7.2. Sintesis

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penentuan imbal hasil SBSN menggunakan model *fix rate* memiliki risiko terjadi praktik

¹⁵ Tambahan manfaat yang dimaksudkan adalah adanya imbal hasil yang diterima oleh investor.

riba. Alasannya adalah imbal hasil SBSN ditentukan berdasarkan nilai nominal investasi yang telah dijamin oleh pemerintah. Keberadaan jaminan pemerintah tersebut menyebabkan substansi akad menjadi transaksi utang-piutang. Kemudian pemberi uang (investor) akan tetap mendapatkan imbal hasil tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kerugian kegiatan pemerintah. Hal ini selaras dengan definisi bunga yang telah diharamkan oleh MUI, yaitu tambahan yang diberikan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya kembali merujuk pada metode penentuan imbal hasil yang telah diatur dalam fatwa DSN nomor 15 tahun 2000. Pemerintah dapat menggunakan metode bagi hasil (*net revenue sharing*) atau bagi untung/rugi (*profit loss sharing*). Penerapan kedua metode tersebut dapat dilakukan ketika *underlying asset* setiap akad digunakan dapat menghasilkan, misalnya akad *ijarah asset to be leased* untuk pembangunan jalan tol. Ketika pembangunan jalan tol telah selesai dan beroperasi maka terdapat retribusi yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol. Berdasarkan retribusi tersebut kemudian setelah dikurangi dengan biaya-biaya¹⁶ maka keuntungan atas operasional jalan tol dibagikan kepada pemegang SBSN. Pembagian imbal hasil dapat menggunakan metode bagi hasil¹⁷ maupun bagi untung/rugi¹⁸. Sehingga kepemilikan SBSN tidak berakhir ketika proyek selesai dibangun namun bisa berlanjut sampai *underlying asset* dapat menghasilkan. Inilah yang lebih sesuai dengan konsep *sukuk* yang sesungguhnya, dimana imbal hasil didasarkan pada untung/rugi *underlying asset*.

¹⁶ Biaya pegawai, biaya perawatan, dan lain-lain

¹⁷ Pendapatan dikurangi dengan harga pokok, yaitu laba kotor

¹⁸ pendapat dikurangi dengan beban-beban, yaitu laba/rugi bersih

Kedua metode tersebut lebih aman secara syariah karena keduanya telah mendasarkan penentuan imbal hasil dari hasil usaha yang dilakukan. Sedangkan imbal hasil dengan pola yang dilakukan saat ini masih menggunakan nilai nominal sebagai dasar penentuan.

BAB VIII

PERLAKUAN SUBSTANSI AKUNTANSI SBSN

Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban)...tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya...”
[HR. Tirmidzi no. 2417]

Pada dasarnya, pencatatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) belum memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus yang mengaturnya. Saat ini pemerintah mencatat SBSN pada pos kewajiban. Sehingga dibutuhkan suatu Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) yang mengatur proses transaksi SBSN.

Namun demikian, entitas swasta telah memiliki regulasi yang mengakomodasi adanya transaksi *sukuk*. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah mengeluarkan PSAK 110 tentang akuntansi *sukuk*. PSAK tersebut membagi proses pencatatan akuntansi berdasarkan akad yang digunakan, yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*.

Pada bab ini, peneliti akan fokus membatasi pada pembahasan mengenai proses pencatatan SBSN oleh pemerintah Indonesia. Hal ini peneliti lakukan karena dalam penerbitan SBSN di Indonesia melibatkan beberapa pihak sehingga pembatasan ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak dikhawatirkan melebar.

PSAK 110 membagi perlakuan akuntansi *sukuk* berdasarkan akad yang digunakan. DSAS (2016:110.1) menjelaskan bahwa “pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *sukuk ijarah* dan *sukuk mudharabah*”. Lebih lanjut, DSAS (2016:110.1)

menegaskan bahwa “apabila entitas menerbitkan *sukuk* dengan akad berbeda maka entitas dapat merujuk pernyataan ini sepanjang substansi transaksinya serupa dan PSAK lain yang mengatur akad yang mendasari *sukuk*”. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas akuntansi SBSN berdasarkan akad yang digunakan. Pembahasan mengenai perlakuan akuntansi SBSN disajikan pada sub bab berikut:

8.1. Akad *ijarah sale and lease back*

8.1.1. Substansi Akuntansi Penerbitan

Akad *ijarah sale and lease back* adalah akad pertama kali yang digunakan pada penerbitan SBSN di Indonesia. Akad ini menggunakan dasar akad *ijarah* untuk pengelolaannya. Sehingga perlakuan akuntansi akad ini dapat merujuk pada perlakuan akuntansi yang dijelaskan dalam PSAK 110 untuk *sukuk ijarah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh DSAS (2016:110.1) bahwa “apabila entitas menerbitkan *sukuk* dengan akad berbeda maka entitas dapat merujuk pernyataan ini sepanjang substansi transaksinya serupa”.

Tahap awal pada proses pencatatan akuntansi adalah pengakuan dan pengukuran. Pada entitas swasta, PSAK 110 menyatakan ketika entitas menerbitkan *sukuk ijarah* maka entitas tersebut harus mengakuinya pada saat *sukuk* diterbitkan dan sebesar nilai nominal. Apabila terdapat nilai premium/diskonto maka harus disesuaikan. DSAS (2016:110.2) menjelaskan bahwa,

Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan penerbitan *sukuk*. *Sukuk ijarah* diakui sebesar nilai nominal dan disesuaikan dengan premium/diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.

Ketika pemerintah menerbitkan SBSN dengan akad *ijarah sale and lease back*, pemerintah mengakuinya pada saat pertama kali transaksi (Kemenkeu, 2015b:56). Pemerintah juga mengakui penerbitan SBSN akad *ijarah sale and lease back* sebesar nilai nominal. Kemenkeu (2015b:56) menjelaskan bahwa “kewajiban dicatat sebesar nilai nominal”. Pemerintah menempatkan SBSN pada pos kewajiban. Sehingga penerbitan SBSN diakui sebesar nilai nominal.

Sebagaimana penjelasan di atas, pemerintah telah melakukan proses pengakuan SBSN sesuai dengan PSAK 110. SBSN telah diakui pada saat SBSN diterbitkan dan diakui sebesar nilai nominal. Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah apabila pemerintah ingin merujuk pada PSAK 110 maka nilai nominal SBSN harus dapat mencerminkan nilai fisik aset yang digunakan sebagai *underlying asset*. Alasannya, DSAS (2016:110.2) menjelaskan bahwa “*sukuk* merupakan sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan hak pemilik (investor) atas kepemilikan fisik aset, manfaat atas aset, proyek tertentu, atau jasa tertentu”. Sedangkan akad *ijarah sale and lease back* identik dengan *underlying asset* berupa aset Barang Milik Negara (BMN). Oleh karena itu, SBSN harus dapat mencerminkan nilai fisik aset BMN.

Setelah *sukuk* diakui dan diukur maka tahap selanjutnya adalah penyajian. PSAK 110 menyatakan bahwa *sukuk ijarah* disajikan sebagai kewajiban/liabilitas pada laporan posisi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh DSAS (2016:110.3) bahwa “*sukuk ijarah* disajikan sebagai liabilitas dan disesuaikan jika menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka panjang dan jangka pendek”.

Pada tahap penyajian, penerbitan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah telah disajikan dalam laporan posisi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemenkeu (2015b:55) bahwa,

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, utang obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), utang pembelian cicilan, dan utang jangka panjang lainnya.

Namun demikian, SBSN disajikan tidak terpisah dengan SBN konvensional.

Ilustrasi penyajian SBSN disajikan pada Gambar 8.1 berikut.

Gambar 8.1
Penyajian SBSN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.36	4.930.416.680.238	2.679.231.919.973
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.37	70.415.703.883.642	37.980.198.606.742
Utang Biaya Pinjaman	D.2.38	42.681.706.690.486	33.885.294.867.579
Utang Subsidi	D.2.39	57.307.157.070.590	64.433.845.108.042
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.40	188.739.402.001.578	149.134.908.708.957
<i>Unamortized Discount</i>		(52.905.644.047)	-
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.41	79.483.262.000.000	49.583.393.774.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.244.546.080.000)	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.42	13.217.535.232.714	1.358.873.118.978
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.43	13.564.185.160.475	9.782.484.473.823
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.44	120.697.517.615	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.45	65.130.423.681	3.470.723.597.386
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		469.227.744.936.972	352.308.954.175.480
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.46	3.629.337.716.270	2.876.377.932.292
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.47	2.149.470.709.718.730	1.794.044.591.049.158
<i>Unamortized Discount</i>		(13.864.923.596.202)	-
<i>Unamortized Premium</i>		15.899.248.839.972	-
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.48	63.688.116.925.000	-
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.49	14.218.871.930.000	20.431.212.930.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.50	110.692.888.988.957	84.196.327.243.997
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		2.343.734.250.522.727	1.901.548.509.155.447

Sumber: Kemenkeu, 2015b.

Gambar 8.1 menunjukkan penyajian SBN tidak memisahkan antara produk syariah maupun konvensional. Padahal konsep SBSN berbeda dengan surat berharga yang lain khususnya konvensional. Hal ini dapat dimaklumi sebab pemerintah belum memiliki standar khusus terkait penerbitan SBSN. Pemerintah

akhirnya cenderung untuk menempatkan SBSN menyatu dengan SBN konvensional yang lain.

Oleh karena itu, pemerintah dapat merujuk pada PSAK 110 sebagai bahan acuan untuk membuat standar terkait penyajian SBSN. Sehingga SBSN dan SBN konvensional dapat disajikan secara terpisah. Alasannya, SBSN dan SBN konvensional memiliki konsep yang berbeda meskipun keduanya merupakan instrumen investasi.

Tahap selanjutnya adalah pengungkapan. Pada tahap ini, suatu entitas diharuskan untuk mengungkapkan hal-hal yang perlu untuk diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). DSAS (2016:110.3) menjelaskan,

Penerbitan *sukuk ijarah* oleh entitas swasta harus mengungkapkan beberapa hal, yaitu: 1) uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan *sukuk ijarah*, 2) penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan *sukuk ijarah*, termasuk jenis dan umur ekonomik, dan 3) lain-lain.

Pemerintah belum mengungkapkan hal-hal yang perlu diungkapkan terkait SBSN yang telah diterbitkan (Kemenkeu, 2015b:160-162). Pemerintah masih mengungkapkan hal-hal yang bersifat umum terkait pos “utang SBN”. Hal ini juga dapat dimaklumi sebab belum terdapat standar khusus yang mengatur penerbitan SBSN. Ilustrasi pengungkapan SBN tampak pada Gambar 8.2 dan 8.3.

Gambar 8.2
Pengungkapan Pos SBN Jangka Pendek dalam CALK

D.2.41. Utang SBN Jangka Pendek
Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp79.483.262.000.000 dan Rp49.583.393.774.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp78.238.715.920.000 merupakan nilai bersih dari nilai Bruto sebesar Rp79.483.262.000.000 dikurangi <i>Unamortized Discount</i> sebesar Rp1.244.546.080.000 dan <i>Unamortized Premium</i> sebesar Rp0.

Sumber: Kemenkeu, 2015b.

Gambar 8.3
Pengungkapan Pos SBN Jangka Panjang dalam CALK

<p><u>D.2.47. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri</u></p> <p>Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.149.470.709.718.730 dan Rp1.794.044.591.049.158 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.151.505.034.962.500 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.149.470.709.718.730 dikurangi <i>Unamortized Discount</i> sebesar Rp13.864.923.596.202 dan ditambah <i>Unamortized Premium</i> sebesar Rp15.899.248.839.972</p> <p><u>D.2.48. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan</u></p> <p>Jumlah Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp63.688.116.925.000 dan Rp0. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan merupakan jumlah Penerbitan SBN Bulan Desember 2015 yang diperuntukkan untuk pembiayaan di awal tahun 2016 (<i>Prefunding</i>).</p>
--

Sumber: Kemenkeu, 2015b.

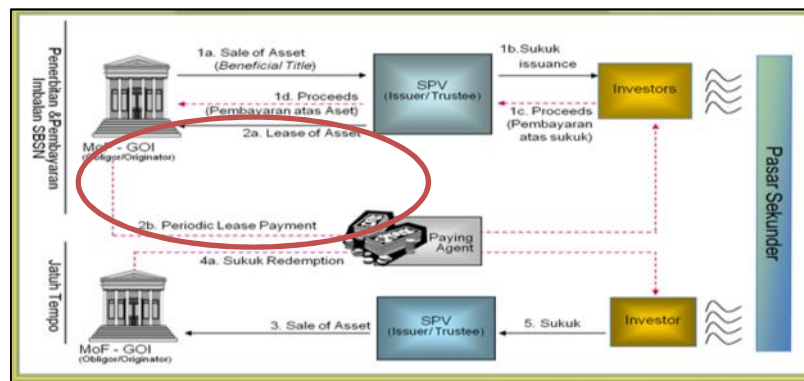
Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengungkapkan perolehan pos utang SBN dari sumber pembiayaan apa saja. Pemerintah dapat menggunakan acuan PSAK 110 yang telah memberikan syarat terkait hal-hal yang perlu diungkapkan. Hal ini sangat diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan terkait dengan SBN konvensional maupun SBSN. Terlebih lagi jika pemerintah dapat memisahkan pengungkapan antara SBN konvensional dan SBN syariah. Hal tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakannya¹⁹.

8.1.2. Substansi Akuntansi Pembayaran Ijarah

Selain transaksi penerbitan, pada penerbitan SBSN juga terdapat transaksi lain, yaitu pembayaran sewa aset. Transaksi ini terjadi ketika pemerintah menyewa kembali manfaat aset yang telah dijual. Guna memperoleh gambaran yang jelas, transaksi sewa terjadi pada Gambar 8.4.

¹⁹ Maksudnya adalah kebijakan pemerintah dalam menentukan sumber pembiayaan apa yang dapat dimaksimalkan guna membantu APBN

Gambar 8.4
Skema akad *ijarah sale and lease back*



Sumber: DPS, 2013.

Pada tahapan sebagaimana Gambar 8.4 yang terlingkar, transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) terjadi antara pemerintah dengan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Alasannya, pemerintah menggunakan hak manfaat aset BMN yang telah dibeli oleh SPV. Sehingga pemerintah harus membayar upah ('*ujrah*') atas sewa aset BMN. Oleh karena itu, pada tahapan tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang harus dicatat.

PSAK 110 menyatakan bahwa imbal hasil yang dibayarkan diakui sebagai beban. DSAS (2016:110.1) telah menjelaskan bahwa “beban *ijarah* adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit *sukuk* kepada pemilik *sukuk ijarah*”. Selanjutnya, beban *ijarah* diakui pada saat terutang (DSAS, 2016:110.3). Maksudnya adalah beban *ijarah* baru dapat diakui ketika penyewa telah mendapatkan manfaat dari aset yang digunakan.

Transaksi pembayaran imbal hasil pemerintah kepada investor melalui SPV merupakan transaksi yang harus diakui pada proses akuntansi. Pemerintah mengakui biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sewa aset sebagai beban pembayaran imbalan SBSN (Kemenkeu, 2015b:206-207). Pembayaran imbalan

tersebut dilakukan pemerintah pada tanggal tertentu setiap bulannya (Kemenkeu, 2016a dan Kemenkeu, 2016b).

Sebagaimana penjelasan di atas, pemerintah telah mengakui pembayaran sewa aset sebagai beban. Hal ini telah selaras dengan syarat yang diinginkan oleh PSAK 110. Oleh karena itu, PSAK 110 dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat standar akuntansi tentang *Sukuk* Negara di Indonesia.

Namun demikian, pemerintah juga dapat merujuk pada PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. PSAK tersebut mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk akad *ijarah* (sewa menyewa). Entitas swasta yang melakukan transaksi sewa-menyewa harus menyesuaikan perlakuan akuntansinya dengan merujuk PSAK tersebut. Alasannya, DSAS (2016:107.1) menjelaskan bahwa “pernyataan ini²⁰ diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*”.

Pada transaksi penyewaan aset BMN, pemerintah melakukan akad *ijarah* dengan SPV. Pemerintah menyewa aset BMN untuk digunakan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* sebagai bahan acuan²¹ dalam proses pencatatan akuntansi pada saat transaksi sewa.

8.2. Akad *ijarah asset to be leased*

Akad *ijarah asset to be leased* merupakan praktik akad yang diperkuat dengan fatwa DSN MUI nomor 76 tahun 2010. Akad ini merupakan akad kedua yang digunakan pada penerbitan SBSN di Indonesia setelah akad *ijarah sale and lease back*.

²⁰ PSAK 107

²¹ Ruang lingkup PSAK 107 memang tidak berlaku untuk *sukuk*. Namun demikian, PSAK 110 menjelaskan untuk setiap akad diperbolehkan mengacu kepada PSAK yang relevan. Maka khusus untuk transaksi sewa dapat mengacu pada PSAK 107. Sedangkan proses penyajian tetap mengacu pada PSAK 110

Secara prinsip, akad ini tidak jauh berbeda dengan akad *ijarah sale and lease back* yang menggunakan akad dasar *ijarah*. Perbedaannya hanya terletak pada *underlying asset* yang digunakan. Akad ini menggunakan *underlying asset* berupa proyek yang masih akan dikerjakan/dibangun. Sehingga akan ada beberapa perbedaan pada perlakuan akuntansi untuk akad ini.

8.2.1. Substansi Akuntansi Penerbitan

Tahap awal pencatatan akuntansi penerbitan *sukuk* dengan akad *ijarah asset to be leased* adalah pengakuan dan pengukuran. Suatu entitas harus mengakui dan mengukur hasil dari penerbitan *sukuk*. DSAS (2016:110.2) menjelaskan bahwa “*sukuk ijarah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan *sukuk ijarah*”. Pengakuan awal ini dilakukan pada saat *sukuk ijarah* diterbitkan. Lebih lanjut, DSAS (2016:110.2) menjelaskan “*sukuk ijarah* diakui sebesar nilai nominal setelah disesuaikan dengan premium/diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya”.

Sebagaimana yang terjadi pada akad *ijarah sale and lease back*, pemerintah juga mengakui penerbitan SBSN pada saat pertama kali transaksi (Kemenkeu, 2015b:56). Pemerintah mengakui penerbitan SBSN sebesar nilai nominal. Kemenkeu (2015b:56) menjelaskan “kewajiban dicatat sebesar nilai nominal”. Karena SBSN masuk ke dalam pos kewajiban maka penerbitan SBSN secara tidak langsung diakui oleh pemerintah sebesar nilai nominalnya. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran *Sukuk Negara* telah sesuai dengan metode yang disyaratkan oleh PSAK 110.

Pada bab 6 telah dijelaskan bahwa akad *ijarah asset to be leased* identik dengan penggunaan *underlying asset* berupa proyek. Hal ini menunjukkan bahwa

akad ini digunakan untuk memperoleh sumber pembiayaan baru untuk proyek pembangunan. Sehingga objek *ijarah* baru dalam proses diadakan.

PSAK 110 tidak secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana proses penentuan nilai nominal *sukuk*. Namun demikian, PSAK 110 telah menjelaskan bahwa “hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam pernyataan ini mengacu pada ketentuan PSAK yang relevan”. Sehingga proses penentuan nilai nominal *sukuk* dapat mengacu pada PSAK lain yang masih berkaitan. Hal ini perlu dilakukan karena PSAK 110 mendefinisikan *sukuk* sebagai “sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan kepemilikan investor atas kepemilikan fisik aset, manfaat aset, proyek, dan jasa tertentu” (DSAS, 2016:110.2). Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengakui dan mengukur proyek yang digunakan sebagai *underlying asset*. Dalam hal ini, PSAK yang relevan adalah PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. PSAK ini dianggap relevan oleh peneliti karena akad *ijarah asset to be leased* menggunakan dasar akad yang sama yaitu akad *ijarah*.

PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* telah mengatur pengakuan objek *ijarah*. Objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh/didapatkan dan diakui sebesar biaya perolehan. PSAK 107 menyarankan untuk penentuan biaya perolehan merujuk pada PSAK 16 tentang aset tetap. DSAS (2015:16.4) menjelaskan bahwa,

Biaya perolehan aset tetap meliputi: 1) harga perolehannya termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain, 2) biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan, dan 3) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap.

Oleh karena itu, biaya perolehan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai *underlying asset* SBSN harus dinilai sebesar biaya perolehannya.

Penentuan biaya perolehan dan pengakuan objek *ijarah* dapat merujuk pada PSAK 16 tentang aset tetap dan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Hal ini ditujukan agar nominal SBSN dapat merepresentasikan kepemilikan investor atas proyek yang akan dikerjakan.

Tahap selanjutnya pada perlakuan akuntansi adalah penyajian. PSAK 110 telah mengatur penyajian *sukuk ijarah*. DSAS (2016:110.3) menjelaskan bahwa “*sukuk ijarah* disajikan sebagai liabilitas dan disesuaikan jika menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka panjang dan jangka pendek”.

Sebagaimana akad *ijarah sale and lease back*, pada tahapan penyajian, penerbitan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah telah disajikan sebagai kewajiban/liabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh kemenkeu (2015b:55) bahwa,

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, utang obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), utang pembelian cicilan, dan utang jangka panjang lainnya.

Namun demikian, sebagaimana akad *ijarah sale and lease back*, pemerintah tidak memisahkan penyajian SBSN dengan SBN yang bersifat konvensional. Hal ini dapat dimaklumi karena belum adanya standar yang mengatur secara khusus tentang penerbitan SBSN. Oleh karena itu, pemerintah dapat merujuk pada PSAK 110 sebagai bahan acuan untuk membuat standar khusus terkait dengan penerbitan SBSN.

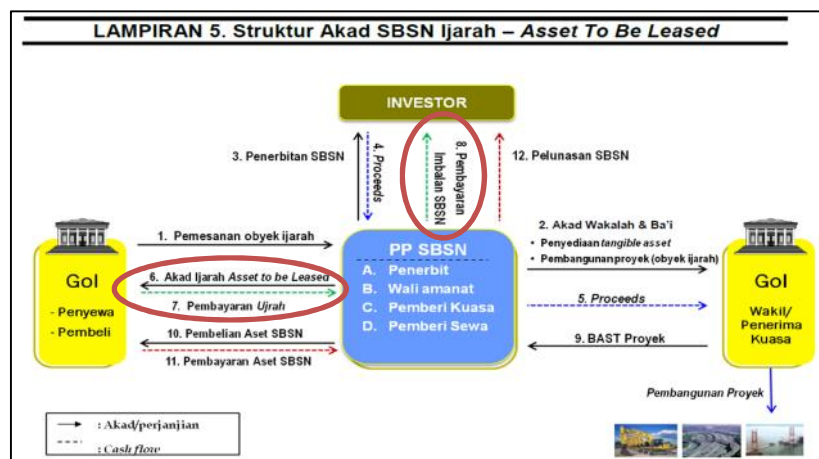
Selanjutnya adalah proses pengungkapan. Sebagaimana akad *ijarah sale and lease back*, pemerintah tidak mengungkapkan hal-hal terkait penerbitan SBSN. Pemerintah hanya mengungkapkan secara umum terkait pos “utang SBN”. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengungkapkan secara jelas informasi terkait penerbitan SBSN. Pemerintah dapat menggunakan PSAK 110 sebagai bahan

acuan untuk mengungkapkan hal-hal yang perlu diungkapkan pada penerbitan SBSN. Hal-hal yang perlu untuk diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), antara lain: 1) uraian tentang persyaratan utama penerbitan *sukuk ijarah*, 2) penjelasan atas jenis dan umur ekonomik aset atau manfaat, dan 3) lain-lain (DSAS, 2016:110.3).

8.2.2. Substansi Akuntansi Pembayaran *Ijarah*

Selain transaksi penerbitan, akad *ijarah asset to be leased* juga memiliki transaksi lain, yaitu pembayaran '*ujrah*'. Pembayaran '*ujrah*' ini dilakukan oleh pemerintah kepada PP SBSN atas jasanya menyediakan aset baru melalui proyek pembangunan. Umumnya, aset-aset yang disediakan berupa jalan, jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Hasil dari pembayaran '*ujrah*' inilah yang nantinya oleh PP SBSN digunakan untuk pembayaran imbal hasil kepada para investor SBSN. Dengan demikian, akad yang sebenarnya terjadi pada tahap ini adalah pembayaran imbal hasil dari pemerintah kepada investor SBSN. Guna memperoleh gambaran tentang siklus penerbitan SBSN dengan *akad ijarah asset to be leased* disajikan pada gambar 8.5 berikut.

Gambar 8.5
Skema akad *ijarah asset to be leased*



Sumber: Kemenkeu, 2016a.

Pada urutan 6 dan 7 Gambar 8.5, pemerintah dan PP SBSN melakukan akad *ijarah asset to be leased*. Selanjutnya, pemerintah melakukan pembayaran imbal hasil kepada investor melalui PP SBSN. Karena terdapat aliran uang pada tahap ini maka terdapat kegiatan ekonomi yang juga harus dicatat. Sehingga pembayaran '*ujrah*' harus diakui. Sebagaimana akad *ijarah sale and lease back*, pemerintah mengakui pembayaran '*ujrah*' sebagai beban pembayaran imbalan SBSN (Kemenkeu, 2015b:207). Pembayaran imbalan tersebut dilakukan pada tanggal tertentu setiap bulannya (Kemenkeu, 2015a dan Kemenkeu, 2015b)

PSAK 110 menyatakan bahwa imbal hasil yang dibayarkan diakui sebagai beban. DSAS (2016:110.1) telah menjelaskan bahwa "beban *ijarah* adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit *sukuk* kepada pemilik *sukuk ijarah*". Selanjutnya, beban *ijarah* diakui pada saat terutang (DSAS, 2016:110.3).

Terdapat hal krusial yang perlu diperhatikan pada tahapan pembayaran '*ujrah*'. Hal tersebut terkait dengan kapan waktu pembayaran '*ujrah*' terjadi. Pembayaran '*ujrah*' dilakukan secara rutin setelah akad dilakukan. Kemenkeu (2016a) menjelaskan "Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ditetapkan sebesar 8,30% (delapan koma tiga puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan". Apabila akad dilakukan maka pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar '*ujrah*' sesuai dengan periode yang disepakati. Sehingga pembayaran '*ujrah*' tidak memperhatikan apakah *underlying asset* telah terselesaikan atau tidak.

Sebagaimana telah dibahas pada bab 6, pemerintah telah memiliki fatwa yang mendukung praktik tersebut. Fatwa DSN nomor 101 tentang *al ijarah al mausufah fi adz dzimmah* mengizinkan untuk membayar '*ujrah*' meskipun

underlying asset belum ada atau masih dalam pengerjaan. DSN (2016) menjelaskan “Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa”. Pernyataan DSN tersebut tidak menjelaskan terkait dengan wujud objek, apakah *ujrah* diberikan ketika wujud objek telah terselesaikan atau *ujrah* dibayarkan tepat setelah akad dilaksanakan. Oleh karena itu, karena keumuman pernyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyewa harus membayarkan ‘*ujrah* setelah akad dilakukan.

Di sisi lain, PSAK 110 menjelaskan “beban *ijarah* diakui pada saat terutang²²” (DSAS, 2016:110.3). Apabila proyek belum terselesaikan maka tidak mungkin ada manfaat dari aset yang dapat dimanfaatkan. Sehingga pemerintah tidak akan memperoleh manfaat objek *ijarah* berupa proyek jika proyek tersebut belum terselesaikan. Oleh karena itu, apabila skema ini dilakukan maka akan bertentangan dengan definisi substansi *sukuk* maupun syarat yang ditentukan oleh PSAK 110.

8.3. Akad *ijarah al khadamat*

Akad *ijarah al khadamat* merupakan akad khusus pada penerbitan SBSN yang terjadi pada kegiatan haji Indonesia. Akad ini mengombinasikan akad *ijarah* dan akad *wakalah* dalam pengelolaan penerbitan SBSN seri *Sukuk Dana Haji Indonesia* (SDHI). Sebagaimana 2 akad sebelumnya, akad *ijarah al khadamat* menggunakan dasar akad *ijarah*. Akad *ijarah* digunakan untuk pembayaran jasa layanan haji yang telah disediakan oleh SPV. Pada penerbitan SBSN dengan akad *ijarah al khadamat* ini, pemerintah juga dapat merujuk PSAK 107 tentang

²²Maknanya adalah beban *ijarah* baru dapat diakui ketika penyewa telah mendapatkan manfaat dari aset yang digunakan.

akuntansi *ijarah* dan 110 tentang akuntansi *sukuk* sebagai acuan untuk perlakuan akuntansinya.

8.3.1. Substansi Akuntansi Penerbitan

Tidak jauh berbeda dengan 2 akad sebelumnya, tahapan awal dalam perlakuan akuntansi adalah pengakuan dan pengukuran. DSAS (2016:110.2) menjelaskan “*sukuk ijarah* diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan *sukuk ijarah*”. Kemudian pengakuan *sukuk ijarah* dilakukan pada saat *sukuk ijarah* diterbitkan (DSAS, 2016:110.2). Lebih lanjut, DSAS (2016:110.2) menjelaskan “*sukuk ijarah* diakui sebesar nilai nominal setelah disesuaikan dengan premium/diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya”.

Sebagaimana yang terjadi pada akad 2 akad sebelumnya, pemerintah juga mengakui penerbitan SBSN pada saat pertama kali transaksi (Kemenkeu, 2015b:56). Pemerintah mengakui penerbitan SBSN sebesar nilai nominal. Kemenkeu (2015b:56) menjelaskan “kewajiban dicatat sebesar nilai nominal”. Karena SBSN masuk ke dalam pos kewajiban maka penerbitan SBSN secara tidak langsung diakui oleh pemerintah sebesar nilai nominalnya. Oleh karena itu, pengakuan dan pengukuran *Sukuk* Negara telah sesuai dengan metode yang disyaratkan oleh PSAK 110.

Tahap selanjutnya adalah penyajian. PSAK 110 telah mengakomodasi proses penyajian pada penerbitan *sukuk*. DSAS (2016:110.3) menjelaskan bahwa “*sukuk ijarah* disajikan sebagai liabilitas”. Lebih lanjut, DSAS (2016:110.3) juga

menekankan apabila entitas mengklasifikasikan²³ pos kewajibannya maka penyajian *sukuk* juga mengikuti klasifikasi tersebut.

Sebagaimana akad 2 akad sebelumnya, pada tahapan penyajian, penerbitan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah telah disajikan sebagai kewajiban/liabilitas. Kemenkeu menjelaskan (2015b:55) bahwa,

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, utang obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), utang pembelian cicilan, dan utang jangka panjang lainnya.

Namun demikian, penyajian SBSN yang dilakukan pemerintah masih bersatu dengan instrumen investasi yang bersifat konvensional. Hal ini tampak pada Gambar 8.1. Padahal, PSAK 110 menghendaki agar penyajian *sukuk ijarah* pada laporan posisi keuangan terpisah dengan instrumen investasi yang lain. Oleh karena itu, pemerintah dapat merujuk pada PSAK 110 sebagai bahan acuan dalam pembuatan standar akuntansi terkait penerbitan SBSN.

Tahap selanjutnya adalah pengungkapan. Sebagaimana 2 akad sebelumnya, pemerintah tidak mengungkapkan hal-hal terkait penerbitan SBSN. Pemerintah hanya mengungkapkan secara umum terkait pos “utang SBN”. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mengungkapkan secara jelas informasi terkait penerbitan SBSN. Pemerintah dapat menggunakan PSAK 110 sebagai bahan acuan untuk mengungkapkan hal-hal yang perlu diungkapkan pada penerbitan SBSN. Hal-hal yang perlu untuk diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), antara lain: 1) uraian tentang persyaratan utama penerbitan *sukuk ijarah*, 2) penjelasan atas jenis dan umur ekonomik aset atau manfaat, dan 3) lain-lain (DSAS, 2016:110.3).

²³ Memisahkan pos kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pada tahapan ini, pemerintah membayarkan '*ujrah* kepada SPV. Pembayaran '*ujrah* dilakukan karena jasa SPV yang telah menyediakan layanan haji. Sehingga pemerintah harus mengakui transaksi ekonomi tersebut.

Sebagaimana akad *ijarah sale and lease back*, pemerintah juga dapat merujuk pada PSAK 107 dan 110 sebagai acuan dalam membuat standar akuntansi penerbitan SBSN. PSAK 110 menyatakan bahwa imbal hasil yang dibayarkan diakui sebagai beban. DSAS (2016:110.1) telah menjelaskan bahwa “beban *ijarah* adalah imbal hasil yang diberikan oleh penerbit *sukuk* kepada pemilik *sukuk ijarah*”. Selanjutnya, beban *ijarah* diakui pada saat terutang (DSAS, 2016:110.3).

Pemerintah mengakui biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran *ujrah* sebagai beban pembayaran imbalan SBSN (Kemenkeu, 2015b:206-207). Sehingga pemerintah telah mengakui pembayaran sewa aset sebagai beban. Hal ini telah selaras dengan syarat yang diinginkan oleh PSAK 110.

Pemerintah juga dapat merujuk pada PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Alasannya, DSAS (2016:107.1) menjelaskan bahwa “pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*”. Karena pemerintah melakukan transaksi *ijarah* dengan SPV maka pemerintah perlu menggunakan PSAK 107 sebagai acuan dalam membuat standar akuntansi penerbitan SBSN.

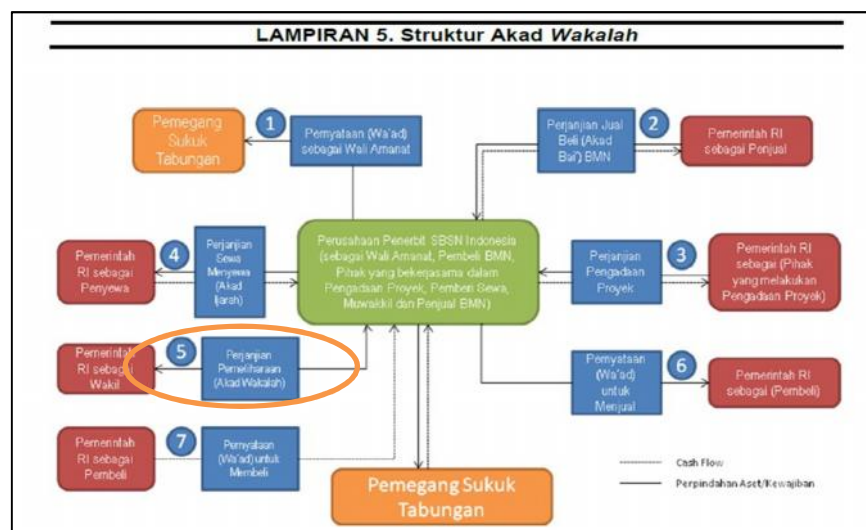
8.4. Akad *wakalah*

Akad *wakalah* merupakan kombinasi dari akad *ijarah sale and lease back* dan *ijarah asset to be leased*. Kombinasi tersebut terjadi karena *underlying asset* akad *wakalah* merupakan gabungan antara aset BMN dan proyek. Sehingga semua perlakuan akuntansi akad ini sama dengan kedua akad tersebut. Hal ini telah dibahas secara detail pada sub bab 8.1 dan 8.2.

Terdapat hal yang menarik dari akad *wakalah*. Pada skema akad ini terdapat perjanjian dari PP SBSN untuk mewakilkan pemeliharaan objek *ijarah* kepada pemerintah. Karena pada dasarnya kewajiban pemeliharaan objek *ijarah* adalah

menjadi tanggung jawab pemilik. DSAS (2016:107.3) menjelaskan “biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik”. Konsekuensi dari perjanjian ini adalah PP SBSN harus memberikan upah kepada pemerintah atas jasanya memelihara objek *ijarah*. Sehingga pemerintah memperoleh pendapatan dari jasanya tersebut. Oleh karena itu, pada sub bab ini peneliti hanya berfokus pada perlakuan akuntansi imbal jasa yang diperoleh pemerintah.

Gambar 8.7
Skema akad *wakalah*



Sumber: Kemenkeu, 2016b.

PSAK 110 tidak menjelaskan secara spesifik terkait pendapat yang mungkin diperoleh pemerintah dari penerbitan *sukuk*. Namun demikian, PSAK 110 menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dapat mengacu pada PSAK lain yang relevan (DSAS, 2016:110.1). PSAK yang relevan dengan transaksi ini adalah PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.

PSAK 107 telah mengakomodasi perlakuan akuntansi terkait pendapatan dari transaksi *ijarah*. Pada tahap pengakuan, DSAS (2016:107.2) menjelaskan “pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa”. Dengan demikian, ketika pemerintah telah

memelihara objek *ijarah* sampai waktu yang ditentukan maka pemerintah boleh meminta imbalan atas jasanya. Alasannya, PP SBSN secara tidak langsung menyewa pemerintah untuk memelihara objek *ijarah* miliknya. Selanjutnya pada tahap penyajian, DSAS (2016, 107.4) menjelaskan “pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya”. Oleh karena itu, pemerintah dapat merujuk pada PSAK 107 sebagai bahan acuan dalam proses perlakuan akuntansi pendapatan yang diperoleh.

8.5. Sintesis

Berdasarkan pembahasan di atas, secara umum perlakuan akuntansi SBSN telah sesuai dengan PSAK 107 dan 110 milik entitas swasta. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kedua standar tersebut.

Pemerintah perlu untuk membuat standar akuntansi pemerintah baru yang khusus mengatur transaksi *Sukuk* Negara. Hal ini diperlukan agar proses perlakuan akuntansi *Sukuk* Negara memiliki pedoman baku dalam praktiknya.

Kemudian terkait dengan pembayaran *‘ujrah* seharusnya dilakukan ketika *underlying asset* telah terselesaikan. Skema inilah yang lebih sesuai dengan definisi substansi *sukuk* dan syarat dari PSAK 110. Pada skema ini, pemerintah membayar manfaat ketika *underlying asset* telah diselesaikan. Sehingga pemerintah dapat merasakan manfaat dari *underlying asset* dan dapat mengakui pembayaran *‘ujrah* sebagai beban. Alasannya, DSAS (2016:110.3) menjelaskan “beban *ijarah* diakui pada saat terutang”. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan skema kedua ini agar sesuai dengan definisi substansi *sukuk* dan

PSAK 110 sebagai bahan acuan dalam membuat standar tersendiri yang mengatur tentang SBSN.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perlakuan akuntansi *Sukuk* Negara, antara lain:

1. Pada tahap pengukuran, nilai nominal SBSN harus dapat mencerminkan nilai dari *underlying asset* yang digunakan. Alasannya, *sukuk*/SBSN merupakan instrumen syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu dari: 1) aset berwujud tertentu, 2) manfaat atas aset berwujud, 3) jasa, 4) aset proyek tertentu, dan 5) kegiatan investasi yang telah ditentukan (DSAS, 2016:101.2). Sedangkan nilai nominal ditentukan dari biaya perolehannya.
2. Pada tahap penyajian, pemerintah harus menyajikan secara jelas nilai SBSN dan terpisah dengan instrumen konvensional lainnya pada laporan posisi keuangannya. Penyajian ini diilustrasikan pada Gambar 8.8.

Gambar 8.8
Ilustrasi Penyajian Kewajiban SBSN

Laporan Posisi Keuangan Untuk periode berakhir 31 Desember 2015	
Aset	
Aset lancar	xxx
Aset tidak lancar	<u>xxx</u>
Total aset	xxx
Kewajiban & Ekuitas	
Kewajiban jangka pendek	
Utang usaha	xxx
Kewajiban SBSN	xxx
Kewajiban lain-lain	xxx
Kewajiban jangka panjang	
Utang obligasi	xxx
Kewajiban SBSN	xxx
Kewajiban lain-lain	<u>xxx</u>

Total Kewajiban	xxx
Ekuitas	
Total Ekuitas	<u>xxx</u>
Total Kewajiban dan Ekuitas	xxx

3. Pada tahap pengungkapan, pemerintah harus mengungkapkan hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal-hal tersebut, antara lain: 1) uraian tentang persyaratan utama penerbitan *sukuk ijarah*, 2) penjelasan atas jenis dan umur ekonomik aset atau manfaat, dan 3) lain-lain (DSAS, 2016:110.3).
4. Pemerintah dapat merujuk pada PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* dan PSAK 110 tentang akuntansi *sukuk* sebagai bahan acuan dalam membuat standar khusus terkait dengan akuntansi SBSN.

BAB IX

PENUTUP

“Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
[QS. Asy-Syura: 25]

9.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi dari implementasi *sukuk* negara di Indonesia dari aspek kepatuhan syariah dan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan hasil, yaitu:

1. Implementasi *sukuk* negara di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan pada aspek kepatuhan syariah, di antaranya:
 - a. Keberadaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak merubah substansi akad.
 - b. Substansi akad yang dominan terjadi adalah utang-piutang.
 - c. Perjanjian *sale and purchase undertaking* menyebabkan akad mengandung jual beli *wafa'* yang tidak diperkenankan.
 - d. Imbal hasil *sukuk* negara masih didasarkan pada nilai pokok dari investasi yang ditanamkan.
2. Pada dasarnya, belum terdapat standar akuntansi khusus yang mengatur tentang implementasi *sukuk* negara di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu untuk membuat standar akuntansi khusus terkait penerbitan *sukuk* negara di Indonesia. Pembuatan standar tersebut dapat mengacu pada PSAK 110 tentang akuntansi *sukuk* yang telah digunakan oleh entitas swasta/korporasi.

9.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengakses informasi terkait dengan daftar nominasi aset yang digunakan sebagai *underlying asset*, metode penentuan imbal hasil di setiap seri *Sukuk* Negara, dan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kementerian agama dan kementerian keuangan. Akibatnya, peneliti tidak dapat melakukan analisis secara mendalam terkait aspek-aspek yang terkait dengan data tersebut.

9.3. Saran

9.3.1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan memiliki akses langsung pada Direktorat Pembiayaan Syariah (DPS) maupun Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan data pada studi literatur yang tidak dapat diakses kecuali memperoleh akses dari pemerintah secara langsung.

9.3.2. Bagi Dewan Fatwa dan Ulama

Saran untuk Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah diharapkan DSN melakukan pengajian ulang terkait dengan skema penerbitan *Sukuk* Negara di Indonesia. Pengajian ulang tentang skema penerbitan *Sukuk* Negara adalah terkait dengan beberapa hal, antara lain:

1. Kebolehan akan adanya perjanjian untuk membeli kembali barang yang telah dijual.
2. Metode penentuan dasar imbal hasil *Sukuk* Negara dan waktu pembagiannya.
3. Jaminan undang-undang untuk membayar nilai nominal dan imbal hasil.

9.3.3. Bagi Regulator *Sukuk* Negara

Saran untuk regulator *sukuk* negara adalah regulator diharapkan dapat menyesuaikan kembali beberapa skema *sukuk* negara di Indonesia. Beberapa penyesuaian yang hendaknya dilakukan, antara lain:

1. Menyesuaikan penentuan imbal hasil dari hasil yang diperoleh dari *underlying asset* bukan didasarkan pada nominal investasi.
2. Menyesuaikan waktu pembayaran imbal hasil. Imbal hasil baru dapat dilakukan ketika *underlying asset* telah siap dimanfaatkan dan telah menghasilkan.
3. Membuat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khusus terkait dengan penerbitan *sukuk* negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2010. *Shari'a Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Abu Dawud. __. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Afrianto, Dedy. 2016. *Sri Mulyani Nilai DPR Kurang Paham Masalah Underlying Asset Barang Milik Negara*. (economy.okezone.com) diakses 13 Februari 2016.
- Afshar, T. A. 2013. Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible?. *The Journal of Global Business Management Volume 9 Number 1 February 2013*.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. __. *Terjemah Bulughul Maram min Adillatil Ahkaam*. Terjemahan Dani Hidayat. 2010. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Al-Fauzan, Sholih bin Fauzan. __. *Terjemah Al-Buyuu' Al-Manhiya 'Anhaa Fil Islam*. Terjemahan Ummu Abdullah. 2008. Kendari: Makhtabah Raudhatul Muhibbin.
- Al-Mushlih dan Ash-Shawi. 2003. *Akhlaq Pengusawan Muslim – Jual Beli yang Diperdebatkan*. (www.alsofwah.or.id) diakses 10 Januari 2017.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2014. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al Kausar.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 1994. *Tiga Landasan Utama – Syarh Al Ushuluts Tsalatsah*. Terjemahan Daz, Muhammad. 2013. Tegal: Ash-Shaf Media.
- Alfi, I. A. dkk. 2016. *IIFM Sukuk Report (5th Edition): A Comprehensive study of the Global Sukuk Market*. (www.iifm.net) diakses pada 12 Juni 2016.
- Allens, Jul. 2015. Tidak Sampai Sepekan Pemerintah Berhasil Memperoleh Dana Segar 57 Triliun. (centuryrealtime.com) diakses 14 September 2016.
- Ariff, M. dan Safari M. 2012. Are Sukuk Securities the Same as Conventional Bonds?. *Afro Eurasian Studies, Vol. 1, Issue 1, Spring 2012, 101-125*.
- Ariyanti, Fiki. 2016. *Penjualan Sukuk Tabungan Seri-001 Lampau Target*. (liputan6.com) diakses 27 Oktober 2016.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 1999. *Islam itu Indah*. Terjemahan Falihi. 2011. Yogyakarta: Pustaka Salafiyah.

- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. __. *Agama Islam Solusi Problematika Kehidupan*. Terjemahan Gazali. 2012. (islamhouse.com) diakses 30 September 2016
- Ash-Shan'ani, Muhammad. __. *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram Jilid 2*. Terjemah Isnan dan Fauzan. 2007. Jakarta: Darus Sunnah.
- At-Tamimi, Muhammad. 1990. Ringkasan *Zaadul Ma'ad* Bekal Perjalanan Ke Akhirat. Terjemahan Suhardi, Kathur. 2000. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Tuwaijiri, Muhammad. __. *Ringkasan Fiqih Islam*. Terjemahan Haryanto dan Latif. 2012. (islamhouse.com) diakses 19 September 2016.
- Badri, Muhammad A. 2012. *Majalah Pengusaha Muslim – Bersihkan Riba di Bank Syariah edisi 25*. Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Badri, Muhammad A. 2013. *Tuntunan Syariah untuk Meraih Bisnis dan Rezeki Barokah*. Yogyakarta: Pengusaha Muslim.
- Baits, Ammi N. 2016. *Ada Apa dengan Riba ?*. Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja.
- BRI. 2016. Brosur SBSN Seri *Sukuk Tabungan*.
- Cresswell. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed edisi ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DPS. 2010. *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Edisi Kedua*. Jakarta: Kementrian Keuangan.
- DPS. 2013. Brosur Sukuk Negara. DJPU Kemenkeu.
- DPS. 2016a. *Sukuk Ritel*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 6 Oktober 2016.
- DPS. 2016b. *Sukuk Tabungan*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 7 April 2017.
- Denzim dan Lincoln. 2005. *The SAGE Handbook of Qualitative Research 3rd Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- DJA. 2016a. *Informasi APBN 2016*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 14 September 2016.
- DJA. 2016b. *Informasi APBN Perubahan 2016*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 16 September 2016.
- DJA. 2016c. *Infografis APBN-P 2016*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 16 September 2016.

- Djaelani, Firdaus. 2013. *Industri Keuangan Syariah akan Terus Tumbuh*. (www.syariahamandiri.com) diakses 27 Oktober 2016.
- DJJPR. 2016. *Produk Surat Berharga Syariah Negara*. (www.djjpr.kemenkeu.go.id) diakses 1 November 2016
- DSAK. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- DSAS. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- DSN. 2000. Fatwa DSN Nomor 10 tentang *Wakalah*.
- DSN. 2014. Fatwa DSN Nomor 95 tentang *SBSN Wakalah*.
- DSN. 2016. Fatwa DSN Nomor 101 tentang *al ijarah al mausufah fi adz dzimmah*.
- Faisol, Ahmad. 2015. *Calon Jamaah Haji Dapat Subsidi Rp24 Juta Rupiah per Orang*. (surabaya.tribunnews.com) diakses 2 April 2017.
- Fatimah, N. E. 2015. Siaran Pers Sekjen Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Handayani, Dian. 2015. *Ketika Sukuk Menarik Minat Dunia*. (www.kemenkeu.go.id) diakses pada 12 Juni 2016.
- Hariyanto, Eri. 2015a. *Reputasi Sukuk Global Indonesia*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 1 November 2016.
- Hariyanto, Eri. 2015b. *Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara*. (www.kemenkeu.go.id) diakses 4 Januari 2016.
- Hasan, Ali. 1990. *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*. Terjemahan Haris, Ainul. 2005. Jakarta: Darul Falah.
- Haura, Arie. 2010. *Pengelolaan Dana Haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia*. *Skripsi*. Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
- Jamaldeen, Faleel. 2012. *How Sukuk (Islamic Bonds) Differ From Konventional Bonds*. (www.dummies.com) diakses 23 Desember 2016.
- Juliandi *et al.* 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Teori*. Medan: Umsu Press.
- Katsir. 1994a. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Terjemahan Abdul Ghofar. 2004. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.

- Katsir. 1994b. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Terjemahan Abdul Ghofar. 2004. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Katsir. 1994c. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Terjemahan Abdul Ghofar. 2004. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Kemenkeu. 2015a. *Siaran Pers Sekjen Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI*. Jakarta.
- Kemenkeu. 2015b. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015 Audited*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. 2016a. *Memorandum Informasi Sukuk SR-008*. Jakarta.
- Kemenkeu. 2016b. *Memorandum Informasi Sukuk ST-001*. Jakarta.
- Kemenkeu. 2016c. *Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI*. Jakarta.
- Kemenkeu. 2016d. *Siaran Pers Pembukaan Masa Penawaran Sukuk Tabungan Seri ST-001*. Jakarta.
- KSEI. 2016. *SBSN-Surat Berharga Syariah Negara*. (www.ksei.co.id) diakses 1 November 2016.
- Kurniati, Lin. 2014. *Media Keuangan Vol. XI, No. 83 ISSN 1907-6320*. Jakarta: Sekjen Kemenkeu.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: Rosda.
- Maurer, Bill. 2010. Form versus Substance: AAOIFI projects and Islamic fundamentals in the case of sukuk. *Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 1 No. 1, 2010 pp. 32-41*.
- Naim, dkk. 2013. The effects of new AAOIFI standards on Sukuk in choosing the most authentic Islamic principles. *Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 4 No. 1, 2013 pp. 77-93*.
- Nasrullah, Aan. 2015. Studi Surat Berharga Negara: Analisis Komparatif Sukuk Negara dengan Obligasi Negara Dalam Pembiayaan Defisit APBN. *Jurnal Lentera ISSN: 1693 – 6922 Volume 13, Nomor 2 halaman 52-68*.
- Nuryusmansyah. 2013. *Dalam Kondisi Darurat Hal yang Terlarang Dibolehkan*. (www.muslim.or.id) diakses 19 Januari 2017.
- Nur Kholis. 2011. Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan. (nurkholis77.staff.uui.ac.id) diakses 23 Desember 2016.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah*. (www.ojk.go.id) diakses pada 19 Agustus 2016.
- Qathan, Manna'. 1999. *Tarikh At-Tasyri' Al Islamy*. Riyadh: Makhtabah Al-Ma'arif Lin-Nasyr Wat-Tauzi'.
- Qayyim. 1996. *Panduan Hukum Islam*. Terjemahan Syaefullah, Asep. 2000. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qayyim. __. Kunci Kebahagiaan. Terjemahan Al Katani, dkk. 2004. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Rama, Ali. 2014. *Refleksi Perkembangan Ekonomi Syariah*. Kolom Opini Koran Fajar Makassar.
- Sa'id. 2016. *Tsalatsatul Ushul (4) : Tujuan Diciptakannya Manusia*. (muslim.or.id) diakses 30 September 2016.
- Sekaran dan Bougie. 2013. *Research Methods for Business – A Skill Building Approach 6th Edition*. United Kingdom: Wiley.
- Seniawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Ebta. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. (kbbi.web.id) diakses 28 September 2016.
- Sholihin, Ahmad I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, Yudi. 2016. *Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (Menenal Jenis-Jenis Sukuk Negara bagian 1)*. (akucintakeuangansyariah.com) diakses 1 November 2016.
- Taimiyyah. 1999. *Al-'Ubudiyyah*. Dubai: Dar Al-Ashalah.
- Taimiyyah. 2004. *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Jilid 29*. Madinah: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathanbih.
- Tarmizi, Erwandi. 2014. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: BMI Publishing.
- Taqi, Muhammad. 2008. *Sukuk and Their Contemporary Applications*. South Africa: Mujlisul Ulama.

- Trimegah. 2014. Brosur Sukuk Negara Ritel SR-007. Jakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2015. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tuasikal, Muhammad A. 2012. *Keadaan Darurat Membolehkan Sesuatu yang Terlarang*. (www.rumaysho.com) diakses 19 Januari 2017.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah.
- Wilson. 2008. Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities. *Humanomics Vol. 24 No. 3, 2008 pp. 170-181*
- Yazid. 2007. Pengertian Ibadah dalam Islam. (almanhaj.or.id) diakses 30 September 2016.
- Zaky, Achmad. 2014. *Modul Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Syariah: Akad dan Akuntansi Transaksi Syariah Edisi III*. Malang: IFAS.
- Zaky, Achmad. 2015. *Pelatihan Akuntansi dan Keuangan Syariah Level Elementary 28 Februari – 1 Maret 2015*. Malang.
- Zulhibri, Muhamed. 2015. A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk. *Borsa I'stambul Review 15-4 (2015) 237–248*.
- Zuraya, Nidia. 2013. *Penempatan Dana Haji dalam Sukuk Diperkuat*. (www.republika.co.id) diakses 16 Maret 2017.